

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO

Nonce Y. Manggong¹, Vecky A.J. Masinambow², Ita Pingkan F. Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: noncemanggong06@gmail.com, vecky.masinambow@yahoo.com, itapingkan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Eviens 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya apabila pendapatan asli daerah bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya cateris paribus. Sedangkan untuk dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya apabila dana alokasi khusus bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya cateris paribus. Hasil yang lain menunjukkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of this study was to see how the influence of regional original income, general allocation funds, special allocation funds and profit sharing funds on poverty. The analytical tool used is multiple regression analysis with the help of Eviens 8. Results of the study showed that regional original income had a negative and significant effect on poverty. The results of the study show that general allocation funds have no effect on poverty. The results of the study show that regional original income has a negative and significant effect on poverty. This means that if local revenue increases or increases, poverty will decrease or decrease and vice versa cateris paribus. Meanwhile, special allocation funds have a positive and significant effect on poverty. This means that if the special allocation fund increases or increases, poverty will decrease or decrease and vice versa cateris paribus. Other results show that general allocation funds and profit-sharing funds have no effect on poverty.

Keywords: Fiscal Decentralization, Poverty Level

1. PENDAHULUAN

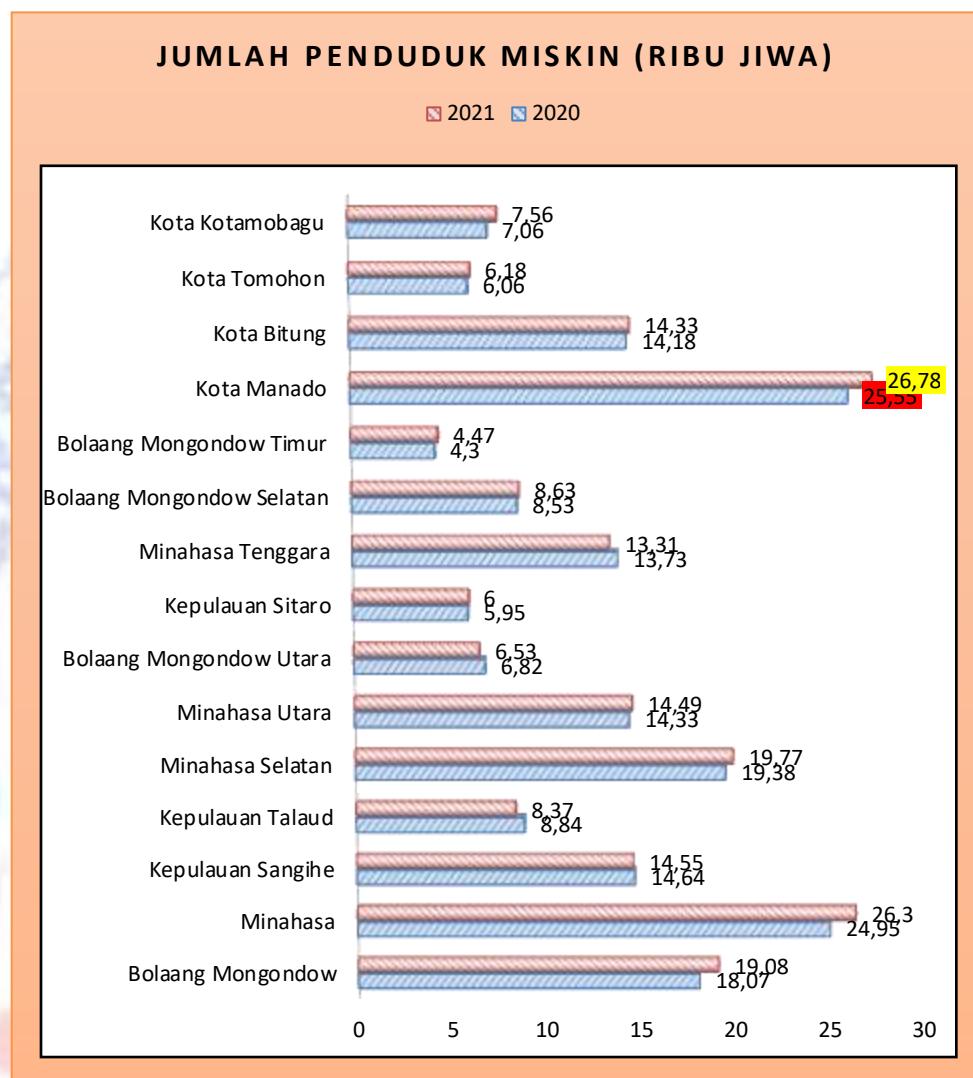
Latar belakang

Peranan pemerintah dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan langsung atau tidak langsung salah satu bentuk peranan pemerintah secara langsung adalah dengan intervensi anggaran melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan, kebijakan bukan pajak, kebijakan anggaran belanja negara maupun kebijakan pembiayaan anggaran termasuk transfer. Sedangkan peran pemerintah secara tidak langsung dapat di tempuh melalui berbagai regulasi atau peraturan pemerintah.

Masalah yang masih banyak dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam pembangunan, hal ini tidak lagi hanya dilihat dari sisi ekonomi atau moneter saja, akan tetapi dilihat dari berbagai aspek terkait dengan kemiskinan tersebut. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, maka upaya penaggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakatnya sendiri. Provinsi Sulawesi Utara juga tidak lepas dari masalah kemiskinan

terlebih khusus daerah penelitian yaitu Kota Manado yang merupakan Ibu Kota Sulawesi Utara. Berikut adalah jumlah penduduk miskin di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 1.
Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021-2022 (dlm Ribu Jiwa)



Sumber Data; BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan kemiskinan khususnya jumlah penduduk miskin di kabupaten kota di Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat bahwa penduduk dengan tingkat kemiskinan terbanyak yaitu berada di Kota Manado dengan jumlah 25,55 ribu jiwa pada tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,78 ribu jiwa.

Masalah yang banyak dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu kemiskinan. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, maka upaya penanggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakatnya sendiri. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu ukurannya yaitu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Menurut penelitian Andika dan Hastarini (2011), kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan 3 masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Widjaja ; 2002).

Tujuan diberlakukannya sistem desentralisasi adalah untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait dengan keuangan daerah Halim (2002:128) "kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan kemandirian keuangan daerah dalam hal ini kebijakan fiskal yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Dengan adanya desentralisasi fiskal dengan besaran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seharusnya diiringi dengan adanya peningkatan kesejateraan masyarakat. berikut data PAD, DAU, DAK dan DBH Kota Manado Tahun 2007 sampai 2021:

Tabel 1
Perkembangan Data PAD, DAU, DAK dan DBH Kota Manado
Tahun 2007-2021

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH
2007	54.715.561.525	374.754.000.000	30.898.500.000	37.397.000.788
2008	73.898.733.040	430.073.269.000	42.741.000.000	41.506.863.194
2009	72.404.996.767	420.752.563.000	55.682.000.000	44.264.400.585
2010	72.404.996.767	420.481.311.000	28.014.400.000	60.747.411.978
2011	134.721.720.942	482.198.138.000	42.958.200.000	49.347.807.983
2012	178.178.928.832	576.989.312.000	44.229.500.000	66.138.557.949
2013	215.871.042.643	647.565.931.000	51.989.870.000	57.487.390.973
2014	263.392.316.992	729.213.779.000	49.614.960.000	34.184.855.374
2015	289.462.741.463	750.810.852.000	147.113.780.000	29.042.967.533
2016	345.215.373.491	740.987.609.000	139.053.877.500	53.042.981.749
2017	374.608.722.678	727.970.839.000	258.838.544.606	44.828.519.612
2018	363.177.940.171	727.970.839.000	165.407.742.587	46.829.082.756
2019	377.379.618.671	788.240.853.000	157.460.345.260	35.451.884.742
2020	261.756.116.854	715.060.730.000	164.191.510.465	48.386.750.923
2021	292.635.793.644	702.045.434.844	151.097.913.816	66.826.261.925

Sumber data : Kota Manado Dalam Angka

Berdasarkan data yang ada pada table diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Manado cenderung meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 261.756.116.854 juta rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 292.635.793.644 juta rupiah. Begitu juga dengan dana alokasi umum mengalami kenaikan DAU dari tahun 2007 sampai 2015 akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 740.987.609.000 juta rupiah dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 727.970.839.000 juta rupiah pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 788.240.853.000 juta rupiah. Pada tahun 2021 DAU turun menjadi 702.045.434.844 juta rupiah.

Dana alokasi khusus berdasarkan data pada table diatas terus mengalami peningkatan DAK dari tahun 2007 sampai 2015 sebesar 147.113.780.000 juta rupiah akan tetapi tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 139.053.877.500 juta rupiah. Mengalami peningkatan tahun 2017 menjadi 258.838.544.606 juta rupiah. Tahun 2019 mengalami penurunan DAK menjadi 157.460.345.260 juta rupiah. Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 164.191.510.465 juta rupiah akan tetapi tahun 2021 turun menjadi 151.097.913.816 juta rupiah.

Dana bagi hasil juga setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan

penurunan setiap tahunnya. Dana bagi hasil mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai 2010 sebesar 60.747.411.978 rupiah, akan tetapi tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 49.347.807.983 rupiah. Meningkat pada tahun 2012 sebesar 66.138.557.949 rupiah mengalami penurunan sampai tahun 2015 sebesar 29.042.967.533 rupiah. Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 53.042.981.749 rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 66.826.261.925 rupiah.

Peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam hal pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan. Peningkatan jumlah dana transfer yang diterima Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah diantaranya berupa pengentasan kemiskinan melalui kebijakan alokasi belanja daerahnya. Juga Simanjuntak (2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait judul **“ Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan APBN, dimana dana tersebut dialokasikan untuk pemerataan keuangan suatu daerah dengan mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan desentralisasi seperti yang telah dijabarkan dalam PMK Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBN-P Tahun 2017. Dana alokasi umum erat kaitannya dengan belanja daerah terutama belanja daerah bidang pendidikan. Dana alokasi umum diperuntukkan untuk upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat.

Dana Alokasi Khusus

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat. Dana ini memiliki tujuan yakni membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah yang menjadi suatu urusan tersendiri bagi daerah tersebut dan dilakukan dengan prioritas nasional. Pembiayaan tersebut diantara lain adalah untuk sarana prasarana masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong cepatnya kemajuan pembangunan suatu daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana ana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana. Hal tersebut terjadi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan masyarakat setempat daerah penghasil sumber daya agar dapat memberikan manfaat bagi daerah tersebut (Putra, 2015).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Penelitian Terdahulu

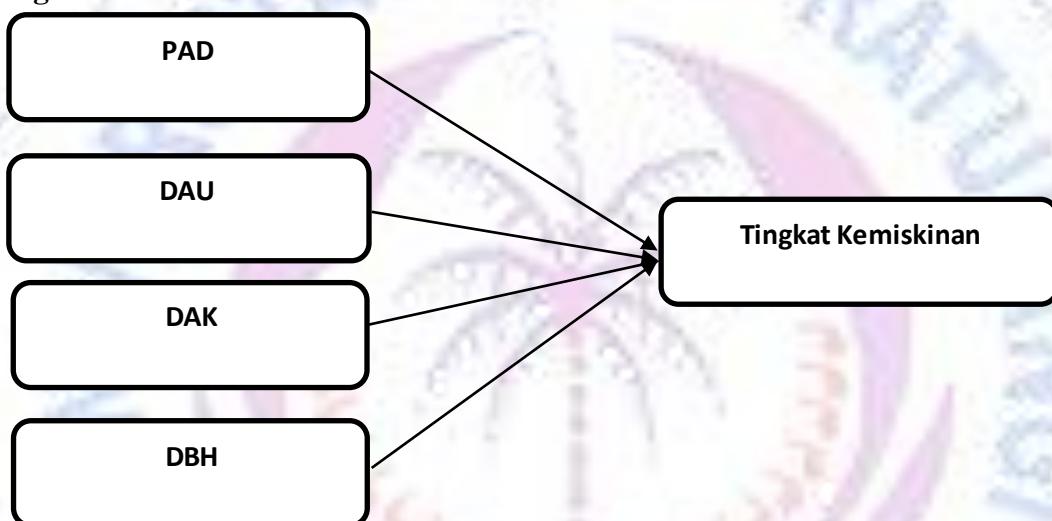
Penelitian Yang Dilakukan Oleh Fhilne Lisa Wowiling, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka (2021) Yang Berjudul Analisis Inovasi Peningkatan Pelayanan Samsat Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Terhadap Penerimaan Bbn 1 Dan Pkb Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) dengan menggunakan analisis regresi real dan regresi dummy. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Inovasi memberikan peningkatan realisasi penerimaan yang cukup signifikan. (2) Pad mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Daerah Sulawesi Utara. Selalu memberikan inovasi pelayanan yang diinginkan masyarakat wajib pajak, sehingga tercipta kerja sama yang baik antara pemungut dan wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Joike Ishak Ondang , Vecky A.J. Masinambow , Daisy S.M. Engka (2021) Yang Berjudul Pengaruh Pendapatan Transfer Desa Dan Belanja Modal Terhadap Pdrb Serta Dampaknya Pada Angka Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. Dengan Menggunakan Analisis Regresi Berganda A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pdrb sedangkan belanja modal berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pdrb di kabupaten minahasa. secara keseluruhan atau simultan, pendapatan transfer desa dan belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai pdrb. hasil penelitian menunjukkan

bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dan pdrb berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di kabupaten minahasa. secara keseluruhan, ketiga variabel pendapatan transfer desa, belanja modal, dan pdrb mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rojers Gromiks Tangkulung, Vekie A. Rumate, Debby Ch. Rotinsulu (2020) yang berjudul Peran Budaya Mapalus Menunjang Program Rs Rtih Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. Analisis yang digunakan analisis kuantitatif. hasil penelitian menunjukkan secara kualitas budaya mapalus berperan dalam menunjang keberhasilan program Rs - Rtih Di Kabupaten Minahasa, kemudian secara kuantitatif dapat dibuktikan bahwa keberhasilan program Rs – Rtih mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Kajian Teori, 2022

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis

- H1 : diduga pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
- H2 : diduga dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
- H3 : diduga dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
- H4 : diduga dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode sumber data adalah data sekunder: Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi yang menyangkut penelitian penulis yang di terbitkan oleh Instansi/lembaga/organisasi profesi dan lain-lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pusat Statistik Kota Manado.

Metode Analisis

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji hipotesis f dan t, koefisien korelasi dan koefisien determinasi.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *Multiple Linear Regression*. Teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis tabel dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik. Pengelolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 8.0*.

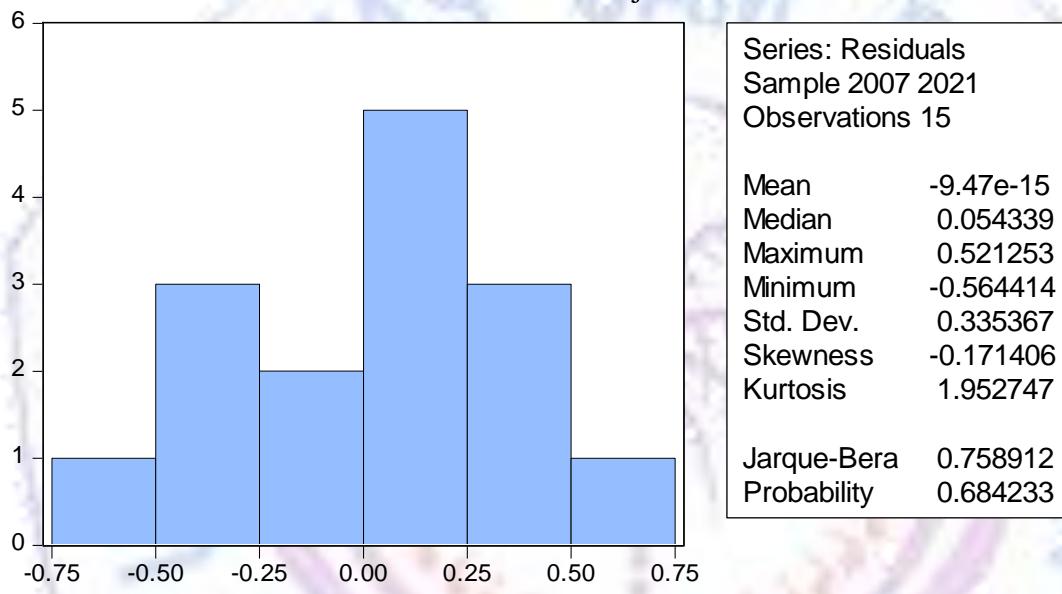
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Grafik 2. Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Dari perhitungan Jarque-Bera di atas, nilai probabilitas yang di dapat lebih besar dari α 5% atau nilai probabilitas $0.68423 > 5\%$ artinya data dapat dikatakan berdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	1.670725	Prob. F(4,10)	0.2324
Obs*R-squared	6.008758	Prob. Chi-Square(4)	0.1985
Scaled explained SS	3.152036	Prob. Chi-Square(4)	0.5327

Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Dari perhitungan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0.1985 lebih besar dari α 0.005. Ho ditolak dan Ha diterima, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.758492	Prob. F(2,8)	0.4993
Obs*R-squared	2.390963	Prob. Chi-Square(2)	0.3026

Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Dari perhitungan uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM test dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0.3026 lebih besar dari α 0.005 artinya tidak ada masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: Kemiskinan (Y)				
Method: Least Squares				
Sample: 2007 2021				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD x_1	-4.933309	2.459093	-2.006150	0.0726
DAU x_2	7.270276	5.999764	1.211760	0.2535
DAK x_3	1.697642	0.631164	2.689698	0.0227
DBH x_4	0.978589	1.118636	0.874806	0.4022
C	-53.33011	51.92086	-1.027142	0.3286
R-squared	0.536691	Mean dependent var		5.631333
Adjusted R-squared	0.351367	S.D. dependent var		0.492702
S.E. of regression	0.396811	Akaike info criterion		1.250489
Sum squared resid	1.574590	Schwarz criterion		1.486505
Log likelihood	-4.378666	Hannan-Quinn criter.		1.247975
F-statistic	2.895964	Durbin-Watson stat		2.318253
Prob(F-statistic)	0.078634			

Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂) Dana Alokasi Khusus (X₃) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X₄) terhadap Kemiskinan (Y) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*).

$$\text{LogY} = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 + E_1$$

$$\text{LogY} = 53.33011 - 4.933309x_1 + 7.270276x_2 + 1.697642x_3 + 0.978589x_4 + 0,46$$

Uji Parsial (Uji T)

Hasil persamaan regresi Pendapatan Asli Daerah (X₁) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah (X₁) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0726. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α 10%, maka Ha diterima Ho ditolak. Variabel pendapatan asli daerah (X₁) mempunyai nilai t hitung yakni 2.006150 dan t tabel 1.37218 dengan df 10 (n-k = 15-5= 10). Jadi, t hitung 2.006150 >t tabel 1.37218 Artinya ada hubungan linier antara pendapatan asli daerah dengan kemiskinan (Y). Jadi, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil persamaan regresi Dana Alokasi Umum (X₂) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel dana alokasi umum (X₂) tedapat nilai probabilitas sebesar 0.2535. Nilai probabilitas ini lebih besar dari α 10%, maka Ha ditolak Ho di terima. Variable dana alokasi umum (X₂) mempunyai nilai t hitung yakni 1.211760 dan t tabel 1.37218 dengan df 10 (n-k = 15-5= 10). Jadi, t hitung 1.030599< t tabel 1.37218. Artinya tidak ada hubungan linier antara dana alokasi umum (X₂) dengan kemiskinan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil persamaan regresi Dana Alokasi Khusus (X₃) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel dana alokasi khusus (X₃) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0227. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α 5%, maka Ha diterima Ho ditolak. Variabel dana alokasi khusus (X₃) mempunyai nilai t hitung yakni 2.689698 dan t tabel 1.81246 dengan df 10 (n-k = 15-5= 10). Jadi, t hitung 2.689698 >t tabel 1.81246 Artinya ada hubungan linier antara dana alokasi khusus dengan kemiskinan (Y). Jadi, dapat disimpulkan dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan

terhadap kemiskinan.

Hasil persamaan regresi Dana Bagi Hasil (X_4) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel dana bagi hasil pajak & bukan pajak (X_4) tedapat nilai probabilitas sebesar 0.4022. Nilai probabilitas ini lebih besar dari $\alpha 10\%$, maka H_0 ditolak H_1 di terima. Variable dana bagi hasil (X_4) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.874806 dan t_{tabel} 1.81246 dengan $df 10$ ($n-k = 15-5= 10$). Jadi, $t_{hitung} 0.874806 < t_{tabel} 1.81246$. Artinya tidak ada hubungan linier antara dana bagi hasil (X_4) dengan kemiskinan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil (X_4) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil estimasi table 3 dapat dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X_4) terhadap Kemiskinan (Y). Nilai F-statistik yang diperoleh 2.895964 sedangkan F-tabel 2.60. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha 10\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1/5-1= 4$ dan df untuk denominator ($n-k/15-4= 10$). Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X_4) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh Kemiskinan (Y).

Uji Determinasi R^2

Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.536. artinya, variasi perubahan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X_4) mempengaruhi kemiskinan (Y) sebesar 53.6%, sedangkan sisanya (46.4%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan kemiskinan. Artinya apabila pendapatan asli daerah bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah. Rustiadi et. all (2010), dalam pendapatan asli daerah atau PAD yang meningkat belum menggambarkan pula kenaikan pendapatan masyarakat daerah itu sendiri. Akan tetapi, dengan meningkat nya PAD mampu menjadi kesempatan pemerintah daerah dalam menjadikan faktor sumber daya dalam peningkatan pendapatan masyarakat sehingga nantinya dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana alokasi umum dengan kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari – hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk meningkatkan kemampuan suatu dearah dalam membiayai pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kamampuan kauangan antar daerah yang dimkasudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan anatar dearah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jadi Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu dearah, adanya kontrol pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelola keuangan derah sehingga potensi dearah akan terus berkembang. Keterkaitan Dana Alokasi Umum atau DAU dan Kemiskinan sebenarnya sama dengan keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan. Dimana DAU memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan sehingga DAU dapat membuat kapasitas keuangan masing-masing daerah yang sama melalui

implementasi kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan dan potensi daerah dan nantinya hal ini akan memicu pembangunan daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara dana alokasi khusus dengan kemiskinan. Artinya apabila dana alokasi khusus bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Menurut Halim (2014: 16) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat. Prioritas dasar pengalokasian Dana Alokasi Khusus, diberikan untuk Membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dana prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah. Sama halnya dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus juga memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Dimana DAK memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan sehingga DAK dapat membuat kapasitas keuangan masing-masing daerah yang sama melalui implementasi kebijakan dan potensi daerah dan nantinya hal ini akan memicu pembangunan daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan pengaruh antara dana bagi hasil dengan kemiskinan. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini berarti apabila dana bagi hasil meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila dana bagi hasil menurun maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan kemiskinan. Artinya apabila pendapatan asli daerah bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan pengaruh antara dana alokasi umum dengan kemiskinan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara dana alokasi khusus dengan kemiskinan. Artinya apabila dana alokasi khusus bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan pengaruh antara dana bagi hasil dengan kemiskinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah daerah berdasarkan hasil dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Maka dari itu kedepannya pemerintah harus berupaya untuk bisa membuat kebijakan maupun program yang dapat menyentuh langsung kemasyarakatan dengan dana alokasi umum yang ada. Begitu juga dengan dana bagi hasil yang belum mampu mempengaruhi penurunan kemiskinan agar supaya harus lebih memperhatikan setiap penganggaran yang ada untuk berfokus kepada menurunan angka kemiskinan. Juga sebagai bahan referensi dalam menerima informasi untuk pembuatan kebijakan.
2. Untuk peneliti atau akademisi sebagai bahan informasi agar bisa mengembangkan penelitian dengan variabel-variabel yang lebih tepat untuk mengukur pengaruh terhadap kemiskinan.
3. Untuk masyarakat sebagai bahan referensi dan informasi terkait kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sri Wahyuni (2020)** Yang Berjudul Effect Of Original Revenue Income And Funds General Allocation Of Growth Economy Of Surakarta City.
- Ariyani Widyastuti dan Agung Nusantara (2022)** yang berjudul Does Fiscal Decentralization Affect Poverty? An Empirical Study. The Poverty percentage in Central Java ranked two throughout Java Island after DI Yogyakarta Province.
- Anti Nur Izzati dan Lucia Rita Indrawati (2021)** yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang
- Alderon Edi Aidore , Vekie A. Rumate, Tri Oldy Rotinsulu (2020)** Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Produksi Sektor Perikanan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Absolut Di Kota Bitung.
- Deiby Natalia Rewah , Anderson G. Kumenaung , Debby Ch. Rotinsulu (2021)**. Analisis Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.
- Dewi I,S Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka (2019)** Yang Berjudul Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung.
- Fhilne Lisa Wowiling, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka (2021)** Analisis Inovasi Peningkatan Pelayanan Samsat Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Terhadap Penerimaan Bbn 1 Dan Pkb Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)
- F Setiawan1 and A F Aritenang (2019)** yang berjudul The impact of fiscal decentralization on economic performance in Indonesia
- Joike Ishak Ondang , Vecky A.J. Masinambow , Daisy S.M. Engka (2021)**. Pengaruh Pendapatan Transfer Desa Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Serta Dampaknya Pada Angka Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa.
- Konny Joula Ellen Rasu, Anderson G. Kumenaung Dan Rosalina A.M. Koleangan (2019)** Yang Berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado
- Mohammad Azis (2016)** yang berjudul Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Malinau.
- Muhammad Abrara , Bambang Juandab , Muhammad Firdausc , Dedi Budiman Hakim (2020)** yang berjudul The Impact of Special Autonomy Funds on Poverty of Human Development and Unemployment in Aceh

Rojers Gromiks Tangkulung, Vekie A. Rumate, Debby Ch. Rotinsulu (2020). Peran Budaya Mapalus Menunjang Program Rs Rtlh Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa

Ratnajati Asnawi, Paulus Kindangen , Daisy S.M. Engka (2020), Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan Dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Suryani Yuli Astuti, Muhammad Ali Basyah dan Farokhah Muzayinatun Niswah (2021)
Yang berjudul The Effect Of PAD, DAU And DAK On Poverty Rates In Java.



PENGARUH INFLASI, PENGANGGURAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA KOTAMOBAGU

Ervan A. Latief¹, Anderson G. Kumenaung², Mauna Th. B. Maramis³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ervan.latief@gmail.com, andersonkumenaung@unsrat.ac.id,
maunabeatrix@unsrat.ac.id,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data inflasi, pengangguran, dan PDRB Kota Kotamobagu periode 2010 – 2021 yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu serta data Belanja Modal periode 2010-2021 pada APBD Kota Kotamobagu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang terdiri dari Inflasi (X_1), Pengangguran (X_2), dan Belanja Modal (X_3) terhadap variabel terikat yaitu PDRB (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Secara bersama-sama inflasi, pengangguran, dan belanja modal secara signifikan tidak berpengaruh terhadap PDRB di Kota Kotamobagu.

Kata Kunci : Inflasi, Pengangguran, Belanja Modal, PDRB

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Inflation, Unemployment, and Capital Expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Kotamobagu City. This study uses secondary data in the form of inflation, stimulus, and GRDP data for Kotamobagu City for the 2010-2021 period taken from the Central Bureau of Statistics for Kotamobagu City as well as Capital Expenditure data for the 2010-2021 period in the Kotamobagu City APBD. The variables used in this study are the independent variables consisting of Inflation (X_1), Unemployment (X_2), and Capital Expenditures (X_3) to the dependent variable, namely GRDP (Y). The results showed that inflation had a positive but not significant effect on GRDP. Unemployment has a negative but not significant effect on GRDP. Capital Expenditure has a positive but not significant effect on GRDP. Taken together, inflation, vibration, and spending capital have no significant effect on GRDP in Kotamobagu City.

Keywords : Inflation, Unemployment, Capital Expenditures, GRDP

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan adanya peningkatan penghasilan atau pendapatan berdasarkan kegiatan kemasyarakatan. Peningkatan pendapatan dari masyarakat terjadi karena adanya aktivitas menciptakan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat lain yang menjadikan masyarakat saling berhubungan dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi antara masyarakat terjadi karena ada transaksi jual beli yang dilakukan dimana pun mereka berada. Dalam jangka panjang transaksi jual beli akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada umumnya. Pertumbuhan ekonomi juga sangat erat dengan inflasi atau peningkatan harga barang dan jasa yang terjadi di masyarakat, peningkatan harga barang dan jasa ini juga menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada suatu Negara pada umumnya dan pada suatu daerah pada khususnya.

Tabel 1
Inflasi, Pengangguran, Belanja Modal dan PDRB Kota Kotamobagu
Tahun 2010-2021

Tahun	Inflasi (%)	Pengangguran (Jiwa)	Belanja Modal (Rp)	PDRB (%)
2010	6.15	3,622	149,644,787,748	6.84
2011	5.57	5,211	116,579,899,064	6.49
2012	5.94	4,808	87,533,462,069	6.96
2013	6.89	2,706	116,259,282,955	7.06
2014	7.33	2,706	135,515,252,358	6.70
2015	5.43	2,706	140,782,667,079	6.52
2016	5.95	2,879	229,586,038,018	6.63
2017	2.46	3,052	197,781,059,966	6.79
2018	3.82	3,508	172,179,905,946	6.66
2019	3.42	3,544	106,641,521,623	6.13
2020	3.67	4,915	103,502,462,900	2.00
2021	2.51	4,785	86,420,153,185	4.20

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu (2022) dan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu (2022)*

Menurut Sukirno (2008) inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga baran dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Inflasi juga disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (Inflasi) atau tingkat turunnya (deflasi) dari barang dan jasa. Inflasi sangat berpengaruh pada kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat lainnya. Banyak hal yang membentuk inflasi pada suatu daerah mulai dari sandang maupun pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu daerah tersebut, salah satu paling banyak mengambil andil dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah kenaikan harga makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan dasar dari setiap manusia sehingga penting memperhatikan inflasi yang terjadi pada suatu daerah.

Kota Kotamobagu merupakan salah satu Kota pada Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu merupakan satu-satunya Kota yang terletak pada wilayah Bolaang Mongondow Raya. Tingkat inflasi yang terjadi di Kota Kotamobagu sangat berfluktuasi setiap tahunnya. Terlihat dari data Inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu Inflasi yang ada di Kotamobagu sangat berfluktuasi mulai dari yang terendah 2.51% terjadi pada tahun 2021 dan yang tertinggi 7.33% terjadi pada tahun 2014. Perkembangan harga berbagai komoditas setiap tahunnya secara umum sangat berpengaruh pada tingkat Inflasi, besar kecilnya tingkat Inflasi tidak hanya diukur dari satu atau dua komponen kenaikan harga tetapi semua hal yang menjadi pembentuk dari inflasi tersebut. Peningkatan inflasi ini sangat berpengaruh pada masyarakat untuk memproduksi baran dan jasa ataupun menggunakan barang dan jasa tersebut yang nantinya akan sangat berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu.

Menurut Yanuar (2009:183) pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Berdasarkan penjelasan BPS Kota Kotamobagu angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih, jadi pengangguran dapat diartikan penduduk berumur 15 tahun dan lebih yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Di Kota Kotamobagu pengangguran tidak dapat dihindari karena banyak faktor salah satunya adalah tingkat perekonomian masyarakat Kota Kotamobagu, perekonomian masyarakat memang mengambil peran yang sangat penting terhadap pengangguran.

Berdasarkan tabel Pengangguran Kota Kotamobagu diatas terlihat jumlah pengangguran yang ada di Kota Kotamobagu angkanya tidak jauh berbeda untuk setiap tahunnya, jumlah pengangguran yang paling banyak pada tahun 2011. Kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa dapat mempengaruhi terhadap jumlah pengangguran yang ada di Kotamobagu, jika masyarakat dapat meningkatkan jumlah produk barang dan jasa maka akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak untuk menyerap pengangguran untuk dapat bekerja.

Belanja Modal menurut (Mursyidi, 2009), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal akan sangat berdampak pada penunjang perekonomian dalam suatu daerah karena belanja modal dikhkususkan untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, misalnya belanja modal yang direalisasi oleh suatu daerah adalah pembangunan pusat perbelanjaan atau pusat keramaian, hal ini akan sangat mempengaruhi perekonomian dalam suatu daerah. Di Kota Kotamobagu setiap tahunnya melakukan belanja modal untuk keperluan masyarakat.

Data belanja modal di atas adalah proyeksi dari realisasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu. Belanja modal yang paling kecil terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah belanja modal Rp 86,420,153,185 dan belanja modal yang paling besar terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah belanja modal Rp 229,586,038,018, -. Belanja modal pada tahun 2021 menjadi yang paling terkecil dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut. Belanja modal tersebut pada dasarnya digunakan untuk membangun infrastruktur yang akan menunjang perekonomian di Kota Kotamobagu, dengan adanya dukungan dari pemerintah dengan cara belanja modal untuk menunjang perekonomian maka masyarakat dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang nantinya secara langsung dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Kotamobagu.

Menurut Sjafrizal (2014:25) Secara definitif, PDRB tersebut pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah pada periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, PDRB merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB itu menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB ini seperti pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu, berdasarkan tabel di atas peningkatan pertumbuhan yang paling besar terjadi pada tahun 2013 yakni sebanyak 7.06% dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebanyak 2.00%. Kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun awal pandemi covid-19 yang melanda seluruh Indonesia pada umumnya dan Kotamobagu khususnya. Dengan berbagai kebijakan yang terjadi pada tahun 2020 maka nilai PDRB di Kotamobagu memang memiliki angka atau nilai yang sangat kecil. Sehingga kegiatan masyarakat sangat terbatas pada waktu itu yang mengakibatkan proses produksi barang dan jasa di masyarakat sangat terbatas yang berhubungan langsung dengan kegiatan konsumsi barang dan jasa tersebut. Hal itu juga mempengaruhi pergerakan kenaikan barang dan jasa yang ada di kotamobagu.

Produksi barang dan jasa dalam suatu daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti penjelasan di atas produksi barang dan jasa juga dipengaruhi oleh tingkat Inflasi, jumlah pengangguran dan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian Kota Kotamobagu terutama pada kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa pada periode tertentu.

Berdasarkan uraian diatas sedikit banyak tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, jumlah pengangguran dan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah memiliki hubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di Kotamobagu, maka penulis mengangkat judul penelitian “Pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu?
- b. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu?
- c. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu?
- d. Apakah Inflasi, Pengangguran dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak baik untuk kegiatan pembangunan maupun pengembangan ilmu:

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah berkaitan pengaruh inflasi, pengangguran dan belanja modal terhadap PDRB di Kotamobagu sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk peningkatan perekonomian di Kotamobagu.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini juga dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu.

- c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu.

Landasan Teori

Teori Inflasi

Menurut Sukirno (2008) inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Dari beberapa pengertian inflasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu tertentu. Tingkat inflasi yaitu persentase kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat, berkembang. Inflasi yang rendah tingkatnya, dimana inflasi ini dinamakan inflasi merayap yaitu inflasi yang kurang dari sepuluh persen setahun. Selain itu ada juga yang lebih serius atau berat, yaitu inflasi yang tingkatnya mencapai diatas seratus persen setahun. Pada waktu peperangan atau ketidak stabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dimana kenaikan tersebut dinamakan hiperinflasi (Sukirno, 2012). Inflasi diukur dengan tingkat (rate inflation) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rate Of Inflation} = \frac{\text{Tingkat Harga } t-1}{\text{Tingkat Harga } t} \times 100\%$$

Toeri Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Teori Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 49 ayat (5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Menurut Nordiawan (2007) semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. PP 12 Tahun 2019 pasal 55 menunjukkan bahwa pengklasifikasian belanja daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek
- b. Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. Belanja Tidak Terduga, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja Transfer, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Menurut (Mursyidi, 2009), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 10 manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut (Halim, 2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Teori Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Sjafrizal (2014:25) Secara definitif, PDRB tersebut pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah pada periode tertentu. Misalnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, perdagangan, transportasi dan lain-lain. Dewasa ini, data PDRB ini sudah tersedia hampir seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang dipublikasikan oleh BPS setiap setiap

tahunnya. Analisis dan perencanaan pembangunan yang menyangkut dengan perekonomian daerah, seperti struktur perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran daerah, umumnya menggunakan PDRB ini sebagai data dan informasi dasar.

Sedangkan BPS Kota Kotamobagu (2022:2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Wahyu Haryadi (2014) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2000 - 2014 menunjukkan hasil pengujian analisis Kuantitatif terhadap hipotesis penelitian ini adalah secara Parsial Jumlah uang beredar mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi Variabel nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi ,dan secara simultan variable jumlah uang beredar dan nilai tukar rupiah berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat Inflasi.

Penelitian Novita Linda Sitompul (2007) berjudul Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara. Penelitian ini didasarkan pada besarnya pengaruh investasi, baik PMDN maupun PMA terhadap PDRB, dimana investasi tersebut juga akan menyerap sejumlah tenaga kerja sehingga menjadi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, 1984 – 2005, yaitu data jumlah tenaga kerja, jumlah investasi PMDN, jumlah investasi PMA di Sumatera Utara dan PDRB Sumatera Utara. Data tersebut diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perindustrian, BPS, dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sumatera Utara dipengaruhi tiga sektor yang utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Utara. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja, dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 98,39 persen. Hal ini berarti bahwa PDRB Sumatera Utara akan semakin meningkat dengan meningkatnya investasi dan jumlah tenaga kerja. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya, investasi PMA tahun sebelumnya dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara, sedangkan kondisi perekonomian tidak berpengaruh signifikan.

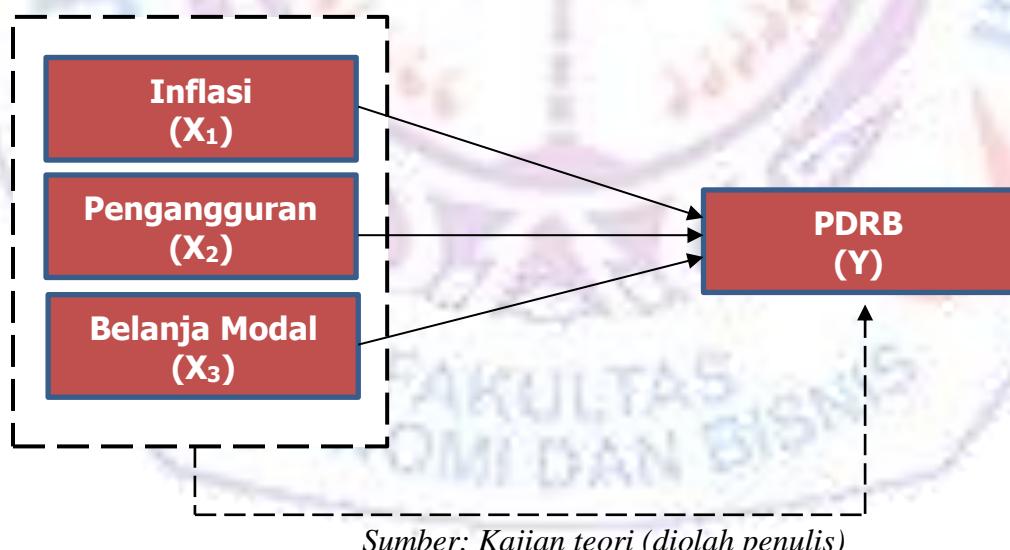
Penelitian Roby Cahyadi Kurniawan (2012) berjudul Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980 – 2011. Penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian menunjukkan pengaruh PDRB terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,01$. Hal ini menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian pengaruh UMK terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,09 < 0,10$. Hal tersebut menyatakan bahwa UMK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian pengaruh Inflasi terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,078 < 0,10$. Hal menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Dengan demikian Hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian pengaruh Investasi terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,01$. Hal ini berarti bahwa investasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Hasil pengujian pengaruh Tingkat Bunga terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Tingkat Bunga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Hasil pengujian pengaruh Jumlah Industri

terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,0004 < 0,01$. Hal ini berarti bahwa Jumlah Industri memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti Pengangguran Terbuka dapat dipengaruhi oleh PDRB, Upah, Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga, dan Jumlah Industri secara bersama-sama.

Penelitian Kalsum (2007) dengan judul Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Makro ekonomi adalah studi tentang kegiatan ekonomi di suatu negara. Indikator ekonomi makro adalah inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh antara pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda yang datanya diambil dari tahun 2011- 2015 per semester. Akhirnya penelitian ini hanya menunjukkan variabel pengangguran yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Novita Pratiwi (2022) dengan judul Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2017 sampai 2021. Penelitian ini menggunakan model data panel sebagai penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2017 sampai 2021, tingkat Pengangguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan tingkat inflasi juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan, variabel Pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021. Koefisien determinasi menunjukkan angka 0.995547 yang berarti bahwa variasi dari variable dependent dapat dijelaskan oleh variasi variable-independent sebesar 995547 persen.

Kerangka Berpikir



Keterangan:

- Pengaruh secara parsial Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Pengaruh secara simultan Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hipotesa Penelitian

Ho1 : Diduga tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ha1 : Diduga terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ho2 : Diduga tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari Pengangguran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ha2 : Diduga terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari Pengangguran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ho3 : Diduga tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ha3 : Diduga terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ho4 : Diduga tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ha4 : Diduga terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. METODE PENELITIAN

Data Dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif tingkat Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal di Kotamobagu selama 12 tahun yakni dari tahun 2010-2021 dan juga data kuantitatif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kotamobagu selama 12 tahun yakni dari tahun 2010-2021. Sumber data untuk tingkat Inflasi, Pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu. Dan untuk data Belanja Modal bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu.

Metode Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini mengambil data Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan data sekunder. Menurut Sugiono (2014:138) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan oleh pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumen dengan data sekunder. Maksud data sekunder adalah data yang ditulis berdasarkan laporan dalam hal ini laporan yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu.

Definisi Operasional & Pengukuran Variabel

- a. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang atau jasa yang terjadi di Kotamobagu sebagai variabel Independen. Inflasi diukur dalam %/tahun.
- b. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran diukur dalam jiwa/tahun.
- c. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal diukur dalam jumlah/tahun.
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik dalam hal ini Kotamobagu sebagai variabel Dependen. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur dengan %/tahun.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi untuk mendapatkan model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka harus memenuhi beberapa asumsi, beberapa asumsi yang harus di penuhi, yaitu data harus berada dalam distribusi normal, tidak terjadinya multikolinieritas,

autokorelasi, dan heteroskedastisitas, Widyanto (2013:153). Untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi-asumsi melalui beberapa kategori asumsi pengujian, yaitu:

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinearitas
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Heterokedastisitas
- a) Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (Independent) terhadap satu variabel tak bebas (Independent), Sofian (2013:301). Adapun rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots + b_nX_n$$

Dalam Penelitian uji statistik regresi linier berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien regresi nya. Adapun variabel penelitian ini variabel bebas/dependen yakni Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal dan variabel terikatnya/independen adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui rumus analisis regresi linier berganda diatas maka variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	X_3 = Belanja Modal
X_1 = Inflasi	a = Konstanta
X_2 = Pengangguran	b = Koefisien Regresi

Uji Hipotesis

Menurut Husaini & Akbar (2003) Untuk alat uji hipotesis penulis menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh lebih dari satu variabel prediktor terhadap satu variabel kriteria atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas (X) atau lebih dengan variabel terikat (Y). Untuk mengetahui jawaban dari pada hipotesis yang telah dibuat, maka diperlukan uji hipotesis. Dalam Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam Penelitian ini asosiatif. Dalam pengujian hipotesis ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
3. Koefisien Determinasi (R^2)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

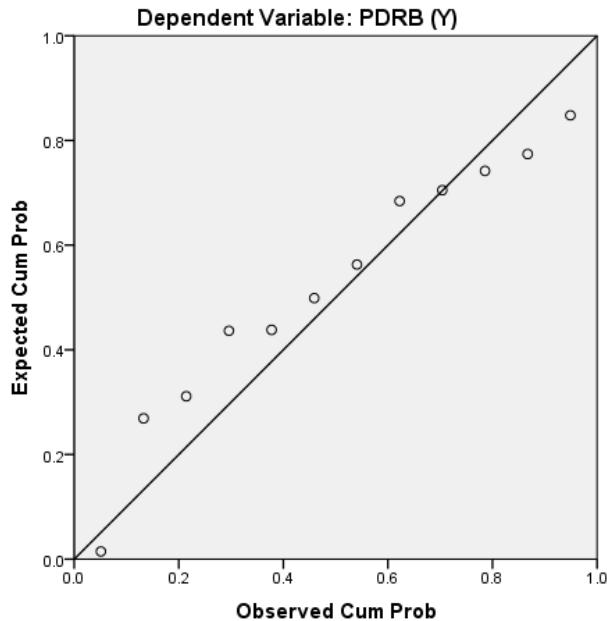
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Gambar 1
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Dalam uji normalitas, adapun ketentuan dikatakan bahwa data dapat dikatakan normal apabila sebaran titik-titik pada hasil uji normalitas melalui aplikasi SPS berada di garis diagonal. Dari hasil uji normalitas pada gambar 1 terlihat bahwa sebaran titik-titik pada hasil uji asumsi tersebut mengikuti garis diagonal, artinya data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam memprediksi pengaruh PDRB terhadap variabel bebasnya.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standar dized Coefficients	tig.	Collinear y Statistics
	B	. Error	Beta		T olerance
(Constant)	5.06 3	3.9 11		.294 232	
Inflasi (X1)	.348	.25 7	.392	.353 213	.8 54
Penganggur an (X2)	- .000443	.00 1	-.288	.799 448	.5 50
Belanja Modal (X3)	6.91 2E-12	.00 0	.206	602 564	.6 14

a. Dependent Variable: PDRB (Y)

Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Dari hasil aplikasi SPSS pada tabel 6 diatas, dapat lihat bahwa nilai VIF variabel bebas inflasi (X1) bernilai 1,171, variabel bebas pengangguran (X2) bernilai 1,818 dan variabel bebas Belanja Modal (X3) bernilai 1,628. Dengan demikian dapat terlihat bahwa setiap variabel bebas tidak ada yang memiliki nilai $VIF \geq 10$ yang artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam

model regresi. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa nilai Tolerance variabel bebas inflasi (X1) bernilai 0,854, variabel bebas pengangguran (X2) bernilai 0,550 dan variabel bebas Belanja Modal (X3) bernilai 0,614 Dengan demikian dapat terlihat bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya gejala autokorelasi, maka peneliti menggunakan uji Durbin Watson. Adapun ketentuan

$$du < dw < 4 - du$$

Dimana: dw = Nilai Durbin Watson hitung, du = Nilai batas atas/upper Durbin Watson tabel

Tabel 7
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.654	.428	.213	1.32090	1.892

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X3), Inflasi (X1), Pengangguran (X2)
b. Dependent Variable: PDRB (Y)

Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Hasil uji autokorelasi pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,892. Setelah mengetahui nilai Durbin Watson selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada tingkat signifikansi 5%. Rumus nya, yaitu $(K - N) / N$ merupakan jumlah variabel independen dan (n) adalah jumlah data. Dalam penelitian ini jumlah variabel independen adalah 3 variabel dan jumlah datanya adalah 12. Selanjutnya angka tersebut dilihat pada distribusi tabel Durbin Watson untuk menentukan du dan dl, sebagai berikut:

Dari tabel durbin watson terlihat bahwa dl dan du pada $(K=3 ; N=12)$ adalah $dl = 0,675$ dan $du = 1,864$. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (dw) sebesar 1,892 lebih besar dari du yaitu $1,892 > du = 1,864$. Selanjutnya

$$dw < 4 - du$$

$$1,892 < 4 - 1,864$$

$$1,892 < 2,136$$

Dengan kata lain persamaannya sebagai berikut:

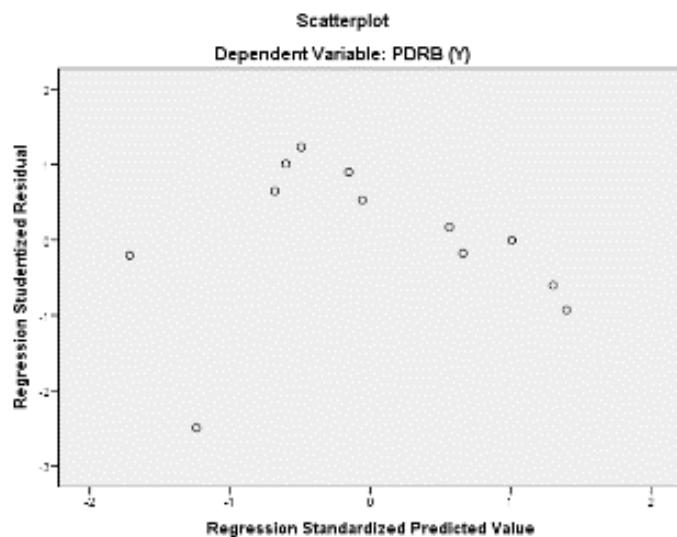
$$du < dw < 4 - du$$

$$1,864 < 1,892 < 2,136$$

Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data tersebut dan penelitian ini dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini.

4) Uji Heterokedastisitas

Gambar 2
Uji Heterokedastisitas



Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik yang terjadi sesuai grafik diatas adalah titik-titik tersebar dan tidak memiliki pola yang jelas dan berada acak diatas dan dibawah pada angka 0 dan sumbu Y. Sebagaimana pada pengambilan keputusan atau ketentuan yang ada maka model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan baik karena tidak ada gejala heteroskedastisitas dan tentu nya model regresi layak untuk memprediksi PDRB dengan variabel bebasnya.

B. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t sig.	Collinearity Statistics	
	B	Unstandardized Coefficients	Std. Error		T	IF
(Constant)	5.063	3.911		.294	232	
Inflasi (X1)	.348	.257		.353	213	.545
Pengangguran (X2)	-0.000443	.001		-.288		.505
Belanja Modal (X3)	6.912E-12	.000		.206	602	.564

a. Dependent Variable: PDRB (Y)

Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Melalui hasil output SPSS di atas pada tabel 8, maka dapat diketahui:

Konstanta $a = 5,063$

Koefisien Regresi (X_2) = -0,000443

Koefisien Regresi (X_1) = 0,348

Koefisien Regresi (X_3) = 6,912

Sehingga melalui hasil diatas dapat dibangun persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 5,063 + 0,348X_1 - 0,000443X_2 + 6,912X_3$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Dari persamaan diatas dapat terlihat bahwa nilai konstanta yaitu 5,063. Nilai tersebut bertandakan angka positif, artinya angka positif menunjukkan perubahan pertambahan, jika tidak ada nilai Inflasi, Pengangguran dan Belanja Modal maka nilai PDRB adalah sebesar 5,063.

- 2) Dari persamaan diatas dapat juga terlihat bahwa koefisien regresi yang ditunjukkan oleh variabel X1 dalam hal ini Inflasi yaitu sebesar 0,348. Angka tersebut bernilai positif yang artinya menunjukkan perubahan peningkatan. Apabila Inflasi mengalami pertambahan 1 satuan, maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,348 dalam artian semakin bertambah Inflasi maka semakin bertambah juga PDRB dan juga sebaliknya jika apabila Inflasi semakin berkurang, maka semakin berkurang juga PDRB Kota Kotamobagu.
- 3) Dari persamaan diatas dapat juga terlihat bahwa koefisien regresi yang ditunjukkan oleh variabel X2 dalam hal ini Pengangguran yaitu sebesar -0,000443. Berbeda dengan inflasi yang mendapatkan nilai positif, pada Pengangguran mendapatkan nilai negatif yang artinya menunjukkan perubahan penurunan. Dalam hal ini apabila Pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan PDRB mengalami penurunan sebesar 0,000443. Dari hasil perhitungan uji regresi linier berganda tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara Pengangguran terhadap PDRB di Kota Kotamobagu. Apabila Pengangguran semakin meningkat, maka akan berdampak menurunnya jumlah PDRB, namun sebaliknya apabila Pengangguran mengalami penurunan, maka akan berdampak meningkatnya PDRB Kota Kotamobagu.
- 4) Dari persamaan diatas dapat juga terlihat bahwa koefisien regresi yang ditunjukkan oleh variabel X3 dalam hal ini Belanja Modal yaitu sebesar 6,912. Hasil tersebut seperti pada X1 yakni Inflasi yang sama-sama menunjukkan angka positif yang artinya menunjukkan perubahan peningkatan. Apabila Belanja Modal mengalami pertambahan 1 satuan, maka akan meningkatkan PDRB sebesar 6,912 dalam artian semakin bertambah Belanja Modal maka semakin bertambah juga PDRB dan juga sebaliknya jika apabila Belanja Modal semakin berkurang, maka semakin berkurang juga PDRB Kota Kotamobagu.

C. Hasil Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal secara individual dalam menerangkan variabel dependen PDRB. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1, H_2, H_3 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1, H_2, H_3 diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error		
(Constant)	5.06	3.9			
Inflasi (X1)	.348	.25	.392	.353	213
Penganggur an (X2)	-0.000443	.00	-.288	.799	448
Belanja Modal (X3)	6.91	.00	.206	602	564
	2E-12	0			

Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 9 diperoleh nilai signifikan Inflasi adalah sebesar 0,213, nilai signifikan Pengangguran adalah sebesar 0,448 dan nilai signifikan Belanja Modal adalah sebesar 0,564. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan Inflasi lebih besar daripada 0,05 ($0,213 > 0,05$), nilai signifikan Pengangguran lebih besar

daripada 0,05 ($0,448 > 0,05$), dan nilai signifikan Belanja Modal juga lebih besar daripada 0,05 ($0,564 > 0,05$).

Selain dengan melihat nilai signifikan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, Peneliti juga melihat t-hitung dan t-tabel untuk lebih memperkuat hasil uji. Dikarenakan dalam hasil output tabel uji hipotesis hanya terdapat t-hitung, maka selanjutnya mencari t-tabel. Persamaan untuk mencari t-tabel sebagai berikut:

$$t\text{-tabel} = (\alpha / 2 ; n - k - 1)$$

Ket. $\alpha = 0,05$

$n = \text{jumlah data (12 tahun)}$

$k = \text{jumlah variabel independen (3)}$

Jadi, berdasarkan rumus tersebut maka, t-tabel pada uji-t ini adalah:

$$t\text{-tabel} = (0,05 / 2 ; 12 - 3 - 1)$$

$$t\text{-tabel} = (0,025 ; 8)$$

Setelah dihitung, maka hasil dari perhitungan tersebut yaitu $0,025 ; 8$, hasil dari t-tabel dapat dilihat pada tabel distribusi nilai t-tabel yang telah Peneliti lampirkan di halaman belakang. Setelah dilihat dari tabel distribusi, maka hasil dari perhitungan diatas t-tabel nya adalah 2,306. Sehingga berdasarkan hasil output aplikasi SPSS pada tabel 4.5 dengan melihat nilai signifikansi dari X_1 , X_2 , dan X_3 serta t-hitung beserta t-tabel nya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel Inflasi (X_1) dengan nilai signifikan $0,213 > 0,05$ dan t-hitung $1,353 > 2,306$. Berdasarkan ketentuan dan dasar pengambilan keputusan pada uji-t maka H_0 1 diterima dan H_1 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa Investasi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y) Kota Kotamobagu.
- Variabel Pengangguran (X_2) dengan nilai signifikan $0,448 > 0,05$ dan t-hitung $-0,799 < 2,306$. Berdasarkan ketentuan dan dasar pengambilan keputusan pada uji-t maka H_0 1 diterima dan H_1 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa Pengangguran (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y) Kota Kotamobagu.
- Variabel Belanja Modal (X_3) dengan nilai signifikan $0,564 > 0,05$ dan t-hitung $0,602 < 2,306$. Berdasarkan ketentuan dan dasar pengambilan keputusan pada uji-t maka H_0 1 diterima dan H_1 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y) Kota Kotamobagu.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama variabel independen dalam hal ini Inflasi (X_1), Pengangguran (X_2), dan Belanja Modal (X_3) berpengaruh terhadap Variabel dependen dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto (Y). Uji F dalam Penelitian ini menggunakan probabilitas dengan tingkat signifikansi $0,05 (\alpha=5\%)$.

Berikut adalah kriteria penentuan uji F:

- Jika Probabilitas (F-Statistik) $< 0,05$ maka dikatakan signifikan. Artinya hipotesis diterima artinya variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat (Y).
- Jika Probabilitas (F-statistik) $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Artinya, semua variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

$$F\text{-tabel} = (K ; n - k)$$

Ket. $K = \text{jumlah variabel independen (3)}$ $n = \text{jumlah data (12 tahun)}$

Jadi, berdasarkan rumus tersebut maka, t-tabel pada uji-t ini adalah:

$$F\text{-tabel} = (3 ; 12 - 3)$$

$$F\text{-tabel} = (3 ; 9)$$

Kemudian angka (3 ; 9) dicari pada distribusi tabel nilai F yang telah Peneliti lampirkan yang mendapatkan angka F -tabel = 3,86 dengan tingkat signifikansi $0,05$.

Tabel 10
Hasil Uji-F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	f	Mean Square	Signif. (2-tailed)
Regression	10.427		3.476	.194
Residual	13.958		1.745	
Total	24.385	1		

a. Dependent Variable: PDRB (Y)

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X3), Inflasi (X1), Pengangguran (X2)

Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 10 diatas terlihat bahwa hasil uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan angka signifikan 0,194 dan nilai F-hitung sebesar 1,992, hasil tersebut angka signifikan $0,194 > 0,05$ dan nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel yakni $1,992 < 3,86$. Berdasarkan kriteria dan pedoman yang ada dalam pengambilan keputusan pada uji signifikan simultan (Uji F), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal secara simultan atau bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu.

3. Uji Koefisiensi Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan suatu uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) terhadap variabel dependen (Y) dalam bentuk persentase. Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal Kota Kotamobagu terhadap PDRB Kota Kotamobagu. Uji koefisien determinasi memiliki nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Apabila R^2 bernilai nol artinya tidak ada kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, namun sebaliknya semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 11
Hasil Uji R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.654	.428	.213	1.32090	1.892

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X3), Inflasi (X1), Pengangguran (X2)

b. Dependent Variable: PDRB (Y)

Sumber: SPSS Versi 24 Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji R^2 pada tabel diatas terlihat bahwa nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,428. Jika angka 0,428 dibuatkan menjadi persen, maka $0,428 \times 100 = 42,8\%$, artinya kontribusi variabel independen secara simultan dalam hal ini Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap PDRB Kota Kotamobagu adalah sebesar 42,8%. Sedangkan sisanya, yaitu 57,2% PDRB dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar variabel Inflasi, Pengangguran dan Belanja Modal.

Pembahasan

- 1) Secara parsial, inflasi berpengaruh positif terhadap PDRB namun tidak signifikan. Nilai koefisien regresi inflasi sebesar 0,348.
- 2) Secara parsial, pengangguran berpengaruh negatif terhadap PDRB namun tidak signifikan. Nilai koefisien regresi pengangguran sebesar -0,000443.
- 3) Secara parsial, belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB namun tidak signifikan. Nilai koefisien regresi belanja modal sebesar 6,912.

- 4) Secara simultan, dapat dilihat nilai F-hitung 1,992 < F-tabel 3,86 dan nilai signifikansi sebesar $0,194 > 0,05$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal secara simultan atau bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kotamobagu. Sedangkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil uji koefisiensi determinan (R^2) diperoleh dari kolom R Square sebesar 0,428 atau 42,8%, yang artinya kontribusi variabel independen secara simultan dalam hal ini Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap PDRB Kota Kotamobagu adalah sebesar 42,8%. Sedangkan sisanya, yaitu 57,2% PDRB dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar variabel Inflasi, Pengangguran dan Belanja Modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel Inflasi secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu. Walaupun hasil regresi linier berganda variabel Inflasi mendapatkan nilai positif yakni 0,348 yang artinya jika Inflasi bertambah maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkat pula.
2. Variabel Pengangguran secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu. Walaupun memang pada pengujian analisis linier berganda variabel Pengangguran mendapatkan nilai negatif sebesar -0,000443 yang artinya jika Pengangguran bertambah maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menurun.
3. Pada variabel Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu. Walaupun memang pada pengujian analisis linier berganda variabel Belanja Modal mendapatkan nilai positif sebesar 6,912 yang artinya jika Belanja Modal bertambah maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkat pula.
4. Variabel Inflasi, Pengangguran, dan Belanja Modal secara simultan tidak signifikan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu. Secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat hanya sebesar 42,8%. Sedangkan sisanya 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

1. Kepada Pemerintah daerah Kota Kotamobagu diharapkan untuk dapat mengontrol Inflasi yang terjadi di Kota Kotamobagu untuk mengimbangi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan diharapkan kepada Pemerintah juga untuk dapat membangun fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang perekonomian masyarakat yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak yang pada akhirnya dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Kotamobagu.
2. Bagi masyarakat umum atau akademisi dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data yang akan diteliti dan memperbanyak variabel agar hasilnya lebih akurat.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga mampu memberikan hasil penelitian menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono**, 1999. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Samuelson**. 2001. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Media Global.
- Husaini, U., & Akbar, P. S.** 2003. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gilarso**.2004.*Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*.Yogyakarta: Kanisius
- Moh. Nazir**. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Soesastro.** 2005. *Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tarigan, Robinson.** 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Nachrowi,D Nachrowi dan Hardius Usman.** 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nordiawan, Deddi.** 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda Nurul, Nasution, dkk.** 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono.** 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mursyidi.** 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho.** 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)*, Semarang.
- Rahardja, P., & Manurung, M.** 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yanuar.** 2009. *Ekonomi Makro Suatu analisis Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: yayasan MPU Ajar Artha.
- Nopirin.** 2010. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Sadono, Sukirno.** 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mankiw, Quah, & Wilson.** 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.**Sofian S.** 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Imam.** 2013. *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Widyanto, A.** 2013. *Statistika Terapan Konsep & Aplikasi SPSS/ LISREL dalam Penelitian Pendidikan, Psikologi, & Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
- Sjafrizal.** 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Cet Ke 1* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, P. D.** 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Latumaerissa, Julius R.** 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Armstrong, G., & Kotler, P.** 2017. *Principles of Marketing. 17th red.* New York
- Indonesia.** 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembar Negara 2018 Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia.** 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembar Negara 2019 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta
- Didik, dkk.** 2022. *Produk Domestik Bruto Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha*. Kotamobagu: BPS Kota Kotamobagu.
- Didik, dkk.** 2022. *Kotamobagu Dalam Angka 2021*. Kotamobagu: BPS Kota Kotamobagu.

PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD KOTAMOBAGU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA KOTAMOBAGU

Tofan Wahyudi Simbala¹, Daisy S. M. Engka², Agnes L. Ch. P. Lapien³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: tofansimbala88@gmail.com, daisyengka@unsrat.ac.id, agneslapian@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan rsud kotamobagu terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Penelitian ini bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPS Kota Kotamobagu dan RSUD Kotamobagu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Kotamobagu dan data PAD bulanan Kota Kotamobagu selang tahun 2018 – 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID 19 yang melanda dunia sampai ke daerah dibuktikan secara ekonometrika signifikan mempengaruhi pendapatan dari sektor kesehatan di Kota Kotamobagu. Pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan umum yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan retribusi pelayanan JKN non

Kata Kunci : Pelayanan, Pendapatan, Retribusi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of retribution income from the Kotamobagu Hospital on Regional Original Income (PAD) for Kotamobagu City. This research was sourced from the Regional Financial Management Agency, BPS Kotamobagu City and RSUD Kotamobagu. The data used in this study are monthly data from health service fees at Kotamobagu Hospital and monthly PAD data for Kotamobagu City between 2018 – 2021. The results of the study show that the COVID 19 pandemic that hit the world to the regions is proven to have a significant econometric effect on income from the health sector in Kotamobagu City. Revenue from public health service fees has the greatest influence compared to non-JKN service fees

Keywords: Service, Income, Retribution

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan otonomi daerah memenuhi aspek desentralisasi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Mardiasmo,2021).

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan terutama sumber pembiayaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 PAD terdiri atas : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting karena sumber dananya dari daerah sendiri.

Pada masa pandemi COVID 19 di awal tahun 2020 dengan adanya kebijakan Pembatasan Skala Besar-Besaran (PSBB) serta kebijakan belajar dan bekerja dari rumah menyebabkan berbagai aktivitas non ekonomi dan ekonomi masyarakat di luar rumah menjadi berkurang. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi sampai level daerah termasuk di Kota Kotamobagu. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terkontraksi dari 6,13% tahun 2019 menjadi 0,20%. Pemerintah daerah juga harus mengikuti kebijakan *refocusing* anggaran di masa pandemi menyebabkan perlunya penetapan prioritas belanja disatu sisi dan berupaya mengembangkan potensi pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) menopang pemulihian ekonomi daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapata Asli Daerah
Kota Kotamobagu Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	76.643.332.605,00	64.309.702.104,08
2020	66.707.049.870,00	72.961.543.948,35
2021	84.984.473.688,00	74.838.112.035,87

Sumber Data : BPKD Kota Kotamobagu

Data menunjukkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya tahun 2020 realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2019 hanya terealisasi 84,21% dan tahun 2021 hanya 88,09%. Sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah menjadi penopang utama penerimaan daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini. (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, (b) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, dan (d) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Salah satu retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan. Dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu pada tahun 2020 yang melampaui target yang diharapkan. Tahun 2019 hanya terealisasi 60,52 % dan tahun 2021 terealisasi sebesar 91,83%. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kotamobagu pada tahun 2019- 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
RSUD Kotamobagu Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	38.000.000.000,00	23.313.907.990,00
2020	31.277.554.014,00	38.064.652.728,00
2021	49.108.501.094,00	45.129.690.661,00

Sumber Data : BPKD Kota Kotamobagu

Realisasi pencapaian retribusi daerah yang menopang pencapaian PAD menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah, bahkan menunjukkan kemandirian fiskal daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan retribusi khususnya retribusi pelayanan kesehatan menjadi isu menarik di masa pandemi COVID 19 ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu objek retribusi jasa umum yang dikelola oleh pemerintah Kota Kotamobagu yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas studi empiris dalam penelitian ini adalah tentang “Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kotamobagu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan kesehatan umum di RSUD Kotamobagu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan kesehatan JKN Non Kapitasi di RSUD Kotamobagu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan kesehatan umum dan JKN non kapitasi di RSUD Kotamobagu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.
4. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bastian,2006). Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut Pemerintah Daerah dengan Otonomi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai Penangguang jawab urusan pemerintahan umum (Undang-Undang, No23, 2014).

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini tidak kalah pentingnya tujuan dari Otonomi Daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya NKRI dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara (Supardan, 2020).

Retribusi Daerah

Menurut Gusfahmi (2007), Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembeian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. (Resmi, 2014). Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- 2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan system dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- 3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu (Siahaan, 2005):

5) Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

6) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

7) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitusebagai berikut (Prakosa. 2005):

1) Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

2) Keadilan

Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat komsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit Principle* pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politi dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

- a. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyetor.
- b. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti : materai, kupon, dan formulir berharga.
- c. Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan kartu.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang ada di RSUD. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Petugas Kesehatan Lainnya yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakitnya dan akibat-akibatnya. Subjeknya adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

Pelayanan Kesehatan yang dikenakan biaya/tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD. Pelayanan rawat jalan ini dapat meliputi:

1. Rawat jalan tingkat I yang dilaksanakan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi.
2. Rawat jalan tingkat II yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis.

b. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat. Pelayanan ini diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh Dokter Umum yang selama berdinas sebagai dokter jaga RSUD wajib tinggal dengan tanggung jawab meliputi:

1. Pelayanan penderita baru di Instalasi Gawat darurat.
2. Pelayanan perawatan observasi selama 24 jam.
3. Pengawasan penderita rawat inap disemua kelas, diluar jam kerja.

c. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPS Kota Kotamobagu dan RSUD Kotamobagu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Kotamobagu dan data PAD bulanan Kota Kotamobagu selang tahun 2018 – 2021.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, mengambil informasi dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur dari berbagai buku terkait pengelolaan keuangan daerah.
2. Observasi langsung ke RSUD Kota Kotamobagu dan instansi terkait.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Retribusi kesehatan umum adalah jumlah balas jasa yang diberikan pasien selama mendapatkan perawatan umum Kesehatan di RSUD Kotamobagu, diukur dalam Rupiah.
2. Retribusi kesehatan JKN non kapitasi adalah jumlah balas jasa yang diberikan pasien selama mendapatkan perawatan di UGD (rawat jalan) RSUD Kotamobagu, diukur dalam Rupiah.
3. PAD adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada di Kotamobagu, diukur dalam rupiah.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negatif pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013).

Metode Analisa untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat adalah Model Regresi Berganda. Terdapat variabel kontrol dalam bentuk *Dummy Variable* yaitu Pandemi COVID 19 sejak awal tahun 2020. Dengan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + D + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah PAD

a = Konstanta

b_1 & b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum

X_2 = Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi

D = Dummy Pandemi C19

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi sederhana dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan terbebas dari asumsi klasik atau tidak, yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan Uji Multikolonieritas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian Model Regresi Berganda dengan Dummy Variabel

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)* dengan dummy variabel. Persamaan model ini dituliskan sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 D_1 + e$$

Tabel 3 Hasil Regresi

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Sample: 1 48				
Included observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.53E+09	1.07E+09	3.292931	0.0020
X1	1.741445	3.061218	1.568873	0.0523
X2	0.455700	0.312290	1.459220	0.0716
D01	1.85E+09	8.13E+08	2.271107	0.0281
R-squared	0.302658	Mean dependent var	5.67E+09	
Adjusted R-squared	0.255112	S.D. dependent var	2.44E+09	
S.E. of regression	2.11E+09	Akaike info criterion	45.85327	
Sum squared resid	1.95E+20	Schwarz criterion	46.00921	
Log likelihood	-1096.479	Hannan-Quinn criter.	45.91220	
F-statistic	6.365590	Durbin-Watson stat	0.942990	
Prob(F-statistic)	0.001116			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EViews 12 adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,53E+09 + 1,741445 X_1 + 0,455700 X_2 + 1,85E+09 D_1 + \epsilon$$

a. Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.255112 atau 25,51 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel bebas dalam hal ini Infrastruktur Retribusi pelayanan Kesehatan umum (X₁), retribusi pelayanan Kesehatan JKN non kapitasi (X₂) secara bersama – sama memiliki pengaruh pada naik turunnya PAD Kota Kotamobagu sebesar 25,51 %. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel tetap. Dari hasil pengolahan menggunakan eviews dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,001116 atau signifikansi $\alpha = 0.01$. Artinya secara Bersama-sama variable bebas sangat mempengaruhi variabel terikat.

c. Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi eviews menunjukkan bahwa Variabel X₁ dan Dummy Variabel signifikann pada $\alpha = 5\%$ sedangkan X₂ signifikan pada $\alpha = 10\%$.

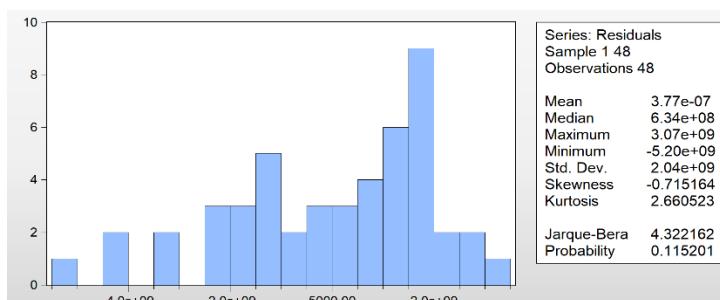
1. Variabel Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum (X₁) memiliki koefisien regresi 1,741445 dengan probabilitas sebesar 0,0523. Artinya pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, peningkatan X₁ secara signifikan akan meningkatkan Y (PAD Kota Kotamobagu).
2. Variabel Retribusi Pelayanan Kesehatan JKN non Kapitasi (X₂) memiliki koefisien regresi 0,455700 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0716 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.10$, peningkatan retribusi Kesehatan JKN non Kapitasi signifikan mempengaruhi peningkatan Y (PAD Kota Kotamobagu)
3. Variabel Dummy COVID 19 (D₁) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0281 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dummy pandemi COVID 19 menyebabkan terdapat perbedaan pada peningkatan PAD di Kota Kotamobagu.
4. Dilihat dari nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh X₁ lebih besar dar X₂ dalam mempengaruhi Y.

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B).

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,115201) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 11/03/22 Time: 06:46
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.15E+18	12.43572	NA
X1	9.371056	9.159842	1.080738
X2	0.097525	4.951625	1.687369
D01	6.61E+17	3.280135	1.776740

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X₁, X₂ dan D₃ < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 5
Uji Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	4.423609	Prob. F(3,44)	0.0084
Obs*R-squared	11.12259	Prob. Chi-Square(3)	0.0111
Scaled explained SS	7.759675	Prob. Chi-Square(3)	0.0512

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/03/22 Time: 06:50
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.15E+18	2.44E+18	2.928837	0.0054
X1	-5.29E+08	6.97E+09	-0.075900	0.9398
X2	-2.56E+09	7.11E+08	-3.606281	0.0008
D01	3.44E+18	1.85E+18	1.856034	0.0702

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan Eviews dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R² sebesar 0,0111 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), $0,0111 < 0,05$ artinya residual digolongkan memiliki heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Jika nilai DW berada

diantara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi. Dari hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah $0,942990$, berarti tidak ada autokorelasi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID 19 yang melanda dunia sampai ke daerah dibuktikan secara ekonometrika signifikan mempengaruhi pendapatan dari sektor kesehatan di Kota Kotamobagu. Pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan umum yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan retribusi pelayanan JKN non .

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Kota Kotamobagu. Kota Kotamobagu merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. APBD dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak perekonomian (*counter-cyclical*) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro (*macroeconomic management*) dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*). Instrumen dalam penyesuaian fiskal Kota Kotamobagu mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapi perkembangan masalah pandemi Covid tersebut.

Komponen APBD baik itu Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kotamobagu yaitu melakukan pergeseran APBD, penambahan belanja dan pembiayaan APBD, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial atau *social safety net*. Kondisi ekonomi di Kota Kotamobagu serupa dialami oleh pemerintah pusat, dimana dampak Covid-19 berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daerah mengalami penurunan.

Prospek ekonomi tahun 2021 sangat ditentukan oleh tujuan pembangunan ekonomi, masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi termasuk perkembangan ekonomi dunia, kebijakan yang akan diambil untuk penanganan pandemi corona virus disease 19, serta sasaran yang ingin dan diperkirakan dicapai dalam periode tahun 2021. Dalam periode tahun 2021, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah. Adapun fokus Kebijakan ekonomi makro Kota Kotamobagu Tahun 2021 yaitu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Kotamobagu dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang masih harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu:

Pertama, Meminimalisir Penurunan Pertumbuhan melalui upaya inovasi menggerakkan keberlanjutan sektor ekonomi Kota Kotamobagu dengan menggunakan standar protokol

Kesehatan. Kedua, Mengefektifkan pengentasan kemiskinan melalui distribusi jaring pengaman social (JPS) dengan verivali yang cepat untuk BDT dan bagi yang terdampak nyata Covid-19 disertai keberlanjutan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, Meminimalisir pengangguran dan dampak terhadap ekonomi keluarga yang terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan. Keempat, menyediakan strategi yang berkaitan dengan pertumbuhan, kemiskinan dan pengangguran serta pengembangan infrastruktur terkait. Kelima, Melancarkan distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok yang berasal dari luar dan pasokan dalam daerah disertai pengembangan ketahanan daya beli masyarakat. Keenam, Transformasi dan Refocusing belanja kepada efektifitas jaminan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat serta fasilitasi Kesehatan masyarakat dengan memantapkan SPK melalui peningkatan efisiensi dan arah/focus belanja ke kegiatan yang menyentuh langsung Ketujuh, Melakukan Orientasi pada sanitasi umum masyarakat serta Orientasi pada sanitasi khusus menghadapi pandemic Covid19 bagi keluarga dan dunia usaha serta instansi pemerintah.

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam perundangundangan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan, itu tertuang dalam dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakann pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Kotamobagu terdiri dari: 1. Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; 2. Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensipotensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih

mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perencanaan terintegrasi yang di berlakukan sejak 2016 memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari money follow function menjadi money follow program. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai. Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah, Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka beberapa kesimpulan yang diambil :

1. Retribusi pelayanan Kesehatan umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.
2. Retribusi pelayanan Kesehatan JKN non kapitasi memiliki pengaruh positif dan cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.
3. Secara bersama-sama retribusi pelayanan Kesehatan umum dan JKN non kapitasi memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.
4. Terbukti terdapat perbedaan dan signifikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu sebelum dan di masa Pandemi COVID 19 awal tahun 2020.
5. Dilihat dari nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh retribusi pelayanan Kesehatan umum lebih besar dari retribusi pelayanan Kesehatan JKN non kapitasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran terhadap hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan sosialisasi terkait pembayaran iuran baik pajak maupun retribusi daerah atau berbagai sumber pendapatan asli daerah. Sehingga dengan meningkatnya retribusi yang diberikan bisa membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan public lebih baik lagi. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat.

Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, mengembangkan kebijakan keuangan publik, tarif pajak dan retribusi yang kondusif yang takterlalu membebani masyarakat.

2. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan retibusi dan pelayanan yang ada.
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan kepada peniliti untuk memperluas lagi ruang lingkup penelitian dari peneltian yang telah ada khususnya keterkaitan mengenai Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nabilatul Khaira (2018)** Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tanah Datar. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9917>
- Agus, Widarjono. 2016.** Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya. Ekonosia. Jakarta.
- Gusfahmi, 2007, Pajak Menurut Syariah.** PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo, 2021, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**,Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta, ISBN 978-979-29-7056-2
- Mc.Master J,1991, Urban Financial Management A Training Manual**, World Bank 1818, Washington D.C.
- Prakoso Kesitbambang.2005.** *Pajak dan Retribusi Daerah*. uii press. Yogyakarta
- Priyatno, Duwi. 2014.** *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. CV. ANDI. Yogyakarta
- Richardson, Harry W., 1991.** *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul
- Resmi Siti. 2014.** *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Rizaldi Hervin, 2017,** *Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin, Padang*; Universitas Andalas
- Supardan H, 2020,** *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Media Nusa Creative, Malang.
- Siahaan Marihot P, 2005,** *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunyoto, D. 2012.** *Prosedur Uji Hipotesis untuk riset ekonomi*. Yogyakarta: Alfabeta. Yogyakarta
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Jasa Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (5) Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah

ANALISIS PENGELOUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN DI KOTA KOTAMOBAGU

Chelsia Paputungan¹, Agnes L. Ch. P. Lopian², George M. V. Kawung³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: chelsiarkp@gmail.com, agneslapian@unsrat.ac.id, georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan alokasi anggaran untuk penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana serta masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu dan untuk mengetahui proyeksi penganggaran pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu dan data penerima bantuan anggaran penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni selang tahun 2020 – 2022. Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat antara anggaran rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan anggaran penyediaan Rumah Layak Huni terkena dampak relokasi program pemerintah dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan di Kota Kotamobagu, terdapat pengaruh signifikan positif baik anggaran rehabilitasi Rumah Layak Huni untuk korban bencana dan anggaran penyediaan Rumah Layak Huni untuk terkena dampak relokasi program pemerintah secara parsial maupun bersama-sama terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu.

Kata Kunci : Standar Pelayanan Minimal, Penganggaran Pemerintah, Rumah Layak Huni

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between budget allocation for the provision and rehabilitation of Livable Homes for disaster victims and communities affected by government program relocation in meeting the minimum service standards in the public housing sector in Kotamobagu City and to determine the projections of local government budgeting in meeting the minimum service standards in the housing sector. people in Kotamobagu City. This study uses secondary data in the form of budget data for the Public Housing and Settlement Area Office of the City of Kotamobagu and data on recipients of budget assistance for the provision and rehabilitation of Livable Homes between 2020 – 2022. The analytical methods used in this study are correlation analysis and multiple linear regression analysis. The results of the study show that there is a very strong correlation between the budget for rehabilitation of Livable Homes for disaster victims and the budget for provision of Livable Homes affected by the relocation of the government program with the Minimum Service Standards for the housing sector in Kotamobagu City, there is a significant positive influence both the rehabilitation budget for Livable Homes for disaster victims and the budget for providing Livable Houses to be affected by the relocation of government programs partially or jointly against the Minimum Service Standards in the Housing Sector in Kotamobagu City.

Keywords:Minimum Service Standards, Government Budgeting, Livable Houses

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah disaat pandemi COVID 19 yang melanda dunia di akhir tahun 2019 adalah refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan dampak C19. Terjadi realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa pada seluruh satuan kerja untuk keperluan penanganan pandemi. Pemerintah sebagai pelayan publik (Hilman, 2003) dalam perekonomian modern memiliki fungsi penting dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi yang berupaya mengatur, memperbaiki dan mengarahkan

aktivitas sektor swasta menuju masyarakat sejahtera. Fungsi dan peran pemerintah saat pandemi menjadi semakin besar untuk menjaga berbagai ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi. Terutama dalam mengembalikan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat kondisi pandemi. Disisi lainnya pemerintah harus mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib erat berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

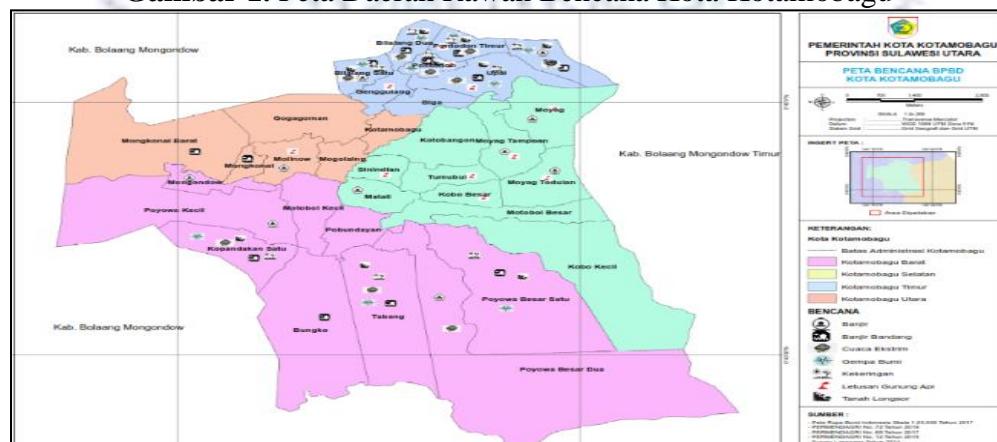
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal merupakan tonggak dari usaha pemerintah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005).

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari komponen konstruksi yang memiliki laju pertumbuhan 9,46 % di Kota Kotamobagu pada tahun 2021. Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi pada tahun 2020 mencapai negatif 4,15%. Indikator utama SPM PUPR adalah rasio alokasi anggaran untuk pelayanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena korban bencana dan relokasi program pemerintah terhadap pendapatan komponen konstruksi dalam PDRB.

Guna menunjang Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019 – 2023 yaitu “**KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING**”, Kota Kotamobagu harus menyiapkan diri menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Oleh sebab, pemerintah harus memperbaiki akses infrastruktur, pelayanan perkotaan di permukiman kumuh perkotaan terseleksi dan rekonstruksi serta penguatan fasilitas publik dan pemukiman dilokasi berdampak bencana untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Kota Kotamobagu memiliki wilayah rawan bencana yang tersebar, terdapat kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu ; kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas + 628 ha ; Kawasan rawan longsor di Desa Moyag seluas ± 273 Ha; Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di Desa Moyag dan Desa Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas ± 322 Hektar; dan Kawasan rawan bencana banjir di Kelurahan Molinow, Mogolaing, Kotobangon, Matali, Kopandakan, Motoboi Kecil, Biga.

Gambar 1. Peta Daerah Rawan Bencana Kota Kotamobagu



Sumber : RTRW Kota Kotamobagu

Anggaran pemerintah yang terbatas terutama sejak adanya kebijakan refocusing membuat para pengambil kebijakan harus menetapkan prioritas penerima manfaat sehingga bias dari *policy targeting* se minimal mungkin. Termasuk pemenuhan SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu bisa lebih optimal. Pemerintah juga berupaya untuk menyediakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan menyediakan rumah yang layak huni baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas. Selang tahun 2013 - 2022 telah dilakukan pelayanan dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota (data jumlah penerima bantuan permukiman).

Tabel 1. Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang SPM Perumahan Kota Kotamobagu Tahun 2020-2022

TAHUN	ANGGARAN (Rp)
2013	32.825.000
2014	53.402.000
2015	147.550.000
2016	24.667.950
2017	41.093.950
2018	52.660.700
2019	49.159.800
2020	600.229.600
2021	497.429.300
2022	148.050.000

Sumber : Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Selang tahun penelitian alokasi anggaran untuk memenuhi SPM terus berfluktuasi dan jumlahnya meningkat tajam di tahun 2020 saat pandemi. Fokus penelitian ini adalah alokasi anggaran untuk pembangunan rumah layak huni yang memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat korban bencana maupun yang rumahnya terkena relokasi program pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu?
2. Bagaimanakah hubungan alokasi anggaran untuk penyediaan RLH masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu?
3. Bagaimanakah proyeksi penganggaran pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui hubungan alokasi anggaran untuk penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.
3. Untuk mengetahui proyeksi penganggaran pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menetapkan alokasi anggaran prioritas untuk memenuhi SPM pelayanan publik.
2. Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti yang tertarik membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat.

Tinjauan Pustaka

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan melalui kebijakan ekonomi secara konsepsional juga melibatkan pertimbangan dari aspek sosial ekonomi yang secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial ekonomi, yang perlu dipertimbangkan adalah pemenuhan standar hidup layak masyarakat serta keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) yang fungsinya ditingkatkan. Hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (*inter-region*) dan waktu (*inter-generation*) (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Menurut Deddy T. Tikson (2005) pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi.

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004). Menurut Kuncoro (2004) pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan pengeluaran pemerintah (APBN) untuk nasional dengan Anggaran Pendapatan pengeluaran Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Guritno (1999), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah serta biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori Musgrave dan Rostow, Model pengeluaran pemerintah yang dihubungkan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah lebih pada mengatasi kegagalan pasar yaitu harus menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi terhadap masyarakat. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Teori Wagner, mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP. Wagner mengemukakan pendapatnya tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP. Hukum Wagner adalah menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan

antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Sehingga peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Teori Peacock dan Wiseman, Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal merupakan tonggak dari usaha pemerintah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat, (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005).

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara, yang mencakup 1) Jenis Pelayanan Dasar; 2). Mutu Pelayanan Dasar; dan 3). Penerima Pelayanan Dasar. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018).

Penelitian Terdahulu

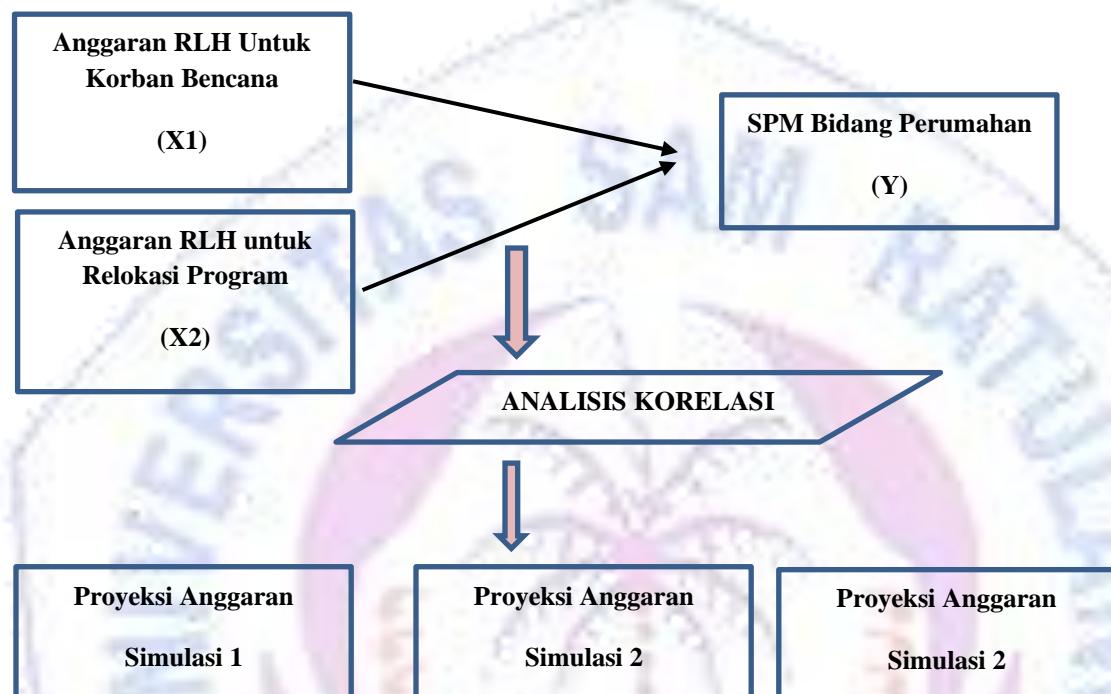
Penelitian dari Mandey dkk (2022) yang berjudul Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Atas Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah daerah atas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dengan metode Ordinary Least Square. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah EViews 11. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas Infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian Tamon Chindy dkk (2021) tentang Analisis Pola Pengeluaran Rutin Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pola anggaran pengembangan kinerja, sarana penunjang dan kesejahteraan di BPKPD. Menggunakan analisis ARIMA, diperoleh model terbaik adalah ARIMA (1 0,1), artinya anggaran bulan sebelumnya mempengaruhi alokasi anggaran bulan ini untuk pengembangan kinerja, sarana penunjang dan kesejahteraan di BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian dari Nur Mintinia dkk (2019) yang berjudul Kajian Pemenuhan SPM Prasarana dan Sarana Permukiman di Kelurahan Cikawao. Daerah penelitian merupakan wilayah yang sering terjadi banjir. Tujuan penelitian ini sebagai upaya yang tepat untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan untuk memenuhi standar pelayanan minimal guna terpenuhinya ketersediaan dan meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

lingkungan yang sesuai dengan standar yang ada. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Dari hasil analisis yang dilakukan telah di dapatkan jenis prasarana dan sarana yang merupakan prioritas utama penanganan yaitu Prasarana Jaringan Drainase, Prasarana Jaringan Pemadam Kebakaran dan juga Sarana Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Olahraga.

Kerangka Pikir



Hipotesis Penelitian

1. Diduga terdapat pengaruh pengeluaran Pemerintah yang signifikan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu
2. Diduga terdapat pengaruh anggaran penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana serta masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder anggaran belanja pengeluaran pemerintah di Dinas PRKP Kota Kotamobagu selang tahun 2020 – 2022 serta data penerima bantuan anggaran penyediaan dan rehabilitasi RLH.

Metode Pengumpulan Data

1. Langsung mengambil data yang sudah tersedia di Dinas PRKP Kota Kotamobagu.
2. Melalui studi kepustakaan terutama menggali informasi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.
3. Melalui wawancara mendalam terutama kepada para penerima manfaat program penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban banjir serta masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Rehabilitasi RLH korban bencana adalah alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana di Kota Kotamobagu, diukur dalam rupiah.

2. Penyediaan RLH relokasi program adalah alokasi anggaran untuk penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah di Kota Kotamobagu, diukur dalam rupiah.
3. SPM adalah salah satu indikator kinerja Dinas PUPR yang menunjukkan rasio alokasi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi sektor konstruksi, yang diukur dalam persen

$$SPM = \frac{\text{Anggaran Belanja Dinas PRKP}}{\frac{\text{Pertumbuhan Ekonomi Sektor}}{\text{Konstruksi}}}$$

Metode Analisis

Analisis Korelasi

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Analisis ini akan menunjukkan hubungan antara anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH korban bencana dan korban relokasi program pemerintah terhadap pemenuhan SPM bidang perumahan. Kisaran korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1 dapat bernilai positif maupun negatif. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah, sebaliknya jika koefisien korelasi negatif artinya kedua variabel memiliki hubungan terbalik. Kekuatan hubungan variabel kriteriannya adalah sebagai berikut:

0 artinya tidak ada korelasi

0 – 0,25 artinya korelasi sangat lemah

0,25 – 0,5 artinya korelasi cukup

0,5 – 0,75 artinya korelasi kuat

0,75 – 0,99 artinya korelasi sangat kuat.

Model Persamaan Korelasi Pearson

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Analisis Regresi Berganda

Alat analisa yang dipakai untuk melakukan proyeksi anggaran penyediaan atau rehabilitasi RLH korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Model Persamaan

Persamaan matematis untuk model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = SPM Perumahan (Percentase Rasio Anggaran RLH dan PDRB ADHK Komponen Konstruksi)

X₁ = Anggaran rehabilitasi RLH korban bencana banjir

X₂ = Anggaran penyediaan RLH terkena dampak relokasi program pemerintah

Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima. Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketetapan (godness of fit): (i) koefisien determinasi (ii) uji statistik F, dan (iii) uji statistik t.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan

satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji signifikan simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: $H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Pyndick, 1998)

Uji signifikansi individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau: $H_0: b_i = 0$ Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatif parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. $H_a: b_i \neq 0$ Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:244).

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Uji Multikolinearitas

Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R^2 dari auxilary regression melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation faktor (VIF) > 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Jika suatu persamaan mengalami kondisi ketidakbebasan secara linier (dimana terdapat suatu baris/kolom yang merupakan kombinasi linier baris/kolom yang lain) maka sistem persamaan tersebut tidak akan memiliki solusi. Hal ini terjadi jika variabel bebas yang ada pada model mengalami multikolinieritas sempurna. Sedangkan jika multikolinieritas adalah tidak sempurna, maka kesulitan yang terjadi adalah kesulitan dalam inferensi karena standar error yang bersifat Variabel (Gujarati, 2012).

Uji Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas $n(p$ value) observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedasitas. Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan Ordinary Least Square (OLS) adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis. Jika tidak, disebut heterokedastis (Gujarati, 2012).

Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan

waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dimana apabila probabilitas f hitung $> \alpha$ (5 %), maka bebas dari autokorelasi.

Simulasi Kebijakan Alokasi Anggaran

Selanjutnya untuk melakukan proyeksi anggaran pemerintah untuk penyediaan dan rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil analisis korelasi dan menyusun 3 (tiga) simulasi proyeksi anggaran. Simulasi proyeksi anggaran merupakan persentase alokasi anggaran yang akan direncanakan pada tahun berikutnya.

Simulasi I, Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH berdasarkan seluruh potensi rumah yang harus ditangani Dinas PUPR untuk memenuhi SPM bidang perumahan.

Simulasi II, Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil korelasi antara kedua alokasi anggaran (korban bencana dan relokasi program pemerintah) terhadap SPM bidang perumahan.

Simulasi III, Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil proyeksi alokasi anggaran (korban bencana dan relokasi program pemerintah) terhadap SPM bidang perumahan menurut model regresi linier berganda.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Korelasi

Dalam penelitian ini, analisa korelasi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban banjir (X_1) serta penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah (X_2) dengan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat (Y) di Kota Kotamobagu.

Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 11/27/22 Time: 18:58

Sample: 1 10

Included observations: 10

Correlation	Y	X1	X2
Y	1.000000		
X1	0.857717	1.000000	
X2	0.765735	0.347805	1.000000

Sumber : Hasil olahan data melalui Eviews

Berdasarkan hasil tersebut terdapat hubungan positif antar variabel, artinya antar variabel memiliki hubungan searah (peningkatan terhadap X_1 juga meningkatkan Y begitu juga dengan X_2 yang meningkat membuat Y juga meningkat, bahkan peningkatan X_1 juga meningkatkan X_2).

Jika dilihat dari koefisien korelasi ternyata :

1. Hubungan antara Y dan X_1 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,85 artinya terdapat korelasi yang sangat kuat antara Y dan X_1 .
2. Hubungan antara Y dan X_2 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 artinya terdapat korelasi yang sangat kuat antara Y dan X_2 .
3. Hubungan antara X_1 dan X_2 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,35 artinya terdapat korelasi cukup antara X_1 dan X_2 .

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan korelasi yang sangat paling kuat tampak pada anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH bagi mereka yang korban bencana dengan pemenuhan SPM bidang perumahan. Indikator SPM bidang perumahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan persentase rasio dari total anggaran (X_1 dan X_2) terhadap nilai komponen konstruksi pada PDRB ADHK Kota Kotamobagu.

Analisis Regresi Berganda

Selanjutnya digunakan pendekatan analisis regresi untuk melihat korelasi kedua variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil olah data menggunakan eviews yang tampak pada tabel berikut ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R^2) menunjukkan angka 0,98 artinya terdapat hubungan korelasi sangat kuat antara anggaran rehabilitasi RLH untuk rumah korban bencana dan penyediaan RLH yang terkena relokasi program pemerintah dengan SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu.

Tabel 3. Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 11/27/22 Time: 11:34
 Sample: 1 10
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.685154	2.569841	1.434001	0.1947
X1	2.76E-10	2.08E-11	13.28666	0.0000
X2	3.32E-10	3.16E-11	10.50135	0.0000
R-squared	0.984223	Mean dependent var	43.87558	
Adjusted R-squared	0.979716	S.D. dependent var	37.35615	
S.E. of regression	5.320349	Akaike info criterion	6.424280	
Sum squared resid	198.1428	Schwarz criterion	6.515056	
Log likelihood	-29.12140	Hannan-Quinn criter.	6.324700	
F-statistic	218.3484	Durbin-Watson stat	1.318327	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Jika dianalisis lanjut ternyata hubungan korelasi antara X_1 dan X_2 terhadap Y juga memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil olahan data eviews :

$$Y = 3,6851 + 2,76 \times 10^{-10} X_1 + 3,32 \times 10^{-10} X_2 + e$$

Koefisien Determinasi

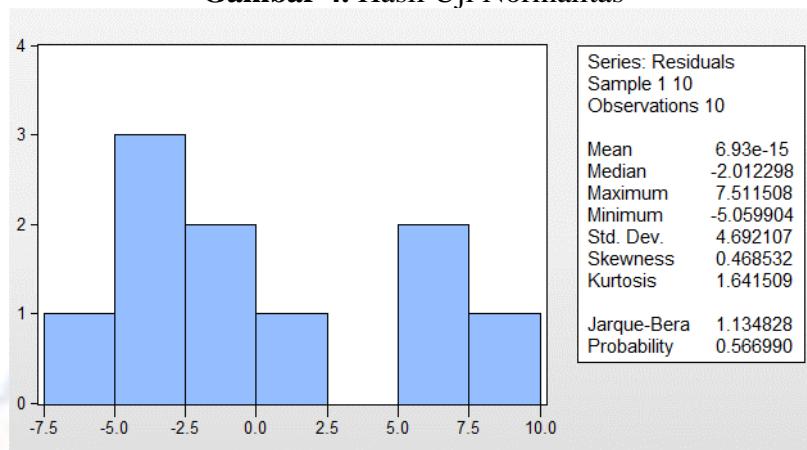
Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi ($Adj. R^2$) sebesar 0.9797 atau 97,97%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan anggaran/ belanja pemerintah untuk rehabilitasi RLH untuk korban bencana (X_1) maupun penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah (X_2) secara bersama – sama memiliki pengaruh 97,97 % terhadap variasi perubahan SPM Bidang perumahan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan data diperoleh Prob (F-statistik) 0,0000 atau. Signifikan pada $\alpha = 0.01$. Yang artinya semua variabel bebas (X_1, X_2) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda menunjukkan adanya tingkat signifikansi variabel pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana dan penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah terhadap SPM Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas****Gambar 4.** Hasil Uji Normalitas*Sumber : Hasil olah data Eviews*

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (1,134828) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas**Tabel 5.** Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 12/06/22 Time: 23:19

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.604083	2.333094	NA
X2	1.00E-21	2.242609	1.137615
X1	4.33E-22	2.072860	1.137615

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 dan $X_2 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 6.** Uji White

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.523441	Prob. F(2,7)	0.6140
Obs*R-squared	1.300978	Prob. Chi-Square(2)	0.5218
Scaled explained SS	0.204474	Prob. Chi-Square(2)	0.9028

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji white menggunakan Eviews 12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R^2 sebesar 0,5218 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5 \%$), $0,5218 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 11/27/22 Time: 11:34
 Sample: 1 10
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.685154	2.569841	1.434001	0.1947
X1	2.76E-10	2.08E-11	13.28666	0.0000
X2	3.32E-10	3.16E-11	10.50135	0.0000
R-squared	0.984223	Mean dependent var	43.87558	
Adjusted R-squared	0.979716	S.D. dependent var	37.35615	
S.E. of regression	5.320349	Akaike info criterion	6.424280	
Sum squared resid	198.1428	Schwarz criterion	6.515056	
Log likelihood	-29.12140	Hannan-Quinn criter.	6.324700	
F-statistic	218.3484	Durbin-Watson stat	1.318327	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah 1,31837 artinya tidak ada masalah autokorelasi.

Simulasi Kebijakan Alokasi Anggaran

Untuk melakukan proyeksi anggaran pemerintah untuk penyediaan dan rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil analisis korelasi dan menyusun 3 (tiga) simulasi proyeksi anggaran. Simulasi proyeksi anggaran merupakan persentase alokasi anggaran yang akan direncanakan pada tahun berikutnya.

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Olahan Data

Variabel	Analisis 1 Koef. Korelasi	Analisis 2 Koef. Korelasi	Analisis 2 Koef. Regresi
X ₁	0,8577	0,9842	2,76E-10
X ₂	0,7657	0,9842	3,32E-10

Sumber: Hasil Olahan

Hasil analisa 1 menunjukkan hubungan korelasi yang sangat kuat untuk X₁ lebih tinggi dibandingkan dengan X₂. Hasil analisa 2 menunjukkan terdapat perbedaan pada besarnya pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y, dimana koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh positif X₂ lebih besar dibandingkan pengaruh X₁ terhadap Y.

Data rumah yang harus ditangani pemerintah untuk potensi bencana kekeringan, gempa, cuaca ekstrim dan gunung berapi sulit untuk diprediksi, yang rumah target korban bencana lebih ke korban longsor (46 rumah) dan banjir (156 rumah) atau total 202 rumah yang terletak di 18 kelurahan/desa. Korban Potensi bencana terbesar di Kelurahan Gogagoman diikuti Kelurahan Kotobangon dan Desa Bilalang I.

Tabel 9. Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran RLH

Variabel	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
X ₁	202	7.227.500.000	18 Kel/desa
X ₂	12	1.080.000.000	2 Kel/desa
X ₁ & X ₂	214	8.307.500.000	18 Kel/desa

Sumber: Hasil Olahan

Sedangkan data penyediaan/rehabilitasi RLH untuk relokasi program pemerintah terdapat 12 unit rumah yang terletak di Desa Pontodon Timur dan Kelurahan Upai.

Berdasarkan hasil tersebut proyeksi anggaran RLH untuk pemenuhan SPM Bidang perumahan adalah sebagai berikut :

Simulasi I : Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH berdasarkan seluruh potensi rumah yang harus ditangani Dinas PUPR untuk memenuhi SPM bidang perumahan. Sesuai dengan tabel 9, maka besarnya anggaran yang harus disiapkan pemerintah Kota Kotamobagu untuk penyediaan/rehabilitasi RLH untuk korban bencana dan relokasi program adalah Rp 8.307.500.000. Tentunya pemenuhan keseluruhan rumah program penyediaan/rehabilitasi RLH yang menjadi tanggung jawab pemerintah menjamin pemenuhan SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu.

Simulasi II : Berdasarkan koefisien korelasi ditetapkan bahwa anggaran rehabilitasi RLH untuk korban bencana (X_1) memiliki proporsi lebih besar dibandingkan dengan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah (X_2). Dengan simulasi proyeksi anggaran adalah :

Tabel 10. Simulasi Proyeksi Anggaran Versi I

Variabel	Koefisien Korelasi	Proporsi (%)
X_1	0,8577	52,83
X_2	0,7657	47,17
Total	1,6234	100,00

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan hasil simulasi diatas maka proyeksi anggaran untuk :

- Rehabilitasi RLH untuk korban bencana adalah 52,83 % dari total anggaran X_1 7.227.500.000 rupiah, yaitu sebesar 3.818.288.250 rupiah.
- Penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah adalah 47,17 % dari total anggaran X_2 1.080.000.000 rupiah, yaitu sebesar 509.436.000.
- Besarnya proyeksi anggaran rehabilitasi/penyediaan RLH di tahun berikutnya adalah 4.327.724.250 rupiah atau sebesar 52,09 % dari total anggaran yang harus disiapkan pemerintah Kota Kotamobagu.

Simulasi III : Anggaran rehabilitasi RLH memiliki proporsi lebih besar dibandingkan dengan anggaran penyediaan RLH.

Tabel 11. Simulasi Proyeksi Anggaran Versi II

Variabel	Koefisien Regresi	Proporsi (%)
X_1	2,76 E-10	45,39
X_2	3,32 E-10	54,61
Total	6,08 E-10	100,00

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan hasil simulasi diatas maka proyeksi anggaran untuk :

- Rehabilitasi RLH untuk korban bencana adalah 45,39 % dari total anggaran X_1 7.227.500.000 rupiah, yaitu sebesar 3.280.562.250 rupiah.
- Penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah adalah 54,61 % dari total anggaran X_2 1.080.000.000 rupiah, yaitu sebesar 589.788.000.
- Besarnya proyeksi anggaran rehabilitasi/penyediaan RLH di tahun berikutnya adalah 3.870.350.250 rupiah atau sebesar 46,59 % dari total anggaran yang harus disiapkan pemerintah Kota Kotamobagu.

Pembahasan

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pemenuhan SPM bidang perumahan memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan keputusan alokasi anggaran belanja untuk penyediaan dan

rehabilitasi RLH. Keterbatasan anggaran memerlukan kajian empirik atas keputusan alokasi anggaran pada kedua program pemerintah tersebut.

Besarnya anggaran untuk pemenuhan SPM bidang perumahan dari program rehabilitasi RLH untuk korban bencana dan penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah berdasarkan simulasi sebelumnya menunjukkan bahwa proyeksi terbaik adalah menggunakan simulasi ketiga, karena memiliki koefisien korelasi terbesar dengan hubungan korelasi sangat kuat.

Distribusi alokasi anggaran pemerintah daerah di tahun berikutnya jika tidak bisa memenuhi keseluruhan kewajiban daerah yaitu sebesar 8,3 miliar rupiah untuk penyediaan/rehabilitasi RLH, bisa melakukan simulasi kedua yang alokasi anggarannya hanya 4,3 miliar rupiah atau simulasi ketiga yang jumlahnya hanya 3,87 miliar rupiah.

Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran simulasi ketiga yang paling efektif ternyata menunjukkan alokasi anggaran paling minimal dalam memenuhi SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat antara anggaran rehabilitasi RLH korban bencana dan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah dengan SPM Bidang perumahan di Kota Kotamobagu.
2. Terdapat pengaruh signifikan positif baik anggaran rehabilitasi RLH untuk korban bencana dan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah secara parsial maupun bersama-sama terhadap SPM Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu.
3. Distribusi alokasi anggaran berdasarkan simulasi I yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH untuk korban bencana (7,2 miliar rupiah) lebih besar dibandingkan dengan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah (1,1 miliar rupiah) dalam memenuhi SPM bidang perumahan, dengan total anggaran RLH sebesar 8,3 miliar rupiah
4. Distribusi alokasi anggaran berdasarkan simulasi II dan simulasi III yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah anggaran RLH simulasi II (4,3 miliar rupiah) lebih besar dibandingkan dengan anggaran RLH simulasi III (3,87 miliar rupiah) dalam memenuhi SPM bidang perumahan.

Saran

1. Pemerintah daerah Kota Kotamobagu harus tetap memenuhi SPM bidang perumahan karena merupakan urusan wajib pemerintahan dan merupakan salah satu indikator kinerja keberhasilan pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah juga bisa mempertimbangkan target rumah yang menjadi tujuan program jika ternyata merupakan masyarakat miskin dan jika korban bencana atau relokasi program menyebabkan masyarakat tersebut jadi berkurang kesejahteraannya dan menjadi miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Hillman Arye L, 2003**, Public Finance and Public Policy: Responsibilities and limitations of government. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004**, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Cetakan 1, Jakarta : LP3ES.
- Deddy T. Tikson, 2005**, Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. <http://ecozon.html>.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004**, Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sukirno S, 2000**, Ekonomi Pembangunan, LPEF-UI Bima Grafika, Jakarta
- Guritno M, 1999**, Ekonomi Publik, Ed.3, Cet.7. Jakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Mandey A, Rotinsulu D & Walewangko E, 2022**, Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Atas Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 22 No.2
- Tamon C, Walewangko E & Lapian A, 2021**, Analisis Pola Pengeluaran Rutin Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 22, No 4.
- Nur Muntinia M.D dan Ernawati H, 2019**, Kajian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Permukiman di Kelurahan Cikawao, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.5. No.1, ISSN 2460-6480.
- Gujarati Damodar N dan Dawn C Porter, 2012**, Dasar – Dasar Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta.



MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI MINAHASA UTARA

Brilliant Johanes Maengko¹, Anderson G. Kumenaung², Mauna Th. B. Maramis³.

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: brilliantjohanes@gmail.com, andersongumenaung@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Terbatasnya kemampuan masyarakat dan petani dalam memperoleh modal kerja untuk meningkatkan pendapatan tentunya perlu ada model pemberdayaan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Model CSR terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus PT Tirta Investama Airmadidi). Penelitian ini terdapat 3 variabel independent, yaitu: Program Pemberdayaan Ekonomi, Program Inovasi Edukasi, dan Program Penanaman Pohon. Serta satu variable dependen yaitu: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini memakai data primer dan populasi yang digunakan ialah masyarakat penerima manfaat program CSR. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dengan metode skala Likert untuk mengukur persepsi masyarakat dari setiap variable independen. Teknik estimasi variable dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan Program Pemberdayaan Ekonomi paling besar pengaruhnya dan diikuti program Inovasi Edukasi sedangkan program penanaman pohon tidak signifikan bila secara parsial tapi setelah bersama-sama menjadi memiliki pengaruh signifikan.

Kata Kunci: Tanggungjawab sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the CSR model on increasing people's income in North Minahasa Regency (Case Study of PT Tirta Investama Airmadidi). This research has 3 independent variables, namely: the Economic Empowerment Program, the Educational Innovation Program, and the Tree Planting Program. As well as one dependent variable, specifically: Community Welfare Improvement. This study uses primary data and the population used is the beneficiaries of the CSR program. Data collection techniques in this study used a questionnaire with the Likert scale method to measure people's perceptions of each independent variable. The dependent variable estimation technique used is Ordinary Least Square (OLS). The results showed that the Economic Empowerment Program had the greatest influence and participated in the Educational Innovation program, while the tree provisioning program was not significant partially, but after being together it became a significant influence.

Keywords : Social Responsibility, Society Economic Empowerment

1. PENDAHULUAN

Negara sebesar Indonesia mungkin tidak dapat berdiri sendiri dalam membantu masyarakat agar mereka mandiri dalam memperbaiki lingkungan karena eksplorasi alam oleh perusahaan. Dengan demikian, masyarakat beserta perusahaan swasta yang juga turut harus berperan dalam pembangunan bangsa—harus ikut bertanggung jawab atas hal-hal kerusakan lingkungan alam. Di mana perusahaan harus mempunyai program yang dapat membantu menangani permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan yang sudah dilakukan.

Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial bagi perusahaannya saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, sebab masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang dimiliki dan direproduksi oleh perusahaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membangun sumberdaya di Kabupaten Minahasa Utara sangat menentukan keberlanjutan pembangunan dimana didalamnya terdapat aktivitas ekonomi PT Tirta Investama Airmadidi Danone Indonesia Group yang merupakan produsen Air Minum Dalam Kemasan skala nasional bahkan bisa dibilang Internasional yang mana perlu ditingkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi maupun tanggung jawab sosial perusahaan sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan sumberdaya di Kabupaten Minahasa Utara.

Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah 1.059,24 Km² yang terdiri dari 10 kecamatan, 6 kelurahan dan 118 desa. Sumber daya yang ada yakni tanaman kelapa yang tersebar di seluruh wilayah Minahasa Utara dan merupakan usaha tani utama penduduk. Selain hasil perkebunan kelapa, kekayaan laut dan deposit emas juga terkandung di wilayah Minahasa Utara ini. Menurut data statistik daerah Kabupaten Minahasa Utara garis kemiskinan Minahasa Utara terus mengalami peningkatan. Adapun garis kemiskinan Minahasa Utara tahun 2019 sebesar Rp. 321.679 per kapita per bulan. Akan tetapi persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara dalam tiga tahun terakhir terus menunjukkan trend yang menurun. Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kemiskinan menjadi masalah krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin menurunnya pendapatan penduduk.

Kegiatan operasional industri dapat menyebabkan perubahan ekologis yang bisa memberikan tekanan signifikan terhadap ekosistem wilayah dimana pada akhirnya dapat mengubah struktur pemanfaatan ruang. Tekanan terhadap sumberdaya sering diperberat oleh tingginya angka kemiskinan diwilayah tersebut serta rendahnya pemahaman akan upaya konservasi. Kemiskinan sering pula menjadi lingkaran setan (*vicious circle*) dimana penduduk miskin sering menjadi penyebab rusaknya lingkungan karena kurangnya pemahaman serta tekanan untuk mencari alternatif pendapatan. Salah satu aspek pengelolaan wilayah yang baik adalah dengan mencari alternatif pendapatan sehingga mengurangi tekanan penduduk terhadap pemanfaatan sumberdaya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait upaya konservasi juga sangat mempengaruhi kualitas air yang akan dipakai untuk produksi bahkan kegiatan rumah tangga masyarakat. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Minahasa Utara bahwa terdapat penurunan debit yang yang disalurkan dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 79.6 ribu meter kubik menjadi 69 ribu meter kubik pada 2019 tentunya ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan industri yang ada di Minahasa Utara apalagi sumber air utama dalam indikator statistik perumahan di Minahasa Utara adalah Air kemasan isi ulang sebesar 37%, sumur/ mata air terlindungan 16.63%, sumur bor 13.89%, serta leding 12.83%. kemudian masih terdapat 14.37% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar sendiri dimana hal ini juga akan mempengaruhi kualitas air.

Kondisi ini menuntut agar tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)* wajib lebih berperan dalam pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumberdaya wilayah secara terpadu di Kabupaten Minahasa Utara.

CSR adalah upaya yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasionalnya terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dimana konsep pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kelestarian lingkungan (*environmental protection*), dan kesetaraan sosial (*social equity*). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi saja (*profit*) tapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Pelaksanaan CSR di Indonesia memiliki payung hukum, yaitu: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada aturan ini ada pasal yang menyatakan bahwa semua Perseroan Terbatas wajib hukumnya melakukan tanggung jawab sosial (CSR), sehingga CSR menjadi bagian dari rencana anggaran perusahaan.

Terbatasnya kemampuan masyarakat dan petani dalam memperoleh modal kerja untuk meningkatkan pendapatan tentunya perlu ada model pemberdayaan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan ini berdampak positif terhadap kerusakan lingkungan. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Murad dan Mustapha (2016) melihat keterkaitan antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan di Kuala Lumpur, Malaysia dalam penelitian oleh Apressian, dkk (2016). Kemiskinan terjadi karena adanya distribusi pendapatan yang timpang dimana ditemukan hasil yang mendukung ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan bahwa penduduk dengan tingkat pendapatan rendah memiliki kepedulian yang rendah pula terhadap lingkungan. Dengan dasar pemikiran seperti diterangkan diatas, maka perlu dilakukan suatu kajian tentang “Model *Corporate Sosial Responsibility* dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus PT Tirta Investama Airmadidi)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh CSR terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus PT Tirta Investama Airmadidi)

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus PT Tirta Investama Airmadidi)
2. Untuk mengetahui perbedaan terhadap masyarakat yang terdampak CSR oleh PT Tirta Investama Airmadidi dan yang tidak terdampak.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.
2. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
3. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Universitas Sam Ratulangi bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya-karya ilmiah terdahulu dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, pengambilan dan pencantuman hasil dari penelitian karya ilmiah terdahulu dalam skripsi ini didasarkan pada kemiripan tema, kata kunci, serta ditinjau dari teori atau hasil-hasil penelitiannya. Serta disertai penjelasan tentang kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti dalam membahas tema tersebut. Dengan demikian peneliti dapat menegaskan posisinya secara signifikan dalam mengembangkan pokok bahasan yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor dan Abdul Wachid (2013) dengan judul Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap peningkatan Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan dan parsial antara variabel sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ketiga variable bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Aminah Lubis (2017) meneliti tentang Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara IV.SOSA Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang: (1) Program-program kemitraan dan bina lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV.Sosa, (2) implementasi program corporate social responsibility (CSR) PT. Perkebunan Nusantara IV. Sosa dalam pemberdayaan masyarakat, dan (3) Tinjauan Shariah Enterprise Theory (SET) terhadap Program corporate social responsibility (CSR) PT. Perkebunan Nusantara IV.Sosa. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Hasil Penelitian ini bahwa Program corporate social responsibility (CSR) PT. Perkebunan Nusantara IV.Sosa yang dilaksanakan adalah 1) pemberian dana pinjaman modal dan hibah, 2) pendidikan, 3) kerohanian, 4) infrastruktur, 5) sektor kesehatan, 6) pelestarian alam. Implementasi program corporate social responsibility (CSR) PT. Perkebunan Nusantara IV.Sosa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan tinjauan Shariah Enterprise Theory (SET) program corporate social responsibility (CSR) PT. Perkebunan Nusantara IV.Sosa jika dilihat dari tujuan, bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip berbagi adil, Maslahah dan Rahmat alil' alamin.

Farida (2014) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Sosial di BMT Harapan Umat Kudus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility Goal*, *Corporate Social Issue*, *Corporate Social Program* terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara *Corporate Social Responsibility Goal* (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). kedua, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Corporate Social Issue* (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara *Corporate Social Program* terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

Lena Epriliana (2017) meneliti tentang Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Multi Mart Batang Hari Lampung Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh *corporate social responsibility* Multi Mart Batang Hari Lampung Timur terhadap kejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa *program corporate social responsibility* Multi Mart Batanghari Lampung Timur berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

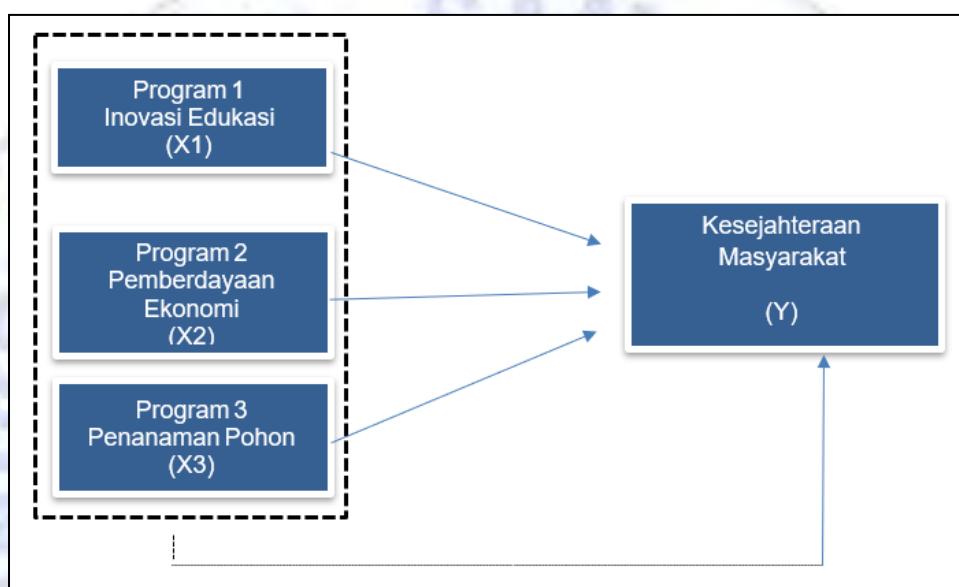
Syariatul Wida (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi dari program Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan sifat penelitian asosiatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel program CSR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Shinta Kusumawati (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mitra Binaan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Indonesia terhadap peningkatan pendapatan pada mitra binaan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Gresik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan pada mitra binaan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Gresik. Corporate Social Responsibility perusahaan memberikan banyak sekali manfaat terhadap masyarakat terutama oleh para mitra binaan, karena mereka dapat mengembangkan dan memajukan usaha-usaha mereka berkat bantuan dana dari PT. Semen Indonesia. Hampir rata-rata dari mitra binaan mengalami peningkatan pendapatan karena hasil produksi, penjualan dan penghasilan mereka meningkat.

Penelitian yang dilakukan Faris Multi Naufal, Lorentino Togar Laut, Gentur Jalunggono dengan judul Analisis Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT.

PERTAMINA PERSERO terhadap Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalidongan Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kalidongan, Kabupaten Cilacap. Hasil dari penelitian adalah terjadinya kenaikan pendapatan secara signifikan yang dialami oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani, buruh tani, nelayan dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Akan tetapi untuk pemberdayaan masyarakat masih belum memberikan pengaruh yang signifikan karena beberapa hambatan yang dihadapi oleh Program CSR PT. Pertamina (PERSERO).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pikir

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari perusahaan (PT. Tirta Investama Airmadidi) dan data primer yang dengan responden yang sudah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif, dengan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tumaluntung Kecamatan Airmadidi sebagai informan utama. Sebagai triangulasi, peneliti memanfaatkan Kepala Penanggung Jawab program CSR Tumaluntung, Perangkat, Pengurus dan Anggotanya. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara memilih sampel dari beberapa masyarakat, serta karyawan PT. Tirta Investama Airmadidi untuk lebih akurat dalam melakukan penelitian sehingga hasil penelitian lebih representatif.

Objek dari penelitian ini adalah Program Corporate Social Responsibility (CSR) produsen Air Minum Dalam Kemasan PT Tirta Investama Airmadidi Danone Indonesia Group. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Tumaluntung serta karyawan PT. Tirta Investama Airmadidi karena dianggap sebagai pihak yang memiliki informasi serta dapat memberikan data yang diperlukan untuk penelitian mengenai Program Corporate Social Responsibility (CSR) produsen Air Minum Dalam Kemasan PT Tirta Investama Airmadidi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus PT Tirta Investama Airmadidi).

Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode dalam mengumpulkan data adalah metode studi kepustakaan untuk beberapa data penunjang, wawancara atau survey lapangan langsung ke responden untuk mendapatkan interview mendalam sesuai tujuan penelitian. yang akan diwawancarai adalah masyarakat yang menerima manfaat dari program CSR dan pihak PT Tirta Investama Airmadidi untuk mengetahui profil dan informasi penting lainnya dan menyebarkan kuisioner atau angket

dan responden mengisinya sesuai pertanyaan yang dibuat peneliti serta metode dokumentasi dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa implementasi program yang dilakukan perusahaan dan data masyarakat yang menerima dan merasakan program tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sujarweni, Wiratna, 2015). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang merasakan manfaat dari program CSR yang diakukan oleh PT. Tirta Investama Airmadidi dalam kurun waktu satu tahun (2022), dan diambil 1 desa yang berlokasi dekat dengan PT Tirta Investama Airmadidi yang berjumlah 86 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan cara non probability sampling dengan teknik purposive sampling.

Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu (Sujarweni, Wiratna, 2015). Ciri-ciri khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa yang berhak menjadi sampel adalah masyarakat yang merasakan manfaat dari program CSR yang dilakukan oleh PT Tirta Investama Airmadidi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) adalah ada tidaknya peningkatan pendapatan sebelum mendapat CSR dan setelah mendapat CSR, diukur dalam 0 = tidak ada peningkatan pendapatan dan 1 = ada peningkatan pendapatan
2. CSR adalah program bantuan dari PT Tirta Investama Airmadidi yang terdiri atas program inovasi edukasi (X1), program pemberdayaan ekonomi (X2) dan program penanaman pohon (X3).

Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada tujuan penelitian ini adalah liniaritas regresi berganda, alat uji ini bertujuan untuk mengetahui dua variable antara variable independen X dengan variable dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik regresi apakah menunjukkan hubungan yang linear atau tidak.

Uji Instrumen Penelitian

Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan, untuk menguji keabsahan tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu uji validitas (test of validity) dan uji reliabilitas (test of reliability). Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Suharsimi Arikunto (2013: 211). Menurut Sugiyono (2010:188) dari hasil analisis dapat dilihat bahwa jika hasil koefisien validitas/*rhitung* bernilai positif dan memenuhi syarat minimum sama dengan atau $> 0,3$ maka instrumen tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan data penelitian, sebaliknya jika korelasi butir memiliki nilai *r* hitung $< r_{table}$ 0,3, maka disimpulkan bahwa butir tersebut tidak valid (dinyatakan gugur). Kemudian uji reliabilitas diukur dengan melihat nilai standar cronbach alpha. Menurut Ghazali (2005: 46), suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil perhitungan Apha Cronbach menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60. Pengujian validitas dan reliabilitas di atas Software Eviews.

Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi linear sederhana. Dalam analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, dan untuk mengolah dan membahas data yang diperoleh. Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti karena penelitian ini bermaksud menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel faktor penyebab (X) terhadap Variabel akibatnya.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \quad \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

X1 = Program Inovasi Edukasi

X2 = Program Pemberdayaan Ekonomi

X3 = Program Penanaman Pohon

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefesian regresi

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji-T (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah menyusun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) dengan taraf nyata (α) yang biasa digunakan adalah 5% atau 0,05 maka, dengan menggunakan Eviews:

H_0 diterima : jika angka signifikan lebih besar dari $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak : jika angka signifikan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$

Kesimpulan :

- Jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima
- Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2016:95) koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Nilai R^2 akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah Penelitian

Kabupaten Minahasa Utara

Minahasa Utara memiliki ketinggian rata-rata +188,3 meter di atas permukaan laut, terletak pada $1^{\circ}18'30''$ - $1^{\circ}53'00''$ Lintang Utara, serta $124^{\circ}44'00''$ - $125^{\circ}11'00''$ Bujur Timur. Luas wilayah Minahasa utara adalah 1.059,24 km². Akhir tahun 2021, wilayah administrasi Kabupaten Minahasa utara terdiri dari 10 wilayah kecamatan, luas masing-masing kecamatan, yaitu: Kema (78,76 km²), Kauditan (108,20 km²), Airmadidi (86,66 km²), Kalawat (39,03 km²), Dimembe (166,43 km²), Talawaan (82,51 km²), Wori (90,70 km²), Likupoang Barat (104,29 km²), Likupoang Timur (290,84 km²), serta Likupoang Selatan (11,82 km²). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Minahasa utara berkisar 1-500 m. Wilayah Kabupaten Minahasa utara bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Laut Sulawesi dan Laut Maluku, bagian timur berbatasan dengan Kota Bitung, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, dan bagian barat berbatasan dengan Kota Manado.

Penduduk Minahasa Utara berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2021 mencapai 174 ribu orang. Sebanyak 62 persen dari jumlah tersebut adalah angkatan kerja dan 92 persen penduduk angkatan kerja memiliki kegiatan utama bekerja.

Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Minahasa Utara naik sebesar 0,11 menjadi 7,11 dari 7,00 pada tahun 2020.

Kabupaten Minahasa Utara di dalamnya tentu terdapat usaha/ perusahaan baik itu kecil maupun besar yang menunjang perekonomian di kabupaten ini. Pada tahun 2021 data yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 27 perusahaan berbadan hukum yang beroperasi di wilayah Minahasa Utara. Pada tahun 2021 di Minahasa Utara tercatat ada 21 PT, 4 CV, dan 2 usaha perorangan. Dalam menunjang kegiatan ekonomi

masyarakat sehari-hari dibutuhkan sarana perdagangan untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Pada tahun 2021 tercatat di Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara terdapat 7 pasar, 96 toko, dan 3000 warung/kios

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 5,96 persen. Jika dilihat dari harga berlakunya PDRB Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021 mencapai 15,7 triliun rupiah. Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha, yang memiliki kontribusi paling besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sekitar 28 persen pada tahun 2021.

PT Tirta Investama Airmadidi

Danone Indonesia berkomitmen membangun masa depan yang lebih sehat dengan menciptakan gaya hidup, bumi dan juga ekosistem yang sehat. Danone merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang memiliki misi memberikan kesehatan kepada sebanyak mungkin orang. Danone beroperasi di 130 negara dengan jumlah karyawan lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Di Indonesia, Danone terdiri atas dua kategori bisnis yang berfokus pada kesehatan masyarakat di setiap tahapan kehidupan yaitu, Danone Waters yang memproduksi Air Minum dalam Kemasan & Minuman non Karbonasi dengan produknya seperti AQUA, Mizone, VIT, VIT Levite dan Danone Specialized Nutrition dengan produknya seperti SGM Eksplor, SGM Bunda, Lactamil, Bebelac, Nutrilon Royal, dan nutrisi medis. Grup Danone di Indonesia memiliki 26 pabrik dengan jumlah karyawan lebih dari 15.000 orang.

Kategori Bisnis Danone Indonesia, yaitu: *Waters* dan *Specialized Nutrition*. Sebagai bagian dari salah satu perusahaan air minum kemasan terbesar di dunia, Danone-AQUA berkomitmen untuk menyediakan air minum berkualitas tinggi untuk semua keluarga di Indonesia. Dengan menjunjung tinggi bisnis yang penuh tanggung jawab dan berkelanjutan, kami juga terus mempromosikan pelestarian air yang berkelanjutan di seluruh operasi kami dan berusaha untuk melindungi dan memulihkan ekosistem air alami yang melibatkan kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Kemudian berawal dari sebuah kepedulian pada kesehatan dan kecukupan nutrisi nasional, yang menjadi dimulainya jalan panjang Danone Indonesia *Specialized Nutrition* dalam mengembangkan produk-produk nutrisi dan kaya protein bagi rakyat Indonesia hingga saat ini. Kekuatan pendorong di balik kesuksesan ini adalah dengan berinvestasi pada berbagai program riset dan pengembangan bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mencetak portofolio produk unggulan berbasis sains yang memberikan solusi nutrisi yang optimal kepada semua orang terutama pada fase-fase penting dalam hidupnya.

Nilai-nilai dalam Danone adalah HOPE: Humanism (berbagi tanggung jawab, menghormati orang lain), Openness (Keingintahuan, Kegesitan, Dialog), Proximity (Aksesibilitas, Keaslian, Empati), dan Enthusiasm (Keberanian, Semangat dan Hasrat akan Tantangan). Ini bukanlah hanya sekadar slogan. Ini adalah pengingat tujuan kami dan apa yang kami perjuangkan, di atas dan di luar dari tujuan komersial kami. Keempat Nilai tersebut menjadi panduan kami dalam berperilaku setiap hari, cara bekerja, serta demi kemajuan dalam bisnis kami.

Danone hadir di Indonesia melalui brand peninggalan kami yang lahir di Indonesia dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap nutrisi kesehatan dan hidrasi yang diproduksi oleh orang Indonesia. Perjalanan rintisan kami dibangun dengan semangat dan ketekunan seiring dengan perjalanan Negara Indonesia. Kontribusi positif kami adalah untuk bersama-sama membangun dan membentuk masyarakat yang lebih sehat di Negara yang indah ini sehingga dapat terus tumbuh dan sejahtera.

Danone-AQUA menjadi Perusahaan FMCG Pertama di Indonesia yang menerima Sertifikat B-Corp dalam rangka memenuhi standar sosial, transparansi, akuntabilitas, dan lingkungan tertinggi.

Aqua grup merupakan pelopor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia yang didikan pada 1973 dan kemudian menjalin kemitraan strategis dengan Danone pada 1998. Aqua Group memiliki misi ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia mengenai hidrasi yang sehat. Sebagai perwujudan visi dan komitmen dalam mengelola operasionalnya secara bertanggung jawab, Aqua mengembangkan inisiatif Aqua Lestari. Inisiatif ini berakar pada pemikiran pendiri Danone, Antonie Riboud tentang komitmen ganda yaitu mengedepankan

keseimbangan bisnis dan sosial. Inisiatif Aqua Lestari dijalankan dengan membangun kerja sama dengan karyawan dan pemangku kepentingan.

PT Tirta Investama Airmadidi adalah bagian dari Danone Indonesia khususnya dalam kategori bisnis *waters*, aqua group. Berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di Kecamatan Airmadidi, Kelurahan Airmadidi Bawah beroperasi sejak tahun 1991 hingga sampai saat ini tahun 2022 dan memproduksi produk 1500ml, 600ml, 220ml, dan 5 galon. Selaras dengan inisiatif Aqua Lestari PT. Tirta Investama Airmadidi memiliki tanggung jawab sosial, yaitu: proyek Minut Lestari pada tahun 2021. Kegiatan ini berlokasi di Keluarahan Airmadidi Atas, Airmadidi Bawah, dan Tumaluntung. Aktivitas ini merupakan model *Corporate Social Responsibility* dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, diantaranya adalah yang pertama Konservasi dan Kehati untuk membangun kesadaran masyarakat menjadikan kaki dian sebagai resapan air untuk semua masyarakat dimana juga membangun kerjasama dengan pemilik lahan untuk memperluas area penanaman pohon dalam *recharge area*, yang kedua *Community Development* dalam aktivitasnya membuat Greenhouse sebagai pusat bibit sayur organik di Desa Tumaluntung, membangun pusat belajar pertanian regeratif di area seluas 1 hektar di Airmadidi Bawah, membuat 1 tempat pengomposan dengan metode bokhasi, melakukan perawatan reaktor Biogas dan memastikan 8 penerima manfaat mendapat fasilitas biogas dengan baik serta tersedia pupuk buangan reaktor yang dimanfaatkan, kemudian produk pertanian dan *home industry* terserap oleh pasar. Ketiga *Stunting*, kegiatan ini meningkatkan kapasitas guru PAUD, kader posyandu, ibu balita dan ibu hamil, remaja putri dalam upaya peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pangan, dan gizi serta pola asuh, selanjutnya meningkatkan dan mempertahankan status gizi pada balita *stunting* yang berstatus gizi buruk. Keempat, yaitu Pengelolaan Sampah, membuat Bank Sampah Induk di Minahasa Utara, peningkatan kapasitas pengelola TPS3R, membangun kerjasama dengan mitra usaha: rumah makan, sekolah, dan Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara.

Deskripsi Responden

Responden dari penelitian ini merupakan masyarakat penerima/ pendampingan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Tirta Investama Airmadidi yang berlokasi di Desa Tumaluntung (penerima manfaat reaktor biogas), Kelompok Simaru Sindo, Kelompok Waya Marendem Sitou-timou, Kelompok Tenged Watu, Kelompok SKIMA (Pertanian Holtikultura-Pertanian Regenertive). Dari sekitar 86 orang penerima manfaat/ pendampingan ada sekitar 50 orang yang telah dikirimkan kuesioner, kuesioner terisi sebesar 48 dan dijadikan dasar untuk pengolahan data analisis.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Gender

Gender	Frekuensi	%
Laki-laki	28	58%
Perempuan	20	42%
Total	48	100%

Berdasarkan table 1 jumlah responden antara laki-laki dan perempuan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 28 orang atau 58% sedangkan total responden perempuan sebanyak 20 orang atau setara dengan 47%.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	%
16-25	14	29%
26-35	5	10%
36-45	9	19%
46-55	1	2%
56-65	19	40%
Total	48	100%

Jumlah responden dengan usia 56-65 tahun mendominasi dengan total 40% atau 19 orang, sementara usia 16-25 tahun juga ada sekitar 29% atau 14 orang dan untuk rentang usia ini sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa. Sebanyak 10% atau 5 orang ada pada usia 26-35 tahun, selanjutnya pada usia 36-45 tahun ada sebanyak 9 orang atau 19% dari total responden dan yang terakhir 1 orang atau 2% ada pada rentang usia 46-55%.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	%
Wiraswasta	5	10%
Ibu Rumah Tangga	5	10%
mahasiswa	14	29%
Petani	13	27%
Swasta	11	23%
Total	48	100%

Profesi responden paling besar adalah mahasiswa dengan prosentase 29% atau sebanyak 14 orang, petani 27% atau 13 orang, swasta 23% atau 11 orang, ibu rumah tangga 10% atau 5 orang, dan wiraswasta 10% atau 5 orang.

Semua responden adalah penerima manfaat *CSR* dengan beberapa tujuan seperti dalam kuesioner dan semua responden juga mengetahui Program *CSR* yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Airmadidi. Sebagian besar responden juga menjawab bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan dari sebelum menerima program dan sesudah menerima program dan bagi mereka yang menerima manfaat biogas merasakan penghematan dari pemakaian biogas yang ada. Jadi dengan adanya program *CSR* PT. Tirta Investama Airmadidi semua responden yakin adanya peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang menerima pendampingan atau manfaat.

Faktor pengaruh peningkatan kesejahteraan dalam kuesioner, yaitu: program inovasi Edukasi Pengelolaan Pertanian Organik, Sampah, dan Home Industri, program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Pertanian organik dan Home Industri, program Penanaman pohon di Kaki Dian. Responden diminta untuk menilai faktor-faktor tersebut berdasarkan persepsi dari masing-masing responden dengan cara memilih pernyataan berdasarkan angka 1-5 dengan penjelasan angka 1 menjelaskan persepsi sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 cukup setuju, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju.

Dari hasil responden diperoleh data bahwa dari semua responden setuju dengan program pemberdayaan ekonomi dan program inovasi edukasi mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan untuk program penanaman pohon tidak semua responden menjawab sangat setuju mempengaruhi peningkatan pendapatan dimana ada sekitar 5 responden yang menjawab setuju dan lain daripada itu menjawab sangat setuju.

Pengujian Model Regresi

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Model persamaan dalam penelitian ini adalah dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad \dots (2)$$

Tabel 4 Hasil Regresi

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 12/04/22 Time: 00:23				
Sample: 1 48				
Included observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.702174	0.095813	7.328577	0.0000
X1	0.103486	0.022522	4.594929	0.0000
X2	0.193065	0.007143	27.02689	0.0000
X3	-0.032531	0.020379	-1.596319	0.1176
R-squared	0.946289	Mean dependent var	0.895833	
Adjusted R-squared	0.942627	S.D. dependent var	0.308709	
S.E. of regression	0.073944	Akaike info criterion	-2.291359	
Sum squared resid	0.240580	Schwarz criterion	-2.135426	
Log likelihood	58.99262	Hannan-Quinn criter.	-2.232432	
F-statistic	258.4001	Durbin-Watson stat	1.945324	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: hasil olahan Eviews

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EViews adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,702174 + 0,103486 X1 + 0,193065 X2 - 0,032531 X3 + e \quad \dots (3)$$

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.942627 atau 94,26 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent (program CSR) dalam hal ini Program Inovasi Edukasi (X1), Program Pemberdayaan Ekonomi (X2), dan Program Penanaman Pohon (X3) secara bersama – sama memiliki pengaruh 94,26% terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F.

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variable tetap. Dari hasil pengolahan menggunakan eviews dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,00000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,01$, Prob (F-statistik) $258,4001 > 0,01$, Yang artinya semua variabel bebas (X1, X2, dan X3) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik T.

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi eviews menunjukkan adanya pengaruh Program Inovasi Edukasi (X1), Program Pemberdayaan Ekonomi (X2), dan Program Penanaman Pohon (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat.

1. Variabel Program Inovasi Edukasi (X₁) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,01$, Nilai probabilitas $X_1 0,0000 < 0,01$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Program Inovasi Edukasi (X₁) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Variabel Program Pemberdayaan Ekonomi (X₂) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,01$, Nilai probabilitas $X_2 0,0000 < 0,01$, berarti H_0 ditolak.

- Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Program Pemberdayaan Ekonomi (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Variabel Program Penanaman Pohon (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1176. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.10$, nilai probabilitas X_3 sebesar $0,1176 > 0,10$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Penanaman Pohon (X_3) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
 4. Dilihat dari koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi (X_2) lebih besar dan signifikan daripada pengaruh Program Inovasi Edukasi (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan Persamaan dan hasil pengujian – pengujian diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Secara parsial, program CSR baik program Inovasi Edukasi dan Program Pemberdayaan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini artinya CSR dari PT Tirta Investama Airmadidi ikut membantu pemerintah daerah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Secara simultan, ketiga program CSR (Program Inovasi Edukasi, Program Pemberdayaan Ekonomi dan Program Penanaman Pohon) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban CSR pada perseroan terbatas harus memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar perusahaan. Juga sejalan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu seperti penelitian Yuniarti dkk (2013) tentang CSR PT Amerta Indah Otsuka di desa Pacarkeling, Aminah Lubis (2017) untuk CSR PT. Perkebunan Nusantara IV melalui program-program kemitraan, Farida (2014) yang menganalisis implementasi CSR terhadap kesejahteraan sosial, Lena Epriliana (2017) tentang CSR dan Kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menopang tujuan dari CSR itu sendiri artinya CSR harus sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan. Fungsi CSR khusus bagi masyarakat menurut Rahmatukkah (2012) adalah CSR akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas sosial daerah di sekitar perusahaan.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa program CSR dari PT Tirta Investama Airmadidi melalui Program Inovasi Edukasi, Program Pemberdayaan Ekonomi dan Program Penanaman Pohon telah memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Program CSR PT Tirta Investama Airmadidi melalui Program Inovasi Edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Program CSR PT Tirta Investama Airmadidi melalui Program Pemberdayaan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Dan program CSR ini terbukti paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Program CSR PT Tirta Investama Airmadidi melalui Program Penanaman Pohon secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
4. Program CSR PT Tirta Investama Airmadidi melalui 3 (tiga) program prioritas yang dipilih penulis secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan di Kabupaten Minahasa Utara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut :

1. Pentingnya CSR bagi masyarakat di sekitar perusahaan membuat perusahaan bisa mengembangkan program-program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk meningkatkan modal sosial dan modal wilayah di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Beberapa program CSR perusahaan harus menopang pencapaian visi dan misi pemerintah daerah terutama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas nasional sampai tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- [2] **Murad, M. (2016).** A review of cost-effectiveness, cost-containment and economics curricula in graduate medical education. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 16(6), 1055-1062.
- [3] **Apresian, S. R., 2016**, Arus Bebas Tenaga Kerja dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN: Ancaman bagi Indonesia?. *Indonesian Perspective*, 1(2), 107-121.
- [4] **Sujarweni, V. W., 2015**, *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustakabaru press, Yogyakarta.
- [5] **Arikunto, S., 2013**, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [6] **Sugiyono, D., 2010**, *Metode Penelitian Kuantitatif DAN R & D*, Alfabeta, Bandung.
- [7] **Ghozali, I., 2005**, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- [8] **GHOZALI, I., 2016**, Analysis of auditor performance by using covariance based structural equation modeling: A study of public accounting firms in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20, 524-537.
- [9] Badan Pusat Statistik, 2022, *Kabupaten Minahasa Utara Dalam Angka 2022*, Badan Pusat Statistik, Minahasa Utara.
- [10] **Yuniarti, E., 2013**, PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATESOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PRICE EARNINGS RATIO SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN SEKTOR UTAMA, *Doctoral dissertation*, Sriwijaya University, Palembang.
- [11] **Lubis, A., 2017**, Analisis Implementasi corporate social Responsibility (Csr) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Sosa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, *Doctoral dissertation*, Pascasarjana UIN, Sumatera Utara.
- [12] **Farida, N., 2014**, Analisis model kepuasan terhadap pembelian ulang. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 5(2).
- [13] **Epriliana, L., 2017**, Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Multi Mart Batanghari Lampung Timur).
- [14] **Lubis, A., 2017**, Analisis Implementasi corporate social Responsibility (Csr) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Sosa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, *Doctoral dissertation*, Pascasarjana UIN, Sumatera Utara.

ANALISIS POLA PENGELOUARAN KEPROTOKOLAN HUMAS PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU SEBELUM DAN DIMASA PANDEMI COVID 19

Eko Chandra Mashudi¹, Een. N Walewangko², Agnes L.Ch.P. Lapian³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: ekochandra42@gmail.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id, agneslapian@unstrat.ac.id

ABSTRAK

Realisasi pendapatan negara tahun 2020 turun 15,9 persen dibanding sebelum COVID, sebaliknya pengeluaran negara naik 12,3 persen. Defisit negara mencapai diatas 6 persen dan pertama kalinya Indonesia mengalami ini dan diperbolehkan oleh UU Nomor 2 tahun 2020 karena situasi yang tidak biasa. Defisit APBN yang sangat besar digunakan untuk menahan kondisi masyarakat dan perekonomian yang mengalami shock luar biasa akibat pandemi COVID 19. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Keprotokolan Humas Pemerintah Kota Kotamobagu. Data series triwulanan terdiri atas anggaran keprokolan di bidang protokol dan bidang komunikasi pimpinan tahun 2018 -2021. Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series model ARIMA . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu baik bidang protokol maupun bidang komunikasi pimpinan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi pandemik yang dialami sejak awal tahun 2020. Pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu baik bidang protokol maupun bidang komunikasi pimpinan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi pandemik yang dialami sejak awal tahun 2020. Pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu di masa pandemi tidak terlalu berfluktuatif dibandingkan pada masa sebelum pandemi COVID 19.

Kata Kunci : pola pengeluaran, humas keprotokolan, covid 19

ABSTRACT

State revenue realization in 2020 fell 15.9 percent compared to before COVID, on the other hand state spending increased 12.3 percent. The state deficit reached above 6 percent and this is the first time Indonesia has experienced this and it is permitted by Law Number 2 of 2020 due to an unusual situation. The very large state budget deficit is used to withstand the conditions of society and the economy which are experiencing extraordinary shock due to the COVID 19 pandemic. This study aims to determine the pattern of public relations expenditures of the Kotamobagu City government protocol during the COVID 19 pandemic.

This study used secondary data taken from the Kotamobagu City Government Public Relations Protocol. The quarterly data series consists of the pro-colonial budget in the field of protocol and leadership communication for 2018-2021. The analytical method used in this study is the ARIMA time series model. The results showed that the pattern of protocol public relations spending for the Kotamobagu City government, both in the protocol and leadership communication areas, was significantly affected by the pandemic conditions that had been experienced since the beginning of 2020. the pandemic that has been experienced since the beginning of 2020. The Kotamobagu City government protocol public relations expenditure pattern during the pandemic did not fluctuate too much compared to the period before the COVID 19 pandemic.

Keywords: expenditure pattern, covid 19

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi COVID 19 yang terjadi di akhir tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2020, terkonfirmasi kasus pertama di Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan PSBB (Pembatasan Skala Besar-Besaran) diikuti dengan Kebijakan Belajar dan Bekerja dari

rumah. Pembatasan aktivitas ini berpengaruh besar pada perekonomian nasional sampai ke daerah.

Penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi sementara belanja meningkat sangat tinggi di masa pandemi COVID 19. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 turun 15,9 persen dibanding sebelum COVID, sebaliknya pengeluaran negara naik 12,3 persen. Defisit negara mencapai diatas 6 persen dan pertama kalinya Indonesia mengalami ini dan diperbolehkan oleh UU Nomor 2 tahun 2020 karena situasi yang tidak biasa. Defisit APBN yang sangat besar digunakan untuk menahan kondisi masyarakat dan perekonomian yang mengalami shock luar biasa akibat pandemi COVID 19.

Selanjutnya, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan *refocusing* anggaran dalam mengakomodasi kebutuhan belanja negara terhadap penanganan COVID 19 di tengah situasi dengan ketidakpastian. Terutama memindahkan pengeluaran pemerintah non Kesehatan menjadi pengeluaran Kesehatan juga pengeluaran non sosial menjadi pengeluaran jaring pengaman sosial. Disamping itu, pemerintah menerapkan *burden sharing* antar kementerian/Lembaga juga dengan pemerintah daerah. Terakhir, pemerintah melakukan sinergi dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kebijakan pemerintah pusat harus direspon oleh pemerintah daerah karena otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. APBD juga menjadi instrument *countercyclical* atau menjadi ekspansif pada saat ekonomi mengalami penurunan. Paket reformasi fiskal juga dilakukan daerah dalam menangani dampak pandemi COVID 19 di Kota Kotamobagu.

Realisasi belanja pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2020 justru mengalami penurunan turun 7,75 persen atau secara parsial belanja langsung turun 9,11 persen dan belanja tidak langsung turun 6,58 persen.

Tabel 1
Realisasi Anggaran Keprotokolan Humas Kota Kotamobagu
Tahun 2018 – 2021.

TRIWULAN	2018	2019	2020	2021
I	306.242.605	149.463.326	120.211.115	60.383.970
II	382.803.256	457.280.824	90.971.635	116.479.905
III	168.433.393	272.314.475	70.021.883	175.434.530
IV	506.023.654	505.977.195	266.900.962	249.400.504
TOTAL	1.363.502.908	1.385.035.820	548.105.595	601.698.909

Sumber : Bapelitbangda Kota Kotamobagu

Anggaran keprotokolan humas juga mengalami penurunan drastis di tahun 2020 dan tahun 2022, karena adanya kebijakan refocusing untuk penanganan dampak pandemi COVID 19. Penelitian ini mengangkat isu pengeluaran pemerintah di keprotokolan Humas Pemerintah. Humas Pemerintah melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Pandemi COVID 19 menjadi isu menarik dikaitkan dengan anggaran di bidang keprotokolan pada masa ini.

Masalah protokoler ditujukan pada keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan pada hal-hal yang mengatur seluruh manusia yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk alokasi anggaran keprotokolan yang menopang kegiatan masyarakat memasuki Era New Normal menjadi menarik untuk dianalisa.

Kebijakan pemerintah Kota Kotamobagu dalam upaya mengembalikan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah pandemi, terutama melalui refocusing anggaran di keprotokolan humas menjadi isu penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul: “Analisis Pola Pengeluaran Keprotokolan Humas Pemerintah Kota Kotamobagu”

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19 ?
2. Apakah terdapat perbedaan pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu sebelum dan dimasa pandemi COVID 19 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu di masa pandemi COVID 19.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu sebelum dan dimasa pandemi COVID 19.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi penting bagi pemerintah daerah Kota Kotamobagu dalam mengambil kebijakan di masa pandemi COVID 19.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan informasi tambahan untuk para peneliti selanjutnya yang tertarik menganalisis isu pandemi COVID 19.
3. Bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami kinerja humas keprotokolan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

Tinjauan Pustaka

Pengeluaran Pemerintah

Dalam konteks ekonomi makro, government expenditure (pengeluaran pemerintah) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan: $Y = C + I + G + (X-M)$ (Dumairy, 2006)¹.

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diimbangi pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Pada hakikatnya APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember (Ahmad Yani, 2013).

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. Tanpa diangarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi yaitu makna bahwa anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Keprotokolan Humas Pemerintah

Pengertian keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata kerja agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Dalam konteks Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah, maka protokol dapat diartikan sebagai norma - norma yang mengatur terciptanya suatu hubungan baik di dalam bangsa dan negara maupun dalam berhubungan dengan bangsa dan negara lain.

Humas Pemerintah merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Humas membantu organisasi berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama.

Humas Pemerintah sama seperti bagian divisi lain didalam perusahaan, untuk memberi kontribusi kepada rencana kerja jangka panjang itu, praktisi humas dapat melakukan langkah-langkah ini:

- 1) Menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar didalam maupun diluar perusahaan. Bahan-bahan itu dapat diperoleh dari kliping media massa dalam kurun waktu tertentu, dengan melakukan penelitian terhadap naskah-naskah pidato pimpinan,bahan yang dipublikasikan perusahaan,serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak yang berkepentingan atau dianggap penting.
- 2) Menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perusahaan yang secara historis. Perusahaan umumnya disertai dengan sikap perusahaan dengan publiknya atau sebaliknya.
- 3) Melakukan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weakness/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/ancaman). Meski tidak perlu menganalisis hal-hal yang berada diluar jangkauannya, seorang praktisi humas perlu melakukan analisis yang berbobot mengenai persepsi luar dan dalam perusahaan atas SWOT yang dimilikinya.

Menurut Rosady Rusloan, fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut :

- a) Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya.
- b) Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat.
- c) Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Junaidi dkk (2020) berjudul *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID 19*. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemerintah daerah mendalilkan kebijakan *Refocusing* anggaran berdasarkan ketentuan. Pengaturan demikian justru berpotensi menjadi celah penggunaan anggaran yang salah, akibat delegasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah.

Penelitian dari Arpaia dan Turrini (2008) dengan judul *Government Expenditure and Economic Growth in the EU: long run Tendencies and Short Term Adjusment* menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara pengeluaran pemerintah dan output potensial di negara-negara UE melalui estimasi kelompok rata-rata gabungan. Hasil menunjukkan bahwa,

lebih dari sampel yang terdiri dari negara-negara UE-15 lebih dari periode 1970-2003, Elastisitas jangka Panjang antara pengeluaran primer yang disesuaikan secara siklis dan output potensial mendekati satu.

Namun, elastisitas jangka panjang menurun drastis selama beberapa dekade dan secara signifikan lebih tinggi dari persatuan di negara-negara yang mengejar ketertinggalan, di negara-negara yang menua cepat, di negara-negara dengan utang rendah, dan di negara-negara dengan aturan numerik yang lemah untuk mengontrol pengeluaran pemerintah. Rata-rata kecepatan penyesuaian pengeluaran pemerintah untuk hubungan jangka panjangnya adalah 3 tahun, tetapi ada perbedaan yang signifikan antar negara. Negara-negara Anglo-Saxon dan Nordik proses penyesuaian yang lebih cepat, sementara penyesuaian di negara-negara Eropa Selatan lebih lambat.

Penelitian dari Barro (1990) dengan judul *Government Spending in a Simple model of Endogenous Growth*, menjelaskan tentang model pertumbuhan endogen yang memasukkan layanan pemerintah yang dibiayai pajak mempengaruhi produksi atau utilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan dan tabungan turun dengan peningkatan pengeluaran tipe utilitas; kedua tingkat pertumbuhan awalnya naik dengan pengeluaran pemerintah yang produktif tetapi kemudian menurun. Sedangkan pajak penghasilan, pertumbuhan dan tabungan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas, hasilnya pengeluaran pemerintah efisien dan produktif.

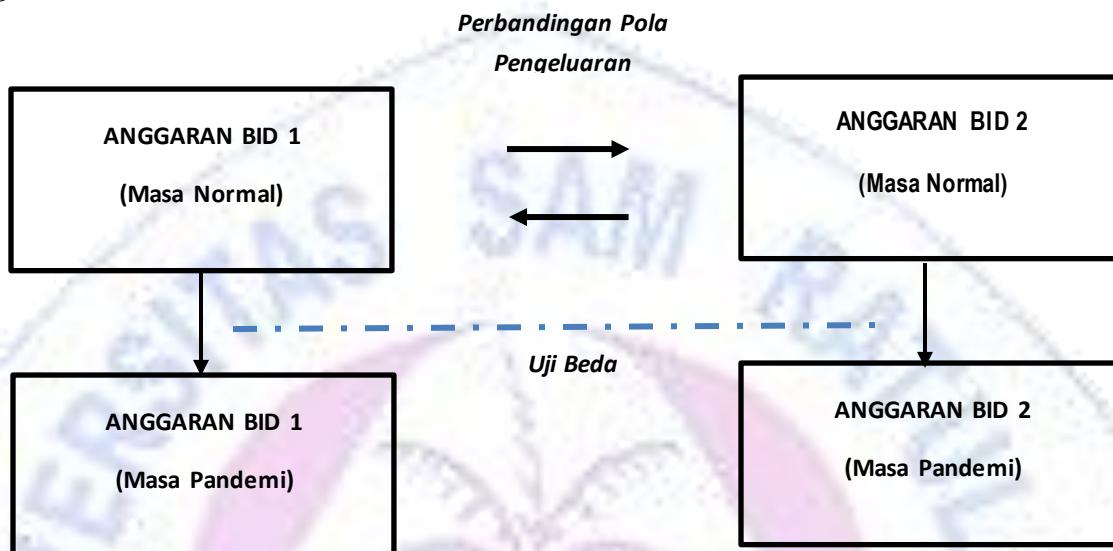
Cooray Arusha (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Government Expenditure, Governance and Economic Growth*, menganalisis peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dengan memperluas fungsi produksi neo klasik. Cooray menggabungkan dimensi pemerintah dari sisi ukuran dan kualitas. Model peningkatan ukuran dan kualitas pemerintah menunjukkan bahwa ukuran dilihat dari pengeluaran pemerintah dan kualitas oleh tata kelola. Estimasi juga dilakukan pada sampel dengan distribusi pendapatan. Hasil empiris menunjukkan bahwa baik ukuran maupun kualitas pemerintah penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dibuktikan bahwa tata kelola yang lebih baik merupakan prioritas bagi peningkatan kinerja pertumbuhan negara-negara.

Studi dari Gray, Cherul & Varoudakis (2007) dengan judul *Fiscal Policy and Economic Growth in Europe and Central Asia : An Overview Policy and Economic Growth : Lesson for Eastern Europe and Central Asia*, mengeksplorasi kebijakan keuangan publik di negara-negara transisi Eropa dan Asia Tengah (ECA) serta kemungkinan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis ini disusun dalam tiga bagian. Bagian satu meninjau sistem keuangan publik di seluruh wilayah ECA sehubungan dengan ukuran keseluruhan, struktur pengeluaran dan pendapatan, dan pola penyesuaian fiskal dari waktu ke waktu. Ini membandingkan pola dan tren di negara-negara ECA dengan negara-negara di ekonomi yang tumbuh cepat di wilayah lain, dan mengeksplorasi kemungkinan hubungan antara variabel keuangan publik dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Bagian kedua melakukan analisis rinci tentang kebijakan pengeluaran publik di empat bidang utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pensiun. Bagian ketiga dari sisi pendapatan anggaran dan melihat secara rinci dua isu yang sangat penting dalam perdebatan kebijakan saat ini: dampak reformasi pajak penghasilan tetap dan tingkat dan struktur pajak terhadap tenaga kerja.

Ginanjar (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia bertujuan untuk (1). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, (2).Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, dan (3). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel dua puluh provinsi yang dipilih dengan Teknik simple random sampling yang kemudian dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok daerah dengan angka IPM tinggi dan kelompok daerah dengan angka IPM rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistik terhadap dua kelompok tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara dua kelompok daerah tersebut. Pada kelompok daerah dengan angka IPM tinggi, terlihat bahwa pengeluaran Kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui

pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok Daerah dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran Pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. Adapun pertumbuhan ekonomi, terlihat menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah, baik kelompok daerah dengan IPM tinggi maupun IPM rendah.

Kerangka Pikir



Hipotesa

Hipotesis yang digunakan dalam uji adalah:

1. H_0 : Tidak ada perbedaan antara pengeluaran pemerintah humas keprotokolan Kota Kotamobagu sebelum dan di masa pandemi COVID 19
2. H_1 : Ada perbedaan antara pengeluaran pemerintah humas keprotokolan Kota Kotamobagu sebelum dan di masa pandemi COVID 19

2. METODE PENELITIAN

Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Keprotokolan Humas Pemerintah Kota Kotamobagu. Data series triwulanan terdiri atas anggaran keprotokolan di bidang protokol dan bidang komunikasi pimpinan tahun 2018 -2021.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Langsung mengambil data yang sudah tersedia di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Melalui studi kepustakaan terutama menggali informasi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.
3. Melalui wawancara mendalam terutama kepada para pengambil keputusan yang menyusun alokasi anggaran di masa pandemic.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Pengeluaran keprotokolan adalah anggaran pengeluaran setiap 3 (tiga) bulanan di bidang protokol dan bidang komunikasi pimpinan keprotokolan humas pada masa pandemi dan sebelum pandemi di Kota Kotamobagu, diukur dalam rupiah.

Metode Analisis Data

Model Time Series ARIMA

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pola pengeluaran keprotokolan humas pada masa pandemi COVID 19 dilakukan dengan analisis model ARIMA. Metode analisis time

series model ARIMA dimana penentuan model sesuai hasil run data yang terbaik. Model *Autoregresif Integrated Moving Average* (ARIMA) adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat.

Model Autoregresif orde satu AR(1)

Autoregressive merupakan sebuah metode peramalan yang menggunakan deret data masa lalu. Model ini menggambarkan sebuah proses acak yang berlangsung dalam variasi waktu tertentu, dimana variabel keluaran hanya tegantung pada nilai proses sebelumnya secara linier. AR(1) adalah salah satu bentuk model autoregressive dimana nilai proses acak sekarang hanya dipengaruhi oleh nilai proses acak satu periode waktu sebelumnya.

Runtun waktu Y_t , dikatakan mempunyai model autogresif orde pertama atau AR (1) jika nilai saat ini dari runtun waktu yaitu Y_t , dapat dinyatakan sebagai fungsi linier dari nilai satu periode waktu sebelumnya yaitu Y_{t-1} dan white noise α_t . Model ini dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} Y_t - \mu &= \phi(Y_{t-1} - \mu) + \alpha_t \\ Y_t &= (1-\phi)\mu + \phi Y_{t-1} + \alpha_t \\ &= \delta + \phi Y_{t-1} + \alpha_t \\ &= \delta + \phi_1 B Y_{t-1} + \alpha_t \end{aligned}$$

$$(1 - \phi_1 B) Y_t = \delta + \alpha_t$$

Dimana :

- Y_t : Observasi runtun waktu stasioner pada saat t
- Y_{t-1} : Observasi runtun waktu stasioner pada saat $t-1$
- μ : Mean dari runtun stasioner
- δ : Konstanta
- ϕ_1 : Parameter dari model Autoregresif
- α_t : Runtun *white noise*

Correlogram atau fungsi autokorelasi pada sampel untuk model AR (1) akan memperlihatkan autokorelasi yang menurun secara eksponensial menuju nol seiring bertambahnya *lag*.

Model Autogresif orde dua AR (2)

Suatu runtun waktu saat ini dikatakan mempunyai model autoregresif orde dua jika runtun waktu saat ini dipengaruhi oleh runtun waktu dua periode sebelumnya. Oleh karena itu Y_t dapat dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} (Y_t - \mu) &= \phi_1 (Y_{t-1} - \mu) + \phi_2 (Y_{t-2} - \mu) + \alpha_t \\ Y_t &= (1 - \phi_1 - \phi_2)\mu + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \alpha_t \\ Y_t &= \delta + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \alpha_t \\ &= \delta + \phi_1 B Y_{t-1} + \phi_2 B^2 Y_{t-2} + \alpha_t \end{aligned}$$

$$(1 - \phi_1 B + \phi_2 B^2) Y_t = \delta + \alpha_t$$

Dimana :

- Y_t : Observasi runtun waktu stasioner pada saat t
- Y_{t-1} : Observasi runtun waktu stasioner pada saat $t-1$
- Y_{t-2} : Observasi runtun waktu stasioner pada saat $t-2$
- ϕ_1, ϕ_2 : Parameter dari model Autoregresif
- α_t : Runtun *white noise*
- δ : Konstanta
- μ : Mean dari runtun waktu

Fungsi autokorelasi parsial pada sampel untuk model AR (2) akan memperlihatkan autokorelasi tidak bernilai nol pada saat *lag 1* dan *lag 2*, tetapi untuk lag berikutnya akan bernilai nol.

Model Autoregresif orde p atau AR (P) dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} (Y_t - \mu) &= \phi_1 (Y_{t-1} - \mu) + \phi_2 (Y_{t-2} - \mu) + \dots + \phi_p (Y_{t-p} - \mu) + \alpha_t \\ Y_t &= (1 - \phi_1 - \phi_2 - \dots - \phi_p)\mu + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \alpha_t \\ &= \delta + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \alpha_t \end{aligned}$$

Dengan :

- Y_{t-j} : Observasi runtun stasioner pada saat $t-j$ dimana $j = 0, 1, 2, \dots, p$
 ϕ_j : Parameter autoregresif ke- j
 α_t : Runtun *white noise*
 μ : Mean dari runtun waktu
 δ : Konstanta

Model moving average orde satu atau MA (1)

Runtun waktu Y_t , dikatakan model *moving average* orde pertama jika Y_t dinyatakan sebagai fungsi linier dari *white noise* pada saat t , yaitu α_t , dan satu periode sebelumnya, yaitu α_{t-1} . Secara matematis, model *moving average* orde pertama, MA (1) ditulis sebagai:

$$\begin{aligned}
 (Y_t - \mu) &= \alpha_t - \theta_1 \alpha_{t-1} \\
 &= \alpha_t - \theta_1 B \alpha_t \\
 &= (1 - \theta_1 B) \alpha_t \\
 &= \theta(B) \alpha_t
 \end{aligned}$$

Dengan :

- Y_t : Observasi pada saat t
 α_t, α_{t-1} : *White noise* pada saat t dan $t-1$
 θ_1 : Parameter *Moving Average*
 μ : Mean dari Runtun waktu

Correlogram atau fungsi autokorelasi pada sampel untuk model MA (1) akan memperlihatkan autokorelasi tidak bernilai nol pada saat *lag* 1 namun untuk *lag* berikutnya akan bernilai nol.

Model Moving Average model Dua atau MA (2)

Suatu runtun waktu Y_t dikatakan model *moving average* orde dua jika Y_t dinyatakan sebagai fungsi linier dari *white noise* pada saat ini dan pada satu serta dua periode sebelumnya. Secara matematis model moving average orde ke dua ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 (Y_t - \mu) &= \alpha_t - \theta_1 \alpha_{t-1} - \theta_2 \alpha_{t-2} \\
 Y_t &= \mu + \alpha_t - \theta_1 \alpha_{t-1} - \theta_2 \alpha_{t-2} \\
 &= \mu + \alpha_t - \theta_1 B \alpha_t - \theta_2 B^2 \alpha_t \\
 &= \mu + (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2) \alpha_t
 \end{aligned}$$

Dengan :

- Y_t : Observasi pada saat t
 $\alpha_t, \alpha_{t-1}, \alpha_{t-2}$: *White noise* pada saat t dan $t-1, t-2$
 μ : Mean dari Runtun waktu Y_t

Untuk membedakan model *moving average* dengan model lainnya maka dapat dilihat dari autokorelasi dan autokorelasi parsial.

Fungsi autokorelasi parsial pada sampel untuk model MA (2) memperlihatkan autokorelasi parsial akan menurun secara ekspondensial menuju nol seiring bertambahnya *lag*.

Model Moving Average orde tinggi

Model moving average orde q secara umum dinyatakan sebagai:

$$\begin{aligned}
 (Y_t - \mu) &= \alpha_t - \theta_1 \alpha_{t-1} - \theta_2 \alpha_{t-2} - \dots - \theta_q \alpha_{t-q} \\
 &= \alpha_t - \theta_1 B \alpha_t - \theta_2 B^2 \alpha_t - \dots - \theta_q B^q \alpha_t \\
 &= (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q) \alpha_t
 \end{aligned}$$

Dengan

- Y_t : Observasi pada saat t
 θ : Parameter *Moving Average*
 α_t : *White noise* pada saat t
 $\alpha_{t-1}, \dots, \alpha_{t-q}$: *White noise* pada saat lampau

Uji Beda

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pola pengeluaran keprotokolan humas dimasa pandemi COVID 19 dan sebelumnya, menggunakan analisis Uji Beda T-Test

Paired Sample Test. Uji t berpasangan merupakan salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan.

Rumus :

$$t_{hit} = \frac{\bar{d}}{sd / \sqrt{n}}$$

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

Dimana :

- t = nilai distribusi t
- Sd = standar deviasi
- n = jumlah pengamatan berpasangan
- d = perbedaan antara data berpasangan

Paired Sampel T Test atau uji dua sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda (H_0) antara dua variabel. Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan. Jika terdapat perbedaan pada hasil uji tersebut, maka kemudian dilihat rata-rata mana yang lebih tinggi dengan melihat nilai mean pada paired samples statistik, atau pada t hitung.

T hitung positif berarti rata-rata abnormal pengeluaran pemerintah humas keprotokolan sebelum pandemi COVID 19 lebih tinggi daripada di masa pandemi, dan sebaliknya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis pola pengeluaran humas keprotokolan bidang protokol dan bidang komunikasi pimpinan sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19 yang dimulai pada awal tahun 2020, menggunakan model ARIMA (*Autoregresif Integrated Moving Average*) :

1. Anggaran Bidang Protokol (X1)

Langkah 1 : Melakukan Uji Stasioneritas menggunakan Uji ADF

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.464540	0.0296
Test critical values:		
1% level	-4.121990	
5% level	-3.144920	
10% level	-2.713751	

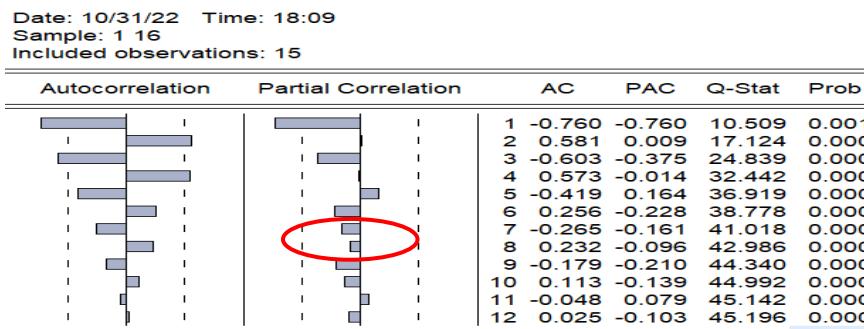
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 12

Hasil Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) menunjukkan bahwa data stasioner saat D(X1) atau *1st difference* dengan probabilitas 2,96 % atau signifikan pada level $\alpha=5\%$

Langkah 2 : Melihat pola fungsi **autokorelasi (ACF)** dan **autokorelasi parsial (PACF)** dari data X1.

Plot autokorelasi (ACF) dan plot autokorelasi parsial (PACF), terlihat bahwa kedua gambar mengalami cut off (turun drastis). Pada plot PACF terlihat bahwa pada lag 1 signifikan dan cutoff pada lag 1.



Langkah 3 : Mencari Model Terbaik

Dependent Variable: X1
 Method: Least Squares
 Date: 10/31/22 Time: 18:31
 Sample (adjusted): 2 16
 Included observations: 15 after adjustments
 Convergence achieved after 58 iterations
 MA Backcast: OFF (Roots of MA process too large)

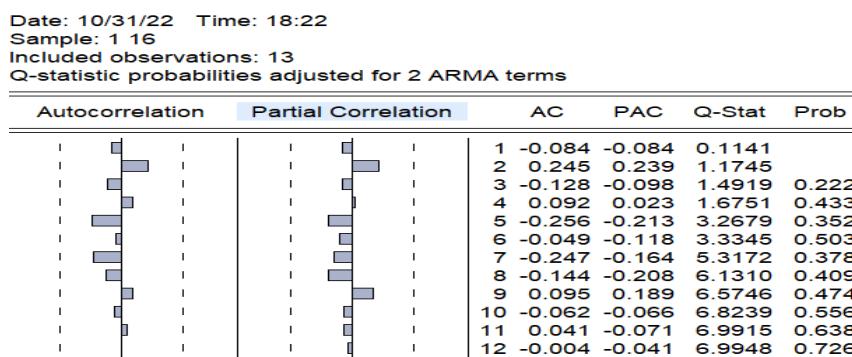
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.94E+08	1121901.	173.2625	0.0000
D01	-1.06E+08	9552807.	-11.09891	0.0000
AR(1)	-0.974338	0.391929	-2.486009	0.0302
MA(1)	-1.917925	0.497216	-3.857325	0.0027
R-squared	0.848056	Mean dependent var	1.44E+08	
Adjusted R-squared	0.806617	S.D. dependent var	93699146	
S.E. of regression	41204535	Akaike info criterion	38.12917	
Sum squared resid	1.87E+16	Schwarz criterion	38.31799	
Log likelihood	-281.9688	Hannan-Quinn criter.	38.12716	
F-statistic	20.46504	Durbin-Watson stat	1.078664	
Prob(F-statistic)	0.000083			

Hasil run data menggunakan eviews menunjukkan bahwa model time series terbaik adalah ARIMA (1,1,1) atau data didifferencing 1 kali dengan Autoregresif Orde Satu atau AR(1) dan Moving Average Orde Satu atau MA(1). Dengan Nilai AIC (Akaike Info Criterion) sebesar 38.12917.

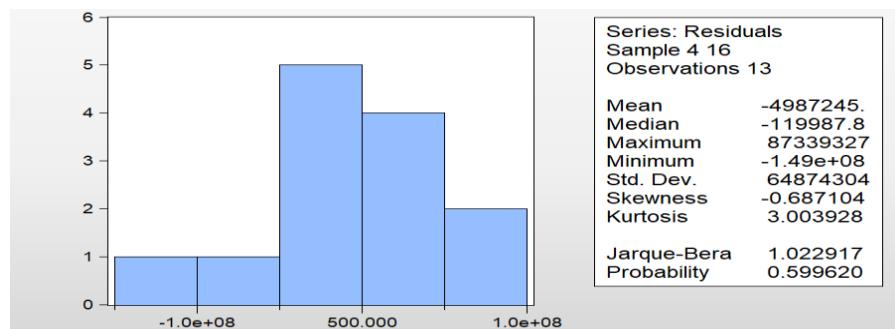
Dan dengan menggunakan Dummy Variabel terbukti terdapat perbedaan pola pengeluaran bidang protokol sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19.

Langkah 4 : Pemeriksaan Diagnostik Residual

Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui model yang baik bisa dilihat dari signifikansi parameter dan residualnya. Jika semua dugaan parameternya signifikan dan residualnya *white noise*, maka modelnya dapat dikatakan baik dan sebaliknya. Salah satu cara untuk melihat *white noise* dapat diuji melalui **koreogram ACF dan PACF** dari residual.

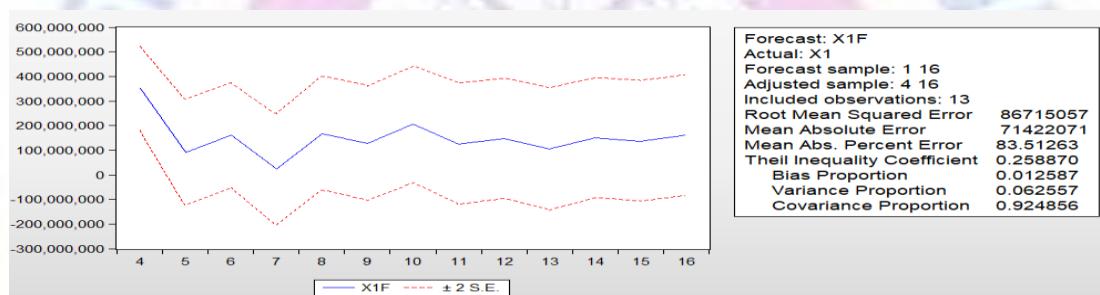


Dari output diatas terlihat bahwa dari lag 1 sampai ke 12 tidak ada lag yang signifikan. Artinya tidak ada korelasi antar residual, residual sudah homogen dan tidak ada pola pada residual. Hal ini menandakan bahwa residual sudah *white noise* sehingga bisa dikatakan model bisa dianalisa lebih lanjut.



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa residual sudah normal dibuktikan dengan hasil uji Jarque-Bera dimana $p\text{-value} = 0.599 > \alpha = 0.05$ yang artinya residual sudah berdistribusi normal.

Langkah 5 : Melakukan Peramalan



Pola pengeluaran jangka pendek masih memiliki dampak dari pandemi tidak terlalu berfluktuatif, memiliki bias proportion kecil (0,012587) dan Variance Proportion juga kecil (0,062557).

Bidang Komunikasi Pimpinan

Langkah 1 : Melakukan Uji Stasioneritas menggunakan Uji ADF

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.464540	0.0296
Test critical values:		
1% level	-4.121990	
5% level	-3.144920	
10% level	-2.713751	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

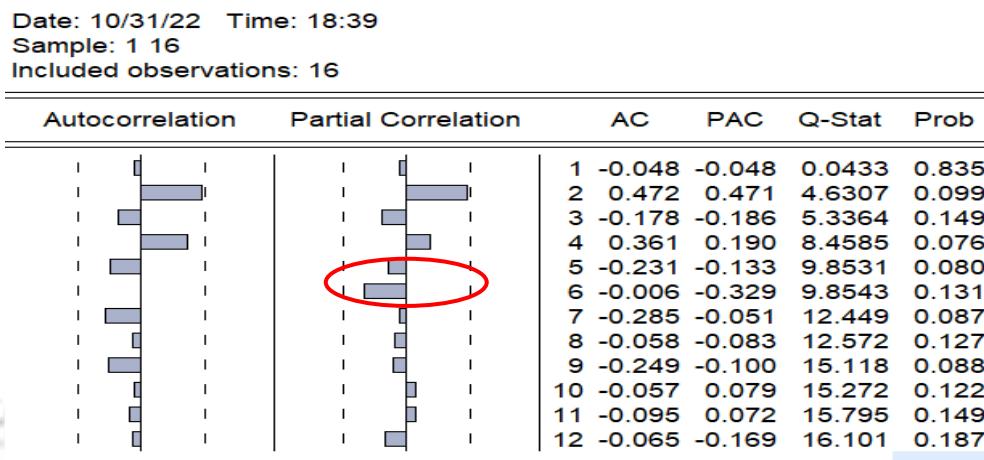
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X2,2)
Method: Least Squares
Date: 10/31/22 Time: 18:38
Sample (adjusted): 5 16

Hasil Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) menunjukkan bahwa data stasioner saat $D(X1)$ atau *1st difference* dengan probabilitas 2,96 % atau signifikan pada level $\alpha = 5\%$

Langkah 2 : Melihat pola fungsi **autokorelasi (ACF)** dan **autokorelasi parsial (PACF)** dari data X1.

Plot autokorelasi (ACF) dan plot autokorelasi parsial (PACF), terlihat bahwa kedua gambar mengalami kenaikan drastis. Pada plot PACF terlihat bahwa pada lag 1 signifikan dan naik pada lag 1.



Langkah 3 : Mencari Model Terbaik

Dependent Variable: X2
 Method: Least Squares
 Date: 10/31/22 Time: 18:41
 Sample (adjusted): 2 16
 Included observations: 15 after adjustments
 Convergence achieved after 68 iterations
 MA Backcast: OFF (Roots of MA process too large)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.30E+08	791636.4	163.7795	0.0000
D01	-69955423	6631694.	-10.54865	0.0000
AR(1)	-0.974059	0.395228	-2.464548	0.0314
MA(1)	-1.962891	0.515343	-3.808902	0.0029
R-squared	0.851262	Mean dependent var	95789350	
Adjusted R-squared	0.810697	S.D. dependent var	62466098	
S.E. of regression	27178371	Akaike info criterion	37.29692	
Sum squared resid	8.13E+15	Schwarz criterion	37.48573	
Log likelihood	-275.7269	Hannan-Quinn criter.	37.29491	
F-statistic	20.98514	Durbin-Watson stat	1.055164	
Prob(F-statistic)	0.000074			

Hasil run data menggunakan eviews menunjukkan bahwa model time series terbaik adalah ARIMA (1,1,1) atau data didifferencing 1 kali dengan Autoregresif Orde Satu atau AR(1) dan Moving Average Orde Satu atau MA(1). Dengan Nilai AIC (Akaike Info Criterion) sebesar 37.29692.

Dan dengan menggunakan Dummy Variabel terbukti terdapat perbedaan pola pengeluaran bidang protokol sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19.

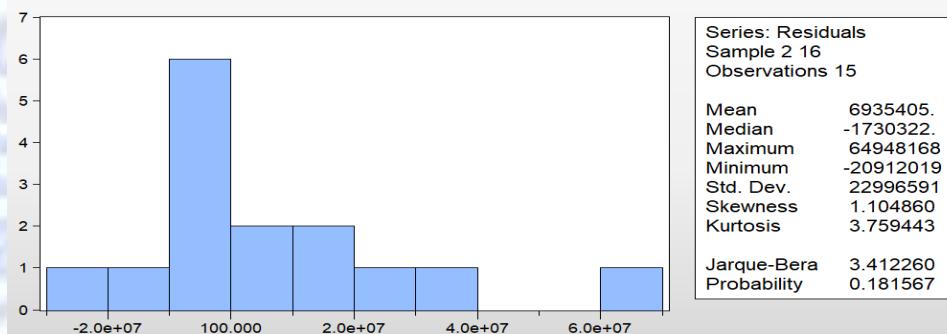
Langkah 4 : Pemeriksaan Diagnostik Residual

Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui model yang baik bisa dilihat dari signifikansi parameter dan residualnya. Jika semua dugaan parameteranya signifikan dan residualnya *white noise*, maka modelnya dapat dikatakan baik dan sebaliknya. Salah satu cara untuk melihat *white noise* dapat diuji melalui **koreogram ACF dan PACF** dari residual.

Date: 10/31/22 Time: 18:46
 Sample: 1 16
 Included observations: 15

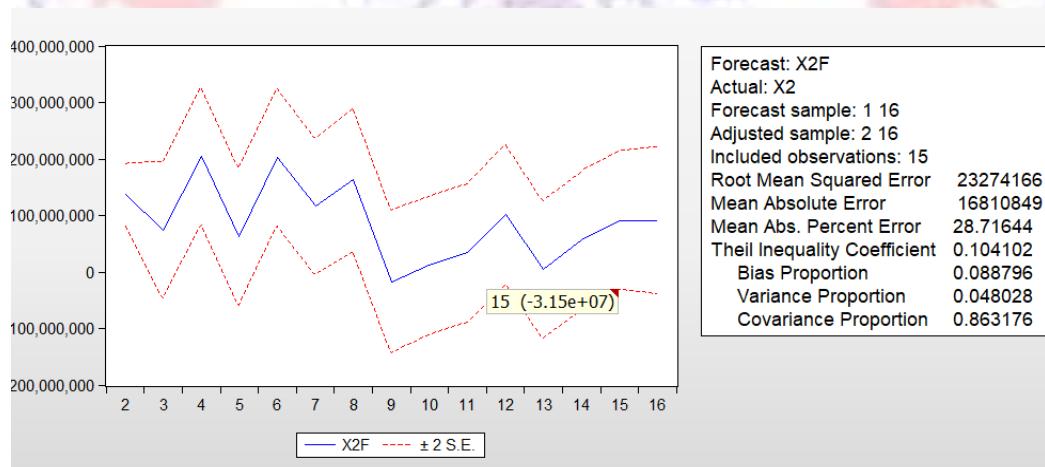
	Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob	
1					1	0.278	0.278	1.4052	0.236
2					2	-0.151	-0.247	1.8504	0.396
3					3	-0.162	-0.048	2.4114	0.492
4					4	-0.168	-0.156	3.0674	0.547
5					5	-0.218	-0.192	4.2757	0.510
6					6	-0.152	-0.123	4.9263	0.553
7					7	-0.121	-0.198	5.3934	0.612
8					8	0.018	-0.037	5.4046	0.714
9					9	0.058	-0.123	5.5485	0.784
10					10	0.036	-0.104	5.6139	0.847
11					11	0.034	-0.092	5.6887	0.893
12					12	0.025	-0.112	5.7432	0.928

Dari output diatas terlihat bahwa dari lag 1 sampai ke 12 tidak ada lag yang signifikan. Artinya tidak ada korelasi antar residual, residual sudah homogen dan tidak ada pola pada residual. Hal ini menandakan bahwa residual sudah *white noise* sehingga bisa dikatakan model bisa dianalisa lebih lanjut.



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa residual sudah normal dibuktikan dengan hasil uji Jarque-Bera dimana p-value= 0.181 > alpha 0.05 yang artinya residual sudah berdistribusi normal.

Langkah 5 : Melakukan Peramalan



Pola pengeluaran jangka pendek masih memiliki dampak dari pandemi tidak terlalu berfluktuatif, memiliki bias proportion kecil (0,088796) dan Variance Proportion juga kecil (0,048028).

Analisis Uji Beda

Membuktikan terdapat perbedaan pengeluaran humas keprotokolan dengan menggunakan uji beda rata-rata.

Hasil uji beda anggaran bidang protokol

Test for Equality of Means of X1			
Categorized by values of X1			
Date: 10/31/22 Time: 23:00			
Sample: 1 16			
Included observations: 16			
Method	df	Value	Probability
Anova F-test	(3, 12)	53.66131	0.0000
Welch F-test*	(3, 3.57143)	245.0072	0.0001

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance			
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	3	1.16E+17	3.86E+16
Within	12	8.63E+15	7.19E+14
Total	15	1.24E+17	8.29E+15

Category Statistics				
X1	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
[0, 100000...	6	60753183	20199374	8246360.
[10000000...	6	1.44E+08	33443796	13653372
[20000000...	2	2.52E+08	31598156	22343270
[30000000...	2	3.04E+08	19710.88	13937.70
All	16	1.46E+08	91074343	22768586

Terlihat pada tabel Test for Equality of Means of X1 nilai F hitung **Anovae test** sebesar 0,000 dan **Welch test** sebesar 0,0001 artinya signifikan karena lebih kecil dari $\alpha = 1\%$. Disimpulkan H0 ditolak, dengan demikian analisis uji beda rata-rata anggaran bidang protokol sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19 adalah berbeda secara signifikan.

Hasil uji beda anggaran bidang komunikasi pimpinan

Test for Equality of Means of X2			
Categorized by values of X2			
Date: 10/31/22 Time: 22:56			
Sample: 1 16			
Included observations: 16			
Method	df	Value	Probability
Anova F-test	(4, 11)	74.29861	0.0000
Welch F-test*	(4, 3.84001)	286.5876	0.0001

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance				
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.	
Between	4	5.33E+16	1.33E+16	
Within	11	1.97E+15	1.79E+14	
Total	15	5.53E+16	3.69E+15	

Category Statistics				
X2	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
[0, 500000...	5	36645481	10729502	4798379.
[5000000...	4	74273175	17548964	8774482.
[10000000...	3	1.13E+08	8529461.	4924487.
[15000000...	2	1.68E+08	21065437	14895514
[20000000...	2	2.02E+08	13140.59	9291.800
All	16	97458581	60716229	15179057

Terlihat pada tabel Test for Equality of Means of X1 nilai F hitung **Anovae test** sebesar 0,000 dan **Welch test** sebesar 0,0001 artinya signifikan karena lebih kecil dari $\alpha = 1\%$. Disimpulkan H0 ditolak, dengan demikian analisis uji beda rata-rata anggaran bidang protokol sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19 adalah berbeda secara signifikan.

Pembahasan

Pandemi COVID 19 yang terjadi di akhir tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2020 mempengaruhi pola pengeluaran pemerintah karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk menangani dampak C19. Kebijakan ini juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah di humas keprotokolan Kota Kotamobagu. Berdasarkan Analisa time series model ARIMA (1,1,1) menunjukkan bahwa pola pengeluaran humas keprotokolan bidang protokol dan komunikasi pimpinan dipengaruhi oleh pengeluaran triwulan sebelumnya dan error dari triwulan sebelumnya. Alokasi dana triwulan II mempengaruhi alokasi dana triwulan III, begitu juga dengan kualitas penggunaan anggaran di triwulan II mempengaruhi kualitas penggunaan anggaran di triwulan III.

Terbukti sejak pandemi terdapat perbedaan pola pengeluaran bidang protokol dan bidang komunikasi pimpinan humas keprotokolan Kota Kotamobagu, bukan hanya jumlahnya yang turun namun alokasi anggarannya pun lebih menopang pemenuhan standar kesehatan dimasa pandemi COVID 19.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu baik bidang protokol maupun bidang komunikasi pimpinan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi pandemik yang dialami sejak awal tahun 2020.
2. Terdapat perbedaan pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu baik bidang protokol maupun bidang komunikasi pimpinan sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19.
3. Pola pengeluaran humas keprotokolan bidang protokol dan komunikasi pimpinan dipengaruhi oleh pengeluaran triwulan sebelumnya dan error dari triwulan sebelumnya. Alokasi dana triwulan t mempengaruhi alokasi dana triwulan t+1, begitu juga dengan kualitas penggunaan anggaran di triwulan t mempengaruhi kualitas penggunaan anggaran di triwulan t+1.
4. Pola pengeluaran humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu di masa pandemi tidak terlalu berfluktuatif dibandingkan pada masa sebelum pandemi COVID 19.

Saran

1. Pemerintah daerah Kota Kotamobagu harus merencanakan dengan baik program dan kegiatan prioritas meminimalkan ketidakpastian pandemi COVID 19 terhadap alokasi anggaran di humas keprotokolan.
2. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi anggaran baik di bidang protokol maupun di bidang komunikasi pimpinan harus didasarkan pada informasi yang terjadi di triwulan sebelumnya, sehingga bisa meminimalkan bias optimalisasi penggunaan anggaran di humas keprotokolan pemerintah Kota Kotamobagu di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- **A. Muri Yusuf, 2014.** *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Arpaia, Alfonso and Alessandor Turrini. 2008.** *Government expenditure and economic growth in the EU: long-run tendencies and short-term adjustment*. Economic Papers 300, European Commision. ISBN 978-92-79-08225-2
- Barro, Robert J. 1990.** *Government spending in a simple model of endogenous growth*. Journal of Political Economy, Vol. 98, Nomor 5 Part 2, JSTOR.
- Cooray, Arusha V. 2009.** *Government expenditure, governance and economic growth*. Comparative Economic Studies, 51(3), 401-418.

- Gray, Cheryl. 2007.** *Fiscal Policy and Economic Growth in Europe and Central Asia: An Overview.* In *Fiscal Policy and Economic Growth: Lessons for Eastern Europe and Central Asia.* Washington DC. OKR (Open Knowledge Repository) The World Bank
- Ginanjar Aji Nugroho,2016,** Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Indonesia, Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. I Nomor 1, pp 39-50.
- Greene, William H. 2011.** Econometric Analysis. 7th ed. Prentice Hall.
- Junaidi M, Sukarna K dkk, (2020),** Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja daerah Dalam Penanganan COVID 10, Halu Oleo Law Review, Vol 3, Issues 2, pp 145 – 156.
- Mankiw, N. Gregory. 2014.** Principles of Economics. 7th ed. Cengage Learning.
- Mohammad Mahsun. 2013.** *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Nabilatul A, 2018,** *Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar,* Resipatory IAIN Batusangkar.
- Parkin, Michael. 2013.** Economics. 11th ed. Pearson.
- Rahayu Ani Sri. 2010.** *Pengantar Kebijakan Fiskal.* Bumi Aksara. Jakarta
- Supardan H, 2020,** *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah,* Media Nusa Creative, Malang.
- Sunyoto, D. 2012.** *Prosedur Uji Hipotesis untuk riset ekonomi.* Yogyakarta: Alfabeta. Yogyakarta
- Wang H, Otto N & Dsane Selby, 2017,** *Ghana National Health Insurance Scheme Improving Financial Sustainability Based on Expenditure Review,* The World Bank, Wahington DC 20433. ISBN 978-1-4648-1117-3.

ANALISIS PENGARUH STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI KOTAMOBAGU

Sofyan Mokoginta¹, Agnes L. Ch. P. Lopian², George M. V. Kawung³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: sofyanmokoginta23@gmail.com, agneslapian@unsrat.ac.id,
georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu, apakah Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu dan apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu?

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data dimaksud berasal dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Kotamobagu, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*).

Hasil penelitian membuktikan bahwa standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM serta berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Kotamobagu

Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out whether the Minimum Service Standards (the fields of Education, Health and Infrastructure) have an effect on Economic Growth in Kotamobagu City, whether the Minimum Service Standards (the fields of Education, Health and Infrastructure) have an effect on Community Welfare in Kotamobagu City and whether Economic Growth has an effect on Community Welfare in Kotamobagu City?

The data used for this study are secondary data. The data comes from relevant agencies, namely the Central Statistics Agency (BPS) of Kotamobagu City, the Planning, Research and Development Agency (Bappelitbang) of Kotamobagu City, and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD) of Kotamobagu City. The method used in this study is path analysis.

The results of the study prove that minimum service standards in the fields of education, health and infrastructure have a positive and significant effect on increasing economic growth, HDI and have a positive effect on improving the welfare of the community in Kotamobagu City.

Keywords: Minimum Service Standards (SPM), community welfare, economic growth

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah politik melalui sebuah keputusan. Setelah pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan. Di sini terdapat konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah kekuatan yang digunakan untuk melaksanakan sebuah keputusan. Ekonomi Publik dalam peran pertama pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam *full employment* (kesempatan kerja penuh) dan harga-harga stabil. Ini adalah topik dalam Ekonomi Makro. Peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah

dapat melaksanakan peran ini secara langsung (misalnya dalam belanja barang untuk keperluan pertahanan atau pendidikan), atau secara tidak langsung yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya. Peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik-ulur (*trade off*) antara kemerataan dan efisiensi. Ilmu Ekonomi Publik berfokus pada telaahan tentang dua peran terakhir di antara tiga peran pemerintah menurut pendapat Musgrave itu.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Menurut Damanhuri dan Findi (1995), Sumber daya manusia adalah modal yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, aspek yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian dalam konteks pembangunan SDM, ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara utuh. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan keadaan kehidupan di masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Menurut Sukirno (2014) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2012-2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2012	6,96
2013	7,06
2014	6,7
2015	6,52
2016	6,63
2017	6,79
2018	6,66
2019	6,13
2020	0,2
2021	4,2

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

SPM adalah salah satu alat pengendali dimana pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah Daerah. SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Standar Pelayanan Minimal diharapkan menjadi pedoman dan pertimbangan untuk semua Pemerintah Daerah dan tetap mempertahankan keunikan dari setiap daerah, serta sebagai indikator peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Standar Pelayanan Minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu bagi Pemerintah Daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Bagi masyarakat SPM dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Oentarto, 2004). Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Apakah Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
2. Apakah Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

1. Pemerintah daerah Kota Kotamobagu dalam mengambil kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Peneliti selanjutnya yang akan menganalisis fenomena yang sama baik di Kota Kotamobagu maupun di daerah penelitian lainnya.

Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012) Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenang, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhnya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan keadaan kehidupan di masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Teori Standar Pelayanan Minimal

Tolak ukur yang dapat dianggap sangat pokok untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Menurut Putra et al (2017), indikator SPM dijadikan sebagai tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan. Menurut BPS (2015), manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep ini menjadi cikal bakal munculnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan tipe dan kualitas pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dan bisa diakses oleh semua penduduk. Pemerintah Pusat juga diwajibkan untuk menyediakan dukungan, finansial atau teknis, kepada Pemerintah daerah dalam menyediakan layanan tersebut. Oleh karena itu, ada keseimbangan di antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Standar Pelayanan Minimal diharapkan menjadi pedoman dan pertimbangan untuk semua Pemerintah Daerah dan tetap mempertahankan keunikan dari setiap daerah, serta sebagai indikator peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Kurniawan, 2011).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Debby Rotinsulu, Antonius Luntungan dan Jacline Sumual (2017)

Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Kota/Kabupaten Se Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri dan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut dengan objek penelitian yaitu kota/kabupaten di Sulawesi Utara. Variabel yang di teliti antara lain adalah Belanja Pemerintah Daerah yaitu Pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah dikabupaten/Kota yang terdiri atas Belanja langsung dan tidak langsung yang diukur dalam Satuan Rupiah/Tahun. Dari hasil estimasi regresi berganda, pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu di pengaruhi oleh variabel belanja pemerintah dan luas lahan. Artinya, dengan adanya pertambahan belanja pemerintah akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu sehingga mampu mendorong pertumbuhan yang ada. Begitu juga dengan luas lahan sudah mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu. Variabel investasi memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Tetapi belanja pemerintah dan luas lahan di Kota Kotamobagu memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan tidak memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kota Kotamobagu untuk variabel belanja pemerintah, investasi dan luas lahan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan tetapi belum mampu mendorong dan memberikan kontribusi yang signifikan. Variabel belanja pemerintah, investasi dan luas lahan memberikan pengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado dan tidak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Rizki Wardani, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Habib Muhsin Syafingi dan Suharso (2019).

Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan SPM Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 belum tercapai sepenuhnya yaitu kurangnya aspek disposisi dari pelaksana, kurangnya sumber daya yang meliputi SDM, anggaran, dan fasilitas serta struktur birokrasi yang belum efektif. Konsep Kesejahteraan pada penelitian ini diukur dari Indikator Angka Harapan Hidup.

Analisis Implementasi Kebijakan SPM difokuskan pada beberapa aspek implementasi salah satunya aspek Sumber Daya yang terdiri dari SDM, Anggaran dan Fasilitas. Pada aspek sumber daya anggaran, Menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji. Dalam prakteknya sudah teralaksanakan. Namun Alokasi anggaran SPM terhadap APBD yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, untuk SPM Kesehatan hanya mendapat 0,76%. Ditemukan kelemahan dari ketentuan Anggaran untuk SPM Kesehatan, yaitu tidak ada peraturan yang mengatur tentang Minimal jumlah anggaran yang harus diterima. penganggaran untuk SPM Kesehatan sendiri masih kurang dan belum dapat memaksimalkan proses pemenuhan Indikator Kinerja SPM Kesehatan yang harus 100% setiap tahunnya.

Penelitian Christian Lendy Koyongian, Paulus Kindangen, George M.V.Kawung (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Teknis analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda/*Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial atau sendiri dengan Uji t, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado sedangkan variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh dan signifikan. Hasil analisis secara simultan atau bersama-sama dengan Uji F menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Penelitian Eka Pratiwi Lumbantoruan dan Paidi Hidayat (2014).

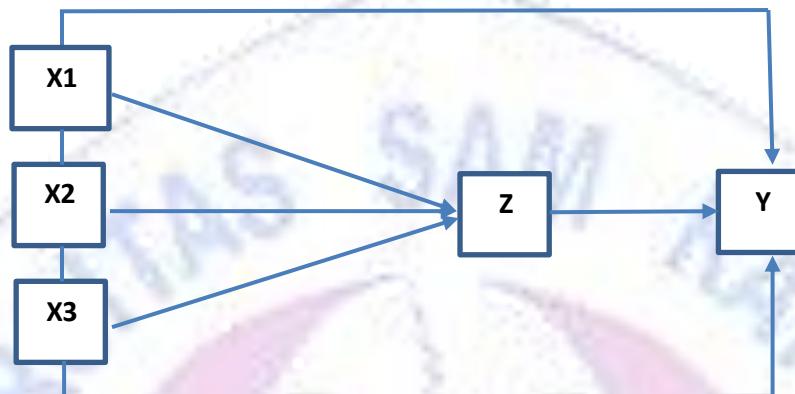
Penelitiannya berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Provinsi-provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pola dan hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi di Indonesia selama periode 2004-2011 dengan menggunakan Tipologi Klassen untuk melihat pola dan kointegrasinya metode uji untuk melihat hubungan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan Klassen Tipologinya, ada 8 provinsi yang masuk kategori fast forward dan fast growth (kuadran I). Untuk kategori daerah cepat tumbuh (kuadran II) ada 12 provinsi dan daerah dalam kategori maju tapi tertekan (kuadran III) sebesar 6 provinsi. Untuk kategori relatif tertinggal (kuadran IV) ada 7 provinsi. Sementara itu, hasil uji kointegrasi menunjukkan keseimbangan jangka Panjang hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Indonesia.

Penelitian Ervin Nora Susanti dan Ramon Zamora (2019).

Penelitian mereka berjudul Causality Analysis of Economic Growth on Human Development Index in The Riau Island Province. Salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan adanya pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan asset penting dalam kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memungkinkan diwujudkannya pembangunan manusia, sebaliknya sumberdaya manusia yang berkualitas pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Riau. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

Granger Causality. Metode ini merupakan metode ekonometrika untuk melihat hubungan dua arah antara dua variabel, dalam penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series pendapatan perkapa penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi dan data IPM selama kurun waktu tahun 2004-2018. Berdasarkan hasil uji Granger Causality diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM di Provinsi Kepulauan Riau.

Kerangka Pikir



Sumber: *Kajian Teori 2022*

Hipotesis Penelitian

1. Diduga terdapat pengaruh Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Diduga terdapat pengaruh Standar Pelayanan Minimal (bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu.
3. Diduga terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kotamobagu.

2. METODE PENELITIAN

Data Dan Sumber Data

1. Data pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kota Kotamobagu.
2. Data Indeks Pembangunan Manusia Kota Kotamobagu
3. Data pengeluaran pemerintah untuk 3 (tiga) perangkat daerah yang memiliki SPM

Sumber data berasal dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Kotamobagu, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran langsung ke instansi yang memiliki data dan informasi terkait SPM, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Studi Kepustakaan, pengumpulan data untuk mendapatkan literatur dan studi empiris yang telah dilakukan peneliti sebelumnya sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai salah satu alat pengendali dimana pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah Daerah. SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, Standar Pelayanan Minimal ialah total realisasi belanja modal bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur di Kota Kotamobagu diukur dalam rupiah.
2. Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu indikator penting kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga Indeks pembangunan

- manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup berdasarkan hasil perhitungan BPS diukur dalam satuan indeks.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDRB ADHK Kota Kotamobagu diukur dalam rupiah

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi bertujuan menaksir hubungan kausalitas (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori untuk menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel. (Mawardi, dkk: 84). Pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel lain yang disebut variabel antara (*intervening variable*). Pola perhatian dalam analisis jalur adalah pola hubungan sebab akibat (Kadir, 2016:240).

Hubungan variabel Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X₁), Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X₂) dan Belanja Pemerintah Bidang Infrastruktur (X₃) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Z).

Model persamaan regresi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. $Z = PZX_1 + PZX_2 + PZX_3 + e_1$
- b. $Y = PyX_1 + PyX_2 + PyX_3 + PyZ + e_2$

Dimana :

P = Koefisien Regresi Variabel X₁, X₂, X₃

Y = Variabel dependen

Z = Variabel intervening

e₁ = Residual atau Prediction Error e₂ = Residual atau Prediction Error

Uji Hipotesis

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (Muhammadinah dan Litriani : 2018). Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H_0 ditolak, H_a diterima).
2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H_0 diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat signifikan masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan signifikansi level 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari α , hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari α , hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Pengaruh Mediasi (*Intervening*)

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan Uji Sobel atau Sobel Test. Uji sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (Z). Untuk menguji seberapa besar peran variabel Z memediasi pengaruh variabel X terhadap Y, Sobel Test menggunakan uji Z sebagai berikut:

Dimana:

α = Koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi

b = Koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen

SE α = Standar error of estimation dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi
SE b = Standar error of estimation dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangannya pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan nol, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangannya pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangannya pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Menghitung Jalur

Perhitungan jalur menjelaskan tentang X1 dan X2 baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Y melalui variabel Z.

1. Menghitung Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE)
 - a. Pengaruh variabel X1 terhadap Z
 - b. Pengaruh variabel X2 terhadap Z
 - c. Pengaruh variabel X3 terhadap Z
 - d. Pengaruh variabel X1 terhadap Y
 - e. Pengaruh variabel X2 terhadap Y
 - f. Pengaruh variabel X3 terhadap Y
 - g. Pengaruh variabel Z terhadap Y
2. Menghitung Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE)
 - a. Pengaruh variabel X1 terhadap Y melalui Z
 - b. Pengaruh variabel X2 terhadap Y melalui Z
 - c. Pengaruh variabel X3 terhadap Y melalui Z

Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan hasil yang akurat pada analisis regresi berganda maka peneliti melakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang konsisten, memiliki sifat tidak bias dan memiliki ketepatan waktu. Terdapat beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan multiple linear regression atau analisis regresi berganda.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P Plot of Regression standardized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov, Chi-Square, Liliefors maupun Shapiro-Wilk.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Ghazali (2016) merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel independen atau bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau bebas. Jika variabel independen atau bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen atau bebas yang nilai korelasinya antara sesama variabel independen atau bebas sama dengan nol.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghazali (2016) memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi linier apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam regresi linier. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model heteroskedastisitas.

Model Penelitian Analisis Jalur (Path Analysis)

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $Z = PZX_1 + PZX_2 + PZX_3 + e_1$
- $Y = PyX_1 + PyX_2 + PyX_3 + PyZ + e_2$

Dimana :

P = Koefisien Regresi Variabel SPM X1, X2, dan X3

X1= SPM Bidang Pendidikan

X2= SPM Bidang Kesehatan

X3= SPM Bidang Infrastruktur

Y = IPM

Z = Pertumbuhan Ekonomi

e1 dan e2 = Residual atau Prediction Error

Perhitungan jalur dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang X1, X2 dan X3 baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Y melalui variabel Z.

1. Menghitung Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE)
 - a. Pengaruh SPM Bidang Pendidikan terhadap IPM
 - b. Pengaruh SPM Bidang Kesehatan terhadap IPM
 - c. Pengaruh SPM Bidang Infrastruktur terhadap IPM
 - d. Pengaruh SPM Bidang Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 - e. Pengaruh SPM Bidang Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 - f. Pengaruh SPM Bidang Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 - g. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM
2. Menghitung Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE)
 - a. Pengaruh SPM Bidang Pendidikan terhadap IPM melalui Pertumbuhan Ekonomi.
 - b. Pengaruh SPM Bidang Kesehatan terhadap IPM melalui Pertumbuhan Ekonomi.
 - c. Pengaruh SPM Bidang Infrastruktur terhadap IPM melalui Pertumbuhan Ekonomi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Persamaan

Penelitian ini menggunakan analisis jalur yang mengukur dampak langsung dan tidak langsung SPM bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Model persamaan regresi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Z = PZX_1 + PZX_2 + PZX_3 + e_1$$

$$Y = PyX_1 + PyX_2 + PyX_3 + PyZ + e_2$$

Tabel 2
Hasil Regresi I

Dependent Variable: Z1
Method: Least Squares
Date: 11/18/22 Time: 21:20
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.212199	3.942216	1.322150	0.2343
X1	2.10E-12	1.08E-12	1.950399	0.0990
X2	1.51E-11	4.19E-06	3.599058	0.0114
X3	8.35E-11	2.63E-11	3.179096	0.0191
R-squared	0.736934	Mean dependent var	5.785000	
Adjusted R-squared	0.605400	S.D. dependent var	2.126469	
S.E. of regression	1.335788	Akaike info criterion	3.706094	
Sum squared resid	10.70598	Schwarz criterion	3.827128	
Log likelihood	-14.53047	Hannan-Quinn criter.	3.573320	
F-statistic	5.602641	Durbin-Watson stat	2.853938	
Prob(F-statistic)	0.035662			

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil olahan data reviews

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.605400 atau 60,54% . Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan anggaran/ belanja pemerintah untuk SPM pendidikan (X₁), SPM kesehatan (X₂) dan SPM Infrastruktur Jalan (X₃) secara bersama – sama memiliki pengaruh 60,54 % terhadap variasi perubahan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan data diperoleh Prob (F-statistik) 0,035662 atau. Signifikan pada $\alpha = 0,05$. Yang artinya semua variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z.

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Belanja pengeluaran pemerintah untuk SPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.

1. Variabel Belanja SPM Pendidikan (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,099 atau signifikan pada $\alpha = 0.10$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Belanja SPM pendidikan (X_1) memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
 2. Variabel Belanja SPM Kesehatan (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0114 atau signifikans pada $\alpha = 0.01$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Belanja SPM Kesehatan (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
 3. Variabel Belanja SPM Infrastruktur (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0191 atau signifikans pada $\alpha = 0.01$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Belanja SPM Infrastruktur (X_3) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.

Tabel 3
Hasil Regresi III

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/18/22 Time: 21:31
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.12415	1.652860	43.03096	0.0000
X1	1.70E-11	9.05E-12	1.875172	0.1099
X2	7.19E-11	1.84E-11	3.897314	0.0080
X3	-1.06E-11	1.10E-11	-0.960572	0.3739
R-squared	0.903207	Mean dependent var	71.62200	
Adjusted R-squared	0.854811	S.D. dependent var	1.469828	
S.E. of regression	0.560058	Akaike info criterion	1.967622	
Sum squared resid	1.881991	Schwarz criterion	2.088657	
Log likelihood	-5.838112	Hannan-Quinn criter.	1.834848	
F-statistic	18.66275	Durbin-Watson stat	1.998376	
Prob(F-statistic)	0.001910			

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0,854811 atau 85,48%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan anggaran/ belanja pemerintah untuk SPM pendidikan (X₁), SPM kesehatan (X₂) dan SPM Infrastruktur Jalan (X₃) secara bersama – sama memiliki pengaruh 85,48 % terhadap variasi perubahan IPM di Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan data diperoleh Prob (F-statistik) 0,001910 atau. Signifikan pada $\alpha = 0,01$. Yang artinya semua variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Übung Statistik 1

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Belanja pengeluaran pemerintah untuk SPM terhadap IPM di Kota Kotamobagu.

1. Variabel Belanja SPM Pendidikan (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1099 atau signifikan pada $\alpha = 0.10$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Belanja SPM pendidikan (X_1) memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kota Kotamobagu.
 2. Variabel Belanja SPM Kesehatan (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0080 atau signifikan pada $\alpha = 0.01$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Belanja SPM Kesehatan (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap IPM di Kota Kotamobagu.
 3. Variabel Belanja SPM Infrastruktur (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3739 atau tidak signifikan pada $\alpha = 0.05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Belanja SPM Infrastruktur (X_3) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap IPM di Kota Kotamobagu.

Tabel 4
Hasil Regresi III

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/19/22 Time: 03:26
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.97291	0.315836	199.3846	0.0000
Z1	4.24E-06	1.53E-07	27.73472	0.0000
R-squared	0.989707	Mean dependent var	71.62200	
Adjusted R-squared	0.988420	S.D. dependent var	1.469828	
S.E. of regression	0.158168	Akaike info criterion	-0.673467	
Sum squared resid	0.200136	Schwarz criterion	-0.612950	
Log likelihood	5.367334	Hannan-Quinn criter.	-0.739854	
F-statistic	769.2144	Durbin-Watson stat	2.224345	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.988420 atau 98,84%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan Pertumbuhan Ekonomi (Z₁) memiliki pengaruh 99,84 % terhadap variasi perubahan IPM (Y) di Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Üji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda menunjukkan adanya tingkat signifikansi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kota Kotamobagu.

Variabel pertumbuhan ekonomi (Y) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau signifikan pada $\alpha = 0,01$, Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel pertumbuhan ekonomi (Y) memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kota Kotamobagu.

Menghitung Jalur

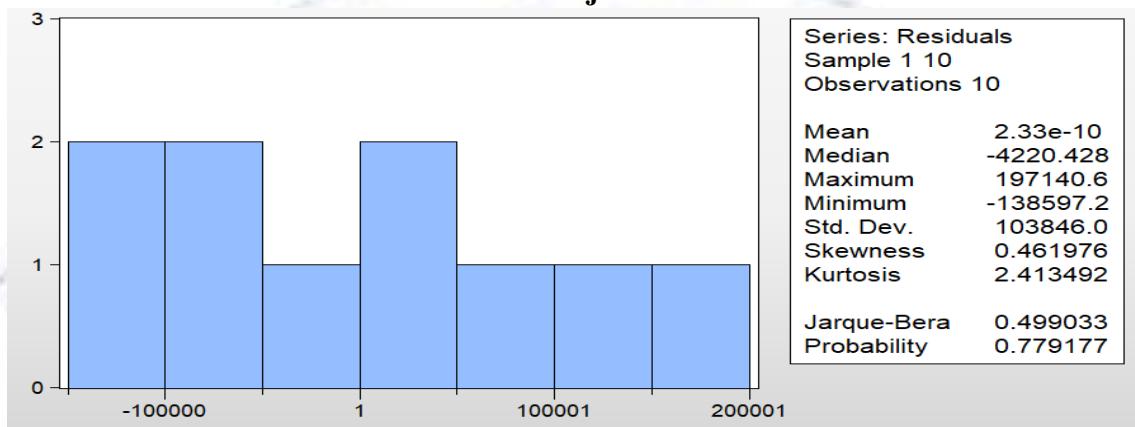
1. Menghitung Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE)
 - a. Pengaruh variabel X1 terhadap Z = 2.10E-12
 - b. Pengaruh variabel X2 terhadap Z = 1.51E-11
 - c. Pengaruh variabel X3 terhadap Z = 8.35E-11
 - d. Pengaruh variabel X1 terhadap Y = 1.70E-11
 - e. Pengaruh variabel X2 terhadap Y = 7.19E-11
 - f. Pengaruh variabel X3 terhadap Y = -1.06E-11
 - g. Pengaruh variabel Z terhadap Y = 4.24E-06
 - 1.1. Besar Pengaruh Langsung X terhadap Z = 1,001E-10
 - 1.2. Besar Pengaruh Langsung X terhadap Y = 7,83E-11
 - 1.3. Besar Pengaruh Langsung Z terhadap Y = 4.24E-06
 - 1.4. Total Pengaruh Langsung = 4,24018E-06
 2. Menghitung Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE)
 - a. Pengaruh variabel X1 terhadap Y melalui Z = 2.10E-12 + 4.24E-06 = 4.24E-06
 - b. Pengaruh variabel X2 terhadap Y melalui Z = 1.51E-11 + 4.24E-06 = 4.24002E06
 - c. Pengaruh variabel X3 terhadap Y melalui Z = 8.35E-11 + 4.24E-06 = 4.24008E-06
 - d. Total pengaruh tidak langsung = 1,27201E-05
 3. Total pengaruh = Total pengaruh langsung + Total pengaruh tidak langsung
Total pengaruh = 4.24018E-06 + 1.27201E-05 = 2.0E-05

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B).

Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,779177) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 , X_2 dan $X_3 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 11/19/22 Time: 07:31
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.41E+11	87.09751	NA
X1	4.23E-12	61.02746	2.774020
X2	1.75E-11	34.27801	1.258229
X3	6.26E-12	32.67462	2.552546

Sumber : Hasil olah data Eviews

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Dari hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan Eviews dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R2 sebesar 0,2505 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), $0,2505 > 0,05$ artinya residual digolongkan tidak memiliki heteroskedastisitas.

Tabel 6
Uji Breusch-Pagan-Godfrey
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.455392	Prob. F(4,5)	0.3403
Obs*R-squared	5.379598	Prob. Chi-Square(4)	0.2505
Scaled explained SS	1.368724	Prob. Chi-Square(4)	0.8496

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/19/22 Time: 07:35
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.14E+10	8.13E+10	-0.754558	0.4845
Z1	45512.48	35605.13	1.278256	0.2573
X1	0.346199	0.224467	1.542315	0.1836
X2	-0.927279	0.649164	-1.428420	0.2125
X3	-0.251978	0.253135	-0.995429	0.3652
R-squared	0.537960	Mean dependent var	9.71E+09	
Adjusted R-squared	0.168328	S.D. dependent var	1.22E+10	
S.E. of regression	1.11E+10	Akaike info criterion	49.40377	
Sum squared resid	6.15E+20	Schwarz criterion	49.55507	
Log likelihood	-242.0189	Hannan-Quinn criter.	49.23781	
F-statistic	1.455392	Durbin-Watson stat	2.021104	
Prob(F-statistic)	0.340270			

Sumber : Hasil olah data Eviews

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Dari hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah 2,021104, berarti terdapat autokorelasi. Data yang digunakan adalah data time series yang menunjukkan adanya pengaruh pengeluaran belanja SPM tahun sebelumnya dengan belanja SPM tahun sekarang.

Pembahasan

Kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar keberhasilan pembangunan daerah atau mengukur keberhasilan kebijakan pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat dalam penelitian ini di tandai dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan IPM di Kota Kotamobagu. Terdapat hubungan positif yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah untuk SPM bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan meningkatkan IPM secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan dan jenis mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintahan, menjawab bagaimana pemerintah dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas menjamin hak dasar masyarakat terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan penelitian Christian L Koyongian dkk, Catur Nanda dkk,

Peningkatan belanja pemerintah di bidang SPM meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini juga terbukti secara signifikan baik parsial dan secara Bersama-sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rotinsulu Debby, Rotinsulu dkk, Wahyudi, Ferdian Wijaya, Kunofiwa Tsaurai dkk, Simionescu dkk, Qiuahuichen dkk,

Pertumbuhan ekonomi yang terbukti secara signifikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Kota Kotamobagu juga sejalan dengan penelitian dari Eka Pratiwi, Hathaipat Kaewnerna. Bahkan Ervin N Susanti dan Zamora mampu menunjukkan hubungan sebab akibat positif antara IPM dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah daerah Kota Kotamobagu dalam menopang upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta IPM. Pemenuhan mandatory spending dari pemerintah pusat oleh daerah telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. SPM pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menopang pemerintah daerah mewujudkan pertumbuhan inklusif khususnya peningkatan kualitas SDM hebat dan berdaya saing di Kota Kotamobagu.

Secara spesifik terbukti alokasi anggaran untuk SPM infrastruktur paling besar pengaruhnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tentunya menopang kebijakan pemulihian ekonomi yang terdampak dari pandemic COVID 19. Pemenuhan infrastruktur dasar, bahkan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat menjadi salah satu motor penggerak pemulihian ekonomi

Disisi lainnya terbukti bahwa anggaran untuk SPM kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan IPM Kota Kotamobagu. Pengaruhnya semakin besar ketika di masa pandemic terjadi refocusing anggaran untuk menangani dampak COVID 19.

Terbukti bahwa total pengaruh tidak langsung alokasi belanja pemerintah lebih besar dibandingkan pengaruh langsung, karena variabel intervening pertumbuhan ekonomi memberikan stimulus positif sangat signifikan terhadap IPM di Kota Kotamobagu. Pengaruh positif secara langsung dan tidak langsung menguatkan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal di Kota Kotamobagu menopang penguatan IPM daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan / IPM di Kota Kotamobagu.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat signifikan mempengaruhi peningkatan IPM di Kota Kotamobagu.
4. Terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung positif menguatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat / IPM dengan adanya peningkatan alokasi belanja untuk pelayanan publik pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Saran

1. Belanja SPM Bidang Infrastruktur yang paling besar pengaruhnya dalam peningkatan kesejahteraan membuat pentingnya pengoptimalan anggaran ini pada perangkat daerah terkait serta monev terstruktur pada pelaksanaan program dan kegiatan penunjang indikator spm daerah,
2. Belanja SPM bidang kesehatan yang saat ini menjadi prioritas daerah menopang peningkatan IPM daerah, memiliki komitment yang kuat dalam penanganan pengembalian kualitas SDM hebat berdaya saing di Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincoln, 1999**, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012.** Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Barro, Robert J. & Xavier Sala-i Martin. 1995.** Economic Growth. New York. McGraw Hill Inc.
- Boediono. (1985).** Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : BPFE
- Bambang PS Brojonegoro, 2014**, Determinan Pertumbuhan Kota Di Indonesia, Jakarta
- Capello. R, 2012**, *Seminal Studies in Regional and Urban Economics*, Springer International Publishing, Italy, ISBN 978-3-319-57806-4
- Dumairy, 2004**, Perekonomian Indonesia, Cetakan kelima, Erlangga, Jakarta.
- Ferdinandus Sherly, 2020**, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ambon, Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi, Vol XIV, No.1
- Ginanjar Nugroho, 2016**, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Indonesia, Indonesia Treasure Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol.1 No.1.
- Gujarati Damodar N dan Dawn C Porter, 2012**, Dasar – Dasar Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta.
- Herrera Santiago, 2013**, Public Expenditure and Growth, Policy Research Working Papers
- Jhinghan M.L, 2012**, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Press, Jakarta.
- Jiranyakul, K., (2013).** The Relation between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand. Journal of Economics and Economic Education Research, 8(1): 93-102.
- Kuncoro M, 2000**, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Landau D, 1983**, Government Expenditure and Economic Growth A Cross-Country Study, JSTOR, Vol.49. N0.3
- Lumbantoruan E.P dan Hidayat Paidi,2014**, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Provinsi-provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi), Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.2
- Maratade SY, Rotinsulu D.Ch, Niode AO, 2017**, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.16 Tahun 2016.
- Merry A & Ahmad S, 2015**, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu, Jurnal Ekombis Review, Vol.3 N0.2.
- Murtomo, 1998**, *Regional and Rural Development Planning Series*, UGM, Yogyakarta.
- Mangkosoebroto, Guritno. (2001).** Ekonomi Publik Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE UGM
- Maulid LC, Bawono IR & Sudibyo YA, 2021**, The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Ekuilibrium Jurnal, Vol 16. No.1.
- Najmuddin Z, 2020**, Impact of Government Expenditure on Banten Economic Growth in 2010-2017, The Indonesian Journal of Development Planning, Vol IV No.1.
- Parul Pintu, 2020**, Government Expenditure and Economic Growth : a Post _ Keynesian Analysis, International Review of Applied Economics, Vol.35. Issue 3-4, pages 597-625
- Richardson Harry W,2007**, Regional Growth Theory, The University of California
- Robinson Tarigan, 2008**, Perencanaan Pembangunan Daerah; Edisi Revisi, Jakarta; Bumi Karsa.
- Sarkoro H dan Zulfikar, 2016**, DAK dan PAD Terhadap IPM (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2012-2014), Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.1 No.1, ResearchGate, DOI:10.23917/reaksi.v1i1.1972
- Susanti Nefriza,2021**, Pengaruh IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, Publikasi IAIN Batusangkar
- Sjafrizal. (2008).** Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.
- Todaro, Michel P & Smith, C Stepen. 2000.** *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael, P. (2008).** Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jilid 1, Jakarta: Penerbit Erlangga

Wahyudi, 2020, Pengeluaran Pemerintah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 ISBN: 978-602-53460-5-7

Wijaya Ferdian A, 2019, Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kab/Kota di Jawa Timur), Jurnal Simki Economic, Vol.3 No.2.



PENGARUH BELANJA MODAL DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Mauna Th.B. Maramis¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : maunamaramis@unsrat.ac.id,

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur penilaian terhadap pemerataan pembangunan. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia maka penduduk daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik dalam hal mengakses hasil pembangunan disegi memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur apakah masyarakat dalam suatu daerah sudah hidup sejahtera atau tidak. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan manusia tercermin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci : Belanja Modal, Investasi swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

The Human Development Index is a benchmark for evaluating the distribution of development. The higher the Human Development Index number, the better the population in the area can be said to be in terms of accessing development outcomes in terms of income, health, and education. Economic growth in an area is one of the important indicators in measuring whether the people in an area are living well or not. Economic growth is also a condition for achieving human development because human development is reflected in increased productivity and increased income through job creation. The purpose of this study was to analyze the effect of capital expenditure and private investment on economic growth and the human development index. The analytical method used is path analysis using the SPSS 26 application. The results show that capital expenditure has a significant effect on economic growth while private investment has no significant effect on economic growth. The results showed that capital expenditure and economic growth had no significant effect on the human development index, while private investment had a significant effect on the human development index.

Keywords: Capital Expenditure, Private Investment, Economic Growth and Human Development Index

PENDAHULUAN

Latar belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan tolak ukur penilaian terhadap pemerataan pembangunan. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia maka penduduk daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik dalam hal mengakses hasil pembangunan disegi memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Dewi dan

Sutrisna, 2014). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur apakah masyarakat dalam suatu daerah sudah hidup sejahtera atau tidak. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan manusia tercermin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Berikut ini adalah perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara:

Grafik 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2010-2021



Sumber : BPS Sulawesi Utara

IPM Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan selama periode 2010 hingga 2021, meskipun sempat mengalami penurunan 0,06 poin di tahun 2020 dan kemudian naik lagi di tahun 2021 menjadi 73,30. Nilai IPM tersebut dihitung berdasarkan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Hingga saat ini, IPM Sulawesi Utara masih bertahan dalam level tinggi. Perubahan status IPM Provinsi Sulawesi Utara terjadi pada tahun 2015 menjadi “tinggi” setelah sebelumnya “sedang”. Salah satu komponen penyusun IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), yang merupakan pembentuk dari dimensi kesehatan. Pada tahun 2021, UHH Sulawesi Utara tercatat 71,76 tahun atau meningkat 0,07 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, dalam melaksanakan sebuah pembangunan, investasi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung proses pembangunan, mengingat di provinsi Sulawesi Utara memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi lahan investasi. Investasi menjadi penting karena adanya investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja terserap karena banyaknya peluang lapangan pekerjaan yang terbuka. Selanjutnya hal ini tentu saja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan tersebut sangat menentukan IPM. Pasalnya, bisa mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat, yang selanjutnya dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses kehidupan yang layak terutama ditiga dimensi utama yaitu Kesehatan, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak.

Kegiatan pembangunan bertujuan untuk mensejaterahkan masyarakat. Oleh karena itu, agar kesejahteraan masyarakat tercapai maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran belanja langsung yaitu didalamnya belanja modal. Alokasi anggaran untuk belanja modal mampu mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat karena anggaran belanja modal diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat atau tidak mampu dibiayai masyarakat (Sodik, 2007). Pembiayaan belanja modal juga seperti pembangunan infrastruktur, sarana

pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi dan sarana transportasi yang akan memberikan dampak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk kesejahteraan sehingga jika di ukur dengan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) maka akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut (Anggatia Ariza 2016) pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono 2010).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme* (1990) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Nur Baeti, 2013).

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tembus sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57).

Menurut Sukirno (2002:10) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Todaro, 2000:140):

a. Akumulasi modal

Termasuk investasi baru yang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila bagian dan pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Berhubungan dengan kenaikan angka kenaikan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestiknya.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagainya. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

Belanja Modal

Menurut (Mursyidi, 2009), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut (Halim, 2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya untuk memberikan manfaat lain dari satu periode akuntansi Belanja Modal ini berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang dalam pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang menghasilkan Belanja Modal. Menurut (Halim, 2007) rumus untuk menghitung belanja modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan

1. Belanja Tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan / pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administratif.
2. Belanja Peralatan Mesin merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja Gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan, meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak
4. Belanja jalan adalah pengeluaran untuk menghasilkan jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai / digunakan .

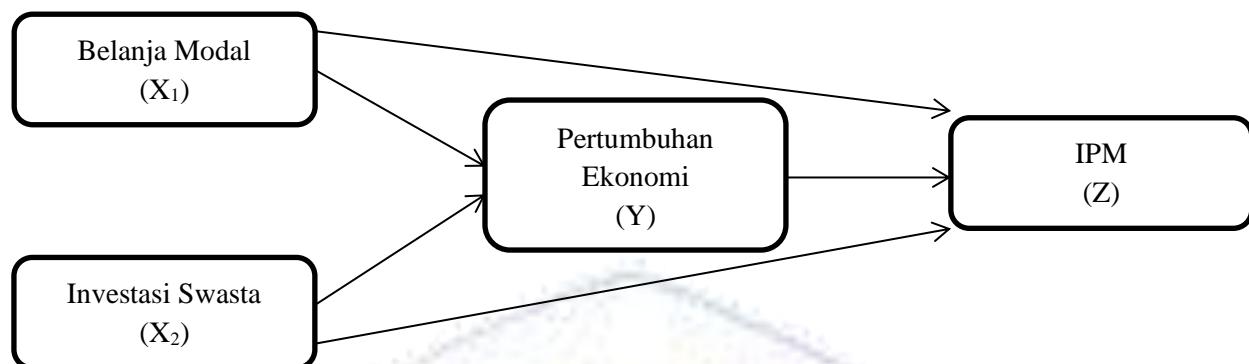
Investasi Swasta

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif (Sutha, 2000). Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999). Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang.

Menurut Sumanto (2006), investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Sedangkan Husnan dalam Anoraga dan Pakarti (2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000).

Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan dating. Investasi adalah suatu komponen dari Produk Domestik Bruto. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential dan investasi residential. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.

Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teori diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Diagram Jalur Pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia dengan variabel intervening pertumbuhan ekonomi

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Belanja modal dan investasi swasta secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Belanja modal dan investasi swasta secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variabel belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan selama tahun 2005-2021.

Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif.
2. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu menggunakan PDRB yang merupakan perbandingan total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu.
3. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebih satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.
4. Investasi Swasta adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif juga penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah.

Metode Analisis

Analisis Path

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut Retherford (1993) Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (Sunyoto,2012:1). Sedangkan menurut Webley (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (Sunyoto,2012:1). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda.

Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik (Garson, 2003).

Persamaan Analisis

Persamaan Substruktur 1

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 1 dapat dituliskan dengan persamaan matematis berikut

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y_1 merupakan variabel dependen, sedangkan X_1 dan X_2 adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 1 ini akan dijawab pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y_1 .

Persamaan Substruktur 2

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 2 dapat dituliskan dengan persamaan matematis berikut :

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Z merupakan variabel dependen, sedangkan X_1 , X_2 dan Y adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur 2 ini akan dijawab pengaruh variabel X_1 , X_2 dan Y terhadap Z .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Substruktur I

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *SPSS 26* untuk mengetahui pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi (Y) (variabel dependen) dengan belanja modal (X_1) dan investasi swasta (X_2) (variabel independen) di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1**Hasil regresi belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi**

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	8.128	.921		8.823	.000
Belanja Modal (X ₁)	-4.027E-9	.000	-.625	-2.799	.014
Investasi Swasta (X ₂)	-2.762E-10	.000	-.087	-.389	.703

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

*Hasil Olah data SPSS 26***1. Uji Parsial (t-statistik)****• Variabel Belanja Modal (X₁)**

Hasil persamaan regresi variabel belanja modal dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.014 nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha 5\%$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel belanja modal mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.799 dan t_{tabel} 1.76131 dengan df 14 ($n-k = 17-3 = 14$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 2.799 $>$ t_{tabel} 1.76131. Artinya ada hubungan linier antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

• Variabel Investasi Swasta (X₂)

Hasil persamaan regresi variabel investasi swasta dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.703. nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha 10\%$, maka H_a ditolak H_0 diterima. Variabel investasi swasta mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.389 dan t_{tabel} 1.34503 dengan df 14 ($n-k = 17-3 = 14$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni 0.389 $<$ t_{tabel} 1.34503 . Artinya tidak ada hubungan linier antara investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Koefisien Determinan (R²)**Tabel 2**
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.366	.275	1.77616

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah data SPSS 26

Besarnya nilai R square adalah 0.366. hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 36.6%, sementara sisanya 63.4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimaksudkan didalam penelitian.

3. Uji F-statistik

Tabel 3
Uji F Statistik

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2	12.727	4.034	.041 ^b
	Residual	14	3.155		
	Total	16			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil Olah data SPSS 26

Nilai F-statistik yang diperoleh 4.034 sedangkan F-tabel 3.74. Nilai F tabel berdasarkan besarnya $\alpha = 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3-1) = 2$ dan df untuk denominator $(n-k/17-3) = 14$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa variabel belanja modal dan investasi swasta secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persamaan Substruktur II

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *SPSS 26* untuk mengetahui pengaruh antara variabel indeks pembangunan manusia (Z) (variabel dependen) dengan belanja modal (X₁) investasi swasta (X₂) dan pertumbuhan ekonomi (Y) (variabel independen) di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 4

Hasil regresi belanja modal, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	74.768	2.979	25.096	.000	
	Belanja Modal (X ₁)	-2.549E-9	.000	-.332	-1.123	.282
	Investasi Swasta (X ₂)	-2.309E-9	.000	-.609	-2.562	.024
	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	-.115	.337	-.097	-.342	.738

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia (Z)

Hasil Olah data SPSS 26

1. Uji Parsial (t-statistik)

- **Variabel Belanja Modal (X₁)**

Hasil persamaan regresi variabel belanja modal dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.282. nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha 10\%$, maka H_a ditolak H_0 diterima. Variabel belanja modal mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.282 dan t_{tabel} 1.35017 dengan df 13 ($n-k = 17-4 = 13$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $0.282 < t_{tabel} 1.35017$. Artinya tidak ada hubungan linier antara belanja modal dengan indeks pembangunan manusia. Jadi, dapat disimpulkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

- **Variabel Investasi Swasta (X₂)**

Hasil persamaan regresi variabel investasi swasta dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.024 nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha 5\%$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Variabel investasi swasta mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.799 dan t_{tabel} 1.76131 dengan df 14 ($n-k = 17-3 = 14$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $2.562 > t_{tabel} 1.77093$. Artinya ada hubungan linier antara investasi swasta dengan indeks pembangunan manusia. Jadi, dapat disimpulkan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

- **Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y)**

Hasil persamaan regresi variabel pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bahwa terdapat nilai sig sebesar 0.738. nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha 10\%$, maka H_a ditolak H_0 diterima. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.342 dan t_{tabel} 1.35017 dengan df 13 ($n-k = 17-4 = 13$). Jadi, nilai t_{hitung} yakni $0.342 < t_{tabel} 1.35017$. Artinya tidak ada hubungan linier antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia. Jadi, dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 5
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.584 ^a	.341	.189	2.24259
a. Predictors: (Constant), Y, X2, X1				

Hasil Olah data SPSS 26

Besarnya nilai R square adalah 0.341 hal ini menunjukan bawah kontribusi pengaruh belanja modal, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 34.1%, sementara sisanya 65.9% diperngaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimaksudkan didalam penelitian.

3. Uji F-statistik

Tabel 3
Uji F Statistik

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.829	3	11.276	2.242
	Residual	65.380	13	5.029	
	Total	99.209	16		
a. Dependent Variable: Z					
b. Predictors: (Constant), Y, X2, X1					

Hasil Olah data SPSS 26

Nilai F-statistik yang diperoleh 2.242 sedangkan F-tabel 3.41. Nilai F tabel berdasarkan besarnya $\alpha = 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1/4-1= 3$) dan df untuk denominator ($n-k/17-4= 13$). Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya

bawa variabel belanja modal, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki tanda negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila belanja modal meningkat maka pertumbuhan ekonomi turun begitu sebaliknya *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi belanja modal ataupun pengeluaran pemerintah tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Belanja modal juga banyak digunakan untuk pembangunan yang menopang pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan proyek-proyek investasi yang dimana memiliki dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2015) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila investasi swasta meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Jonas (2012) menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh investasi yang tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menandakan bahwa masih kurang adanya kepercayaan investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya.

Pengaruh Belanja Modal, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya apabila belanja modal meningkat maka indeks pembangunan manusia turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menyentuh secara langsung kepada masyarakat sehingga belanja modal belum memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. sehingga diharapkan belanja modal yang dialokasikan mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berguna bagi masyarakat melalui berbagai program pemerintah yang dianggarkan. Dengan demikian melalui belanja modal daerah, pembangunan yang mengarah pada peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan dengan baik. Ketika pemerintah mengeluarkan dana untuk membiayai investasi dan pembangunan infrastuktur maka akan mempekerjakan tenaga kerja yang kemudian akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumsi agregat akan meningkat dan mendorong peningkatan produksi (Taufik, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki tanda negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya apabila investasi swasta meningkat maka indeks pembangunan manusia turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. hasil ini tidak

sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia. menurut todaro (2016) investasi swasta masuk sebagai salah satu

komponen PDRB yang digunakan masing-masing daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga tercapai pembangunan yang diinginkan hubungan antara investasi dengan pembangunan manusia yaitu semakin tinggi investasi maka indeks pembangunan manusia semakin baik. Sehingga pentingnya peranan investasi terhadap pembangunan manusia tampak pada perhatian berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta yang memberikan modal mereka untuk meningkatkan kualitas modal manusia tersebut. investasi yang dialokasikan untuk kepentingan modal manusia tidak dapat dilihat dalam jangka waktu yang singkat, sehingga tidak heran bahwa di dalam anggaran pemerintah seringkali terjadi tarik menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi dan investasi untuk sektor pembangunan modal manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tanda negative dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka indeks pembangunan manusia akan turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami fluktuatif dimana juga beberapa tahun ini terjadi penurunan yang sangat tajam karena adanya dampak pandemi. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi produktifitas tenaga kerja yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki tanda negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila belanja modal meningkat maka pertumbuhan ekonomi turun begitu sebaliknya *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi belanja modal ataupun pengeluaran pemerintah tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila investasi swasta meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Hal ini disebabkan oleh investasi yang tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menandakan bahwa masih kurang adanya kepercayaan investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya apabila belanja modal meningkat maka indeks pembangunan manusia turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menyentuh secara langsung kepada masyarakat sehingga belanja modal belum memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki tanda negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya apabila investasi swasta meningkat maka indeks pembangunan manusia turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Menurut todaro (2016) investasi swasta masuk sebagai salah satu komponen PDRB yang digunakan masing-masing daerah dalam

meningkatkan pelayanan publik sehingga tercapai pembangunan yang diinginkan hubungan antara investasi dengan pembangunan manusia yaitu semakin tinggi investasi maka indeks pembangunan manusia semakin baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tanda negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. artinya pabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka indeks pembangunan manusia akan turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Hal ini dikarenakan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami fluktuatif dimana juga beberapa tahun ini terjadi penurunan yang sangat tajam karena adanya dampak pandemi.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat mengelola dan mengawasi anggaran belanja modal agar dapat di pergunakan dengan baik. Begitu juga dengan investasi agar dapat mengupayakan iklim investasi yang kondusif agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan indeks pembangunan manusia.
2. Untuk penelti berikutnya, agar menambah variabel penelitian, yaitu yang berengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariza, Anggatia (2016).** "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Perspektif Islam". T.T.
- Abdul Halim. (2007).** Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Anoraga, Pandji Dan Piji Pakarti. 2006.** Pengantar Pasar Modal. Edisi Revisi. Jakarta: Pt Rineka Cipta
- Boediono. 2010.** Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro. Edisi Kedua. Yogyakarta : Bpfe.
- Dewi, Putu Ayu Krisna Dan Sutrisna, I Ketut. (2014).** Pengaruh Kemandirian Keuanganp Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana Bali, Vol.4, No.1. Bali.
- Garson, D. 2003.** Teori Analisis Jalur.
Http://Www.Jonathansarwono.Info/Aj/Analisis_Jalur.Htm. Akses 26 Februari 2012.
- Jamzani, Sodik (2007, 27-36),** Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12. No 1, April 2007. Hal 27-36.
- Jocas, M. (2012).** Pengaruh Investasi, Jumlah Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Timor Leste Periode 2004- 2011. Yogyakarta: Upn "Veteran" .
- Jhingan, M.L. 2007.** Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kumba Digdowiseiso (2021),** Pengaruh Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2012-2019 Dengan Populasi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Sebagai Variabel Kontrol Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 5 No. 3, 2021
- Lypsey. (1997).** Pengantar Mkaroeconomia. Jakarta: Bina Rupa Aksara

- Marisca, Haryadi. 2016.** Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi. *Jurnal Prespektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*. Jambi.
- Mursyidi.2009.** Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refikaaditama
- Mankiw, 2000,** Makroekonomi Edisi Ke Enam, Erlangga, Jakarta
- Nur Baeti. 2013.** Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Enonomic Development Analisis Journal*. Semarang : Unnes.
- Nurhidayati Islamiah (2015),** Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Economix Volume 3 Nomor 1 Juni 2015*.
- Robert D. Retherford (1993).** Statistical Model For Causal Analysis. New York : John Wiley & Sons. Inc
- Sumanto, Edi, (2006),** Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Terhadap Perekonomian Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sutha,I.P.G.A. (2000).** Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti
- Sukirno, Sadono, 2002.** Makro Ekonomi Modern, P.T.Rajawali Grafindo Persada : Jakarta.
- Sunyoto, Danang. (2012).** Model Analisis Jalur Untuk Riset Ekonomi. Bandung: Yrama Widya.
- Todaro, M.P. 2000.** Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh Ed.). Jakarta: Erlangga
- United Nations Development Programme. 1990.** Human Development Report. <Http://Hdr.Undp.Org/En/Content/Human-Development-Index-Hdi> . Diakses 13 Januari 2020.
- Webster, E. 1999.** The Economics Of Intangible Investment. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.